



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet yang memuat 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) sasaran untuk periode pelaksanaan tahun 2015 sampai dengan tahun 2030.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana aksi Daerah dalam rangka pelaksanaan pencapaian target dan sasaran TPB Tahun 2024-2026.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya sebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
7. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
11. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB dan pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi/instansi dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi/instansi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
12. Pelayanan Metada Indikator SDGs Jawa Tengah selanjutnya disebut PEMIRSA adalah aplikasi yang digunakan untuk mengkompilasi data realisasi pencapaian target indikator TPB dan monitoring data capaian SDGs pada level provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan RAD TPB Tahun 2024-2026.
- (2) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan Daerah jangka menengah dan jangka pendek.
- (3) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai acuan bagi Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAD TPB.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD TPB terdiri atas:
 - a. bab I : Pendahuluan;
 - b. bab II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB Daerah;
 - c. bab III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB Daerah;
 - d. bab IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. bab V : Penutup; dan
 - f. lampiran, meliputi:
 1. matrik sasaran capaian indikator TPB;
 2. matrik program/kegiatan dan anggaran TPB pemerintah;
 3. matrik program/kegiatan dan anggaran TPB non pemerintah;
 4. form identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut TPB; dan
 5. form praktik baik TPB.
- (2) RAD TPB sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Dalam mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB, Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pencapaian RAD TPB.
- (3) Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB disampaikan kepada Gubernur dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan RAD TPB setiap tahun kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB dilakukan melalui aplikasi Metadata Indikator TPB kepada Perangkat Daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah untuk melaporkan capaian indikator TPB dan sarana diseminasi data capaian TPB Jawa Tengah kepada masyarakat di Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003



RENCANA AKSI DAERAH

**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/
*Sustainable Development Goals (SDGs)***



PROVINSI JAWA TENGAH

2024–2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Keselarasan TPB/SDGS dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	1
1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	3
1.3 Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	3
1.4 Pembiayaan TPB/SDGs	4
1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.....	5
1.6 Sistematika RAD TPB/SDGs	5
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs	7
2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	7
A. Pengantar.....	7
B. Status Capaian	7
C. Tantangan	11
2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	12
A. Pengantar.....	12
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	12
C. Tantangan	19
2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	20
A. Pengantar.....	20
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	20
C. Tantangan	31
2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.....	31
A. Pengantar.....	31
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	31
C. Tantangan	37
2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.....	38
A. Pengantar.....	38

B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	39
C. Tantangan	43
2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	43
A. Pengantar.....	43
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	44
C. Tantangan	47
2.7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern	47
A. Pengantar.....	47
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	47
C. Tantangan	50
2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua.....	51
A. Pengantar.....	51
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	51
C. Tantangan	55
2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.....	56
A. Pengantar.....	56
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	56
C. Tantangan	59
2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara.....	60
A. Pengantar.....	60
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	60
C. Tantangan	62
2.11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	63
A. Pengantar.....	63
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	64
C. Tantangan	71
2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	72
A. Pengantar.....	72
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	72
C. Tantangan	75
2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	75
A. Pengantar.....	75
B. Status dan Kondisi Pencapaian.....	76
C. Tantangan	77

2.14	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	77
A.	Pengantar.....	77
B.	Status dan Kondisi Pencapaian.....	77
C.	Tantangan	80
2.15	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Daratan	81
A.	Pengantar.....	81
B.	Status dan Kondisi Pencapaian.....	81
C.	Tantangan	84
2.16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.....	84
A.	Pengantar.....	84
B.	Status dan Kondisi Pencapaian.....	85
C.	Tantangan	90
2.17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	91
A.	Pengantar.....	91
B.	Status dan Kondisi Pencapaian.....	91
C.	Tantangan	93
BAB III	TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs.....	95
3.1	TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN.....	95
3.2	TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN.....	101
3.3	TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	104
3.4	TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	109
3.5	TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER.....	115
3.6	TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK.....	119
3.7	TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU.....	123
3.8	TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.....	125
3.9	TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR.....	128
3.10	TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN	131
3.11	TUJUAN 11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN.....	134
3.12	TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB.....	138
3.13	TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM.....	140
3.14	TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN	143
3.15	TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN.....	146
3.16	TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH.....	148

3.17	TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN.....	153
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		156
4.1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.....	156
4.2	Waktu Pemantauan dan Evaluasi.....	156
4.3	Alur dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....	157
A.	Alur Pemantauan dan Evaluasi – Kategori Pemerintah.....	157
B.	Alur Pemantauan dan Evaluasi – Kategori NonPemerintah.....	158
C.	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	160
4.4	Bahan Pemantauan dan Evaluasi.....	161
4.5	Alat Pemantauan dan Evaluasi.....	161
A.	Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs.....	161
B.	Formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah dan NonPemerintah	163
C.	Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut (FORM 4)	165
D.	Formulir Pembelajaran/Praktik Baik Pelaksanaan TPB/SDGs (FORM 5).....	166
4.6	Laporan Pencapaian TPB/SDGs.....	167
4.7	Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	167
BAB V PENUTUP		168

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Capaian Konsumsi tiap Kelompok Pangan di Jawa Tengah Tahun 2018-2022	14
Tabel II. 2 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	14
Tabel II. 3 Kualifikasi Guru S1/D4 Jawa Tengah Tahun 2018-2022	35
Tabel II. 4 Kondisi Fisik Sarana Prasarana Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	35
Tabel II. 5 Kekerasan Perempuan dan Anak berdasarkan Jenis Kekerasan di Jawa Tengah Th. 2019-2023 (Jiwa).....	40
Tabel II. 6 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	46
Tabel II. 7 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	64
Tabel II. 8 Jumlah Terminal Penumpang di Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	65
Tabel II. 9 Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	65
Tabel II. 10 Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2019 – 2023.....	66
Tabel II. 11 Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2023.....	66
Tabel II. 12 Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2017 – 2023.....	66
Tabel II. 13 Jumlah Kejadian Bencana Alam di Jateng Tahun 2019 – 2023	67
Tabel II. 14 Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	68
Tabel II. 15 Taksiran Kerugian Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	68
Tabel II. 16 Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	69
Tabel II. 17 Persentase Sampah yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	69
Tabel II. 18 Rata-rata Luasan dan Persentase RTH di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah Th. 2020-2022.....	70
Tabel II. 19 Persentase Sampah yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	73
Tabel II. 20 Aksi Penurunan Emisi GRK Untuk Setiap Sektor di Jawa Tengah Tahun 2021	76
Tabel II. 21 Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Jawa Tengah Th. 2018–2022.....	82
Tabel II. 22 Daerah Aliran Sungai Prioritas di Jawa Tengah Tahun 2022.....	82
Tabel II. 23 Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara di Jawa Tengah Th. 2018-2022	83
Tabel II. 24 Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Th. 2018 – 2022.....	83
Tabel II. 25 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022	88
Tabel II. 26 Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	91
Tabel III. 1 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan.....	96
Tabel III. 2 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 2: Tanpa Kelaparan.....	102
Tabel III. 3 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	105
Tabel III. 4 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 4: Pendidikan yang Berkualitas.....	110
Tabel III. 5 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 5: Kesenjangan Gender.....	116

Tabel III. 6 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	120
Tabel III. 7 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau	124
Tabel III. 8 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....	126
Tabel III. 9 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur	129
Tabel III. 10 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan ...	132
Tabel III. 11 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	136
Tabel III. 12 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab.....	139
Tabel III. 13 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	142
Tabel III. 14 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 14: Ekosistem Lautan.....	145
Tabel III. 15 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 15: Ekosistem Daratan	147
Tabel III. 16 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.....	149
Tabel III. 17 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keselarasan dan Mainstreaming TPB dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 1. 2 Laporan Realisasi CSR 2019-2023 oleh Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD	4
Gambar 1. 3 Mekanisme dan Tahapan Penyusunan RAD TPB Jawa Tengah Tahun 2024-2026.....	5
Gambar 2. 1 Tingkat Kemiskinan Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Persen)	7
Gambar 2. 2 Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 (Persen).....	8
Gambar 2. 3 Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah Tahun 2021-2023	8
Gambar 2. 4 Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 (Persen).....	9
Gambar 2. 5 Proporsi Penduduk dengan akses pada pelayanan dasar di Jawa Tengah Th. 2019-2023 (Persen).....	11
Gambar 2. 6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	12
Gambar 2. 7 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2023.....	13
Gambar 2. 8 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2023	15
Gambar 2. 9 Rekap Status Gizi Balita usia 0 - 59 Bulan Di Jawa Tengah Berdasarkan e-PPGBM Bulan Desember 2023.....	16
Gambar 2. 10 Tren Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk (BB/TB) Jawa Tengah Tahun 2019- 2023	17
Gambar 2. 11 Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil di Jawa Tengah Tahun 2019- 2023 (Persen) ...	17
Gambar 2. 12 Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja Jawa Tengah Tahun 2019- 2022 (Rp Juta per Tenaga Kerja).....	18
Gambar 2. 13 Angka Kematian Ibu (AKI) Jawa Tengah Tahun 2019-2023	20
Gambar 2. 14 Faktor Penyebab Kematian Ibu di Jawa Tengah Tahun 2023.....	21
Gambar 2. 15 Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 ..	21
Gambar 2. 16 Distribusi Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Penolong Persalinan Jawa Tengah Th. 2019-2022 (Persen).....	22
Gambar 2. 17 Tren AKN, AKB, AKaBa Jawa Tengah Tahun 2019-2023	23
Gambar 2. 18 Proporsi Penyebab Kematian Neonatal di Jawa Tengah Tahun 2023.....	23
Gambar 2. 19 Proporsi Penyebab Kematian Anak di Jawa Tengah Tahun 2023	24
Gambar 2. 20 Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Meninggal di Jawa Tengah Tahun 2019-2023	25
Gambar 2. 21 Peta Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>) Jawa Tengah Th. 2023	25
Gambar 2. 22 Cakupan Penemuan Kasus TBC Anak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Th. 2023.....	26

Gambar 2. 23 Kejadian Malaria per 1.000 penduduk di Jawa Tengah Th. 2019-2023	26
Gambar 2. 24 Jumlah Kasus Hipertensi di Jawa Tengah Th. 2019-2023	27
Gambar 2. 25 Jumlah Kasus Obesitas di Jawa Tengah Th. 2019-2023.....	28
Gambar 2. 26 PUS Peserta KB Aktif Metode Modern di Jawa Tengah Th. 2023	28
Gambar 2. 27 Cakupan Peserta KB Aktif terhadap PUS Menurut Kab/Kota di Jawa Tengah Th. 2023	29
Gambar 2. 28 Cakupan Kepesertaan JKN di Jawa Tengah Th. 2019-2023.....	30
Gambar 2. 29 Proporsi Tenaga Kesehatan Menurut Jenis di Jawa Tengah Tahun 2023	30
Gambar 2. 30 Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Usia 7-18 Tahun di Jawa Tengah Th. 2022-2023	32
Gambar 2. 31 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang di Jawa Tengah Th. 2021 -2023	33
Gambar 2. 32 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Jawa Tengah Tahun 2021 -2023 (Persen).....	33
Gambar 2. 33 Proporsi peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi numerasi pada jenjang pendidikan menengah dan khusus Jawa Tengah Th. 2021-2023 (Persen)	34
Gambar 2. 34 Proporsi Remaja (Usia 15-24 th) dan Dewasa (usia 15-59 th) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Jawa Tengah Th. 2021-2023 (Persen).....	36
Gambar 2. 35 Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun di Jawa Tengah Th. 2020-2022 (Persen)	37
Gambar 2. 36 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Jiwa).....	39
Gambar 2. 37 Jumlah Perkawinan Dibawah Usia 18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ...	41
Gambar 2. 38 Distribusi Jumlah Perkawinan Dibawah Usia 18 Tahun berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023	41
Gambar 2. 39 Proporsi Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Jawa Tengah Th. 2019-2023.....	42
Gambar 2. 40 Capaian Akses Air Minum Jawa Tengah Tahun 2019-2023	44
Gambar 2. 41 SPAM Regional Jawa Tengah	45
Gambar 2. 42 Desa ODF di Jawa Tengah.....	46
Gambar 2. 43 Konsumsi Listrik Per Kapita Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	48
Gambar 2. 44 <i>Timeline</i> Capaian Bauran EBT di Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	50
Gambar 2. 45 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Persen)	51
Gambar 2. 46 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 (Persen).....	52
Gambar 2. 47 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 (Persen).....	52

Gambar 2. 48 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2023 (Persen).....	53
Gambar 2. 49 Tingkat Pertumbuhan Riil per Orang Bekerja Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 (Persen).....	54
Gambar 2. 50 NEET Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen).....	54
Gambar 2. 51 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 (Persen).....	55
Gambar 2. 52 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 (Persen).....	55
Gambar 2. 53 Persentase Kondisi Mantap Jalan Nasional Jawa Tengah Th. 2019-2023 (Persen)	57
Gambar 2. 54 Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah.....	58
Gambar 2. 55 Rasio Gini Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023	61
Gambar 2. 56 Rasio Gini Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023.....	61
Gambar 2. 57 Proporsi Penduduk yang hidup di bawah 50% dari Median Pendapatan Jawa Tengah dan Nasional Th. 2018-2023 (Persen).....	62
Gambar 2. 58 Aspek Kebebasan Sipil Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023	62
Gambar 2. 59 Jumlah Limbah B3 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022.....	74
Gambar 2. 60 Aksi Penurunan Emisi GRK setiap Sektor di Jawa Tengah Tahun 2010-2022.....	76
Gambar 2. 61 Kontribusi Penurunan Emisi berdasarkan Sektor di Jawa Tengah Tahun 2010-2022	78
Gambar 2. 62 Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2023.....	79
Gambar 2. 63 Luas Kawasan Konservasi di Jawa Tengah.....	80
Gambar 2. 64 Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan di Jawa Tengah Th.2019 – 2022.....	85
Gambar 2. 65 Jumlah Bantuan Hukum di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022.....	86
Gambar 2. 66 Opini BPK pada 36 Instansi Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Th. 2019 – 2022.....	87
Gambar 2. 67 Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi $\geq$ B Jawa Tengah Th. 2019-2022 (Persen).....	89
Gambar 2. 68 Indeks Aspek IDI Jawa Tengah Th. 2021-2023	90
Gambar 3. 1 Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs.....	157
Gambar 3. 2 Alur Informasi Pemantauan Organisasi NonPemerintah.....	159
Gambar 3. 3 Tampilan Aplikasi Web PEMIRSA	160
Gambar 3. 4 Tahapan Penyusunan Laporan Evaluasi RAD TPB/SDGs Tahunan.....	161

BAB I

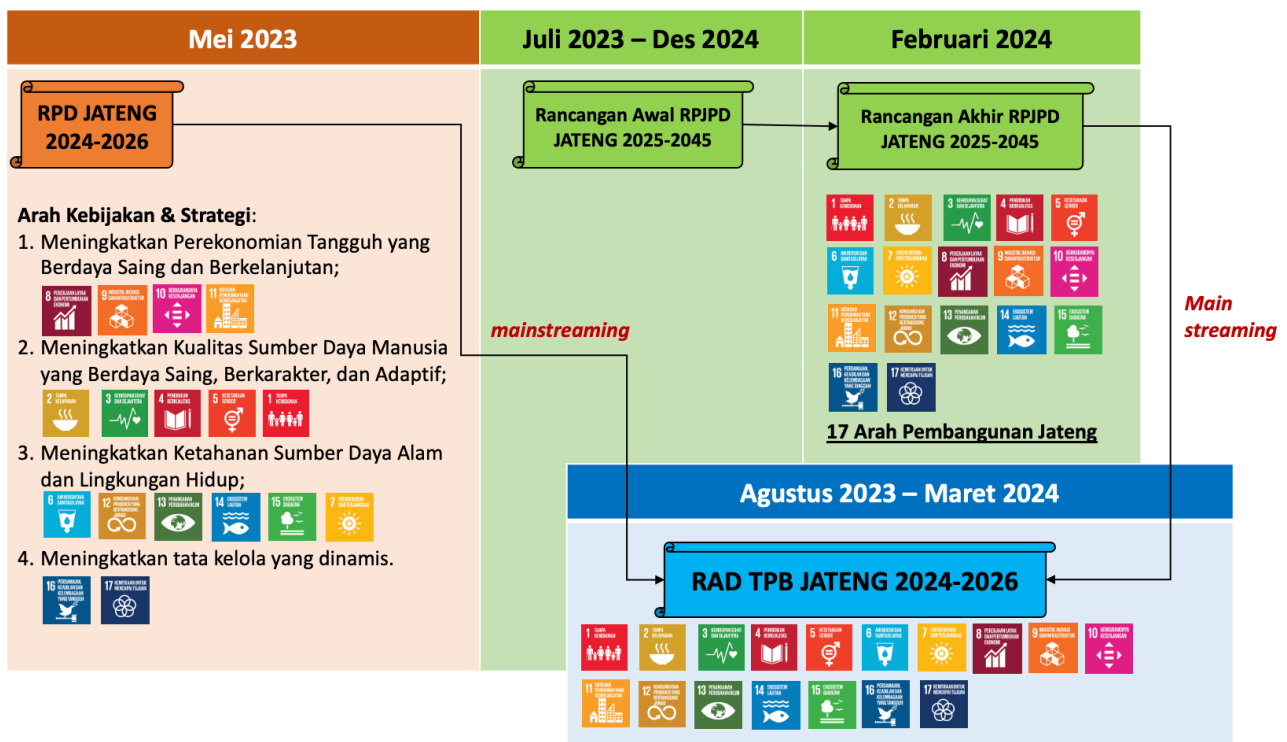
PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan TPB/SDGS dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RAD TPB/SDGs Jawa Tengah 2024-2026 disusun beriringan dengan proses penyusunan RPJPD Jawa Tengah 2025-2045. Rancangan RPJPD Jawa Tengah 2025-2045 mengacu pada Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 yang merupakan dokumen cita-cita bangsa sekaligus Visi Indonesia Emas 2045 yaitu mewujudkan **Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Dalam RPJPN 2025-2045 bukan hanya sekedar menuangkan Visi namun juga upaya-upaya yang harus ditempuh dalam mewujudkan Visi tersebut dan digambarkan melalui pencapaian target sasaran pembangunan jangka panjang.

Pada saat yang bersamaan daerah diamanatkan untuk menyusun RPJPD 2025-2045. Amanat, mandat dan target sasaran yang tertuang dalam **RPJPN 2025-2045 bersifat imperatif** bagi Pemerintah Provinsi dalam **RPJPD 2025-2045**. RPJPN 2025-2045 telah mengarusutamakan muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang secara eksplisit diterjemahkan dalam 17 Arah (Tujuan) Pembangunan, demikian pula dengan RPJPD 2025-2045. Adapun visi yang ingin diraih Jawa Tengah yaitu mewujudkan **Jawa Tengah Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan** dengan memperhatikan arah pembangunan nasional untuk Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional. Perwujudan cita-cita pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun kedepan ini dilakukan dengan landasan transformasi agar lebih dapat mencapai pembangunan yang kompetitif yang didorong oleh produktivitas tinggi secara merata dan berkelanjutan. Upaya transformasi difokuskan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagai landasannya.

Penyusunan RAD TPB Jawa Tengah 2024-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan (1) Rancangan Akhir RPJPD Jawa Tengah 2025-2045 serta (2) RPD Jawa Tengah 2024-2026 yang masih berlaku saat ini. Dokumen RPD 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun pada masa transisi kekosongan Kepala Daerah. Penyusunan RAD TPB/SDGs Jawa Tengah ini mensinkronkan kedua dokumen tersebut, sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Keselarasan dan Mainstreaming TPB dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam RPD Jateng 2024-2026, arah kebijakan dan strategi Jawa Tengah telah selaras dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Upaya peningkatan perekonomian tangguh dan berkelanjutan ditempuh melalui penguatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan asset. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian target dan tujuan TPB yang ke-8 dan 9 yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan industri, inovasi dan infrastruktur yang berkelanjutan. SDM Jawa Tengah diharapkan menjadi SDM yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif, dimana untuk mewujudkan hal tersebut maka target dan tujuan TPB ke-4 yaitu pendidikan berkualitas untuk semua, tujuan ke-3 kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan ke-2 tercukupinya gizi seimbang dan tidak adanya diskriminasi dalam segala hal khususnya gender sebagaimana tujuan ke-5 harus dapat dicapai. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah tercipta dengan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menghadapi perubahan iklim, ketahanan energi, sumber daya air, serta menurunkan risiko bencana. Upaya-upaya tersebut sejalan dengan pencapaian target dan tujuan TPB yang ke-7, 13, 14 dan 15 yang merupakan bagian dari Pilar Ekonomi dan Lingkungan TPB. Tata kelola yang dinamis diwujudkan melalui tujuan ke-16 pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan.

Pengarusutamaan target TPB ke dalam RPD 2024-2026 lebih banyak dituangkan pada arah kebijakan dan strategi, namun belum optimal pada target capaian dan sasaran pembangunan.

Dalam perkembangannya daerah harus menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang RPJPD 2025-2045 yang memperhatikan RPJPN 2025-2045, sehingga target capaian dan sasaran serta indikator TPB diarusutamakan lebih banyak dalam dokumen RPJPD 2025-2045.

1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian target TPB. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Tim Koordinasi Daerah (TKD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dalam rangka penyusunan RAD TPB Tahun 2018-2023 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/13 Tahun 2018 guna menindaklanjuti Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) saat itu.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 mengalami pembaharuan menjadi Perpres Nomor 111 tahun 2022. Sehingga pada tahun 2024 ini kembali disusun RAD TPB Jawa Tengah untuk periode 2024-2026, kemudian diikuti dengan review Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB yang disahkan melalui keputusan Gubernur Nomor 120/11 tahun 2024.

Komitmen pelaksanaan TPB di tingkat kab/kota ditunjukkan dengan tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) di 22 kab/kota dari 35 kab/kota se-Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berkewajiban menyusun dokumen RAD TPB, namun wajib memberikan dukungan dalam pelaksanaan, pencapaian target TPB dan penyusunan dokumen RAD TPB Provinsi.

Implementasi TPB baik oleh Pemerintah dan Non Pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat dilihat melalui pelaksanaan praktik baik pencapaian TPB, salah satunya dengan praktik **Jawa Tengah *Solar Province*** yang berhasil menghantarkan Jawa Tengah dalam meraih SDGs Award Tahun 2022 kategori provinsi.

Keterlibatan peran dari unsur Non Pemerintah baik akademisi, organisasi sosial masyarakat, filantropi dan dunia usaha tercerminkan melalui Tim Koordinasi Daerah (TKD) Pelaksanaan TPB Jawa Tengah dalam bentuk dukungan penyusunan rencana aksi daerah dan laporan pencapaian TPB setiap tahunnya.

1.3 Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Prinsip pelaksanaan TPB di Jawa Tengah meliputi yang pertama ***universality***, yaitu mendorong penerapan TPB di seluruh 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tanpa terkecuali. Bukan hal mudah bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengorkestrasi pelaksanaan dan pencapaian TPB, namun semangat pencapaian TPB tetap digaungkan dan diperkuat melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan. Momentum penyusunan RPJPD serentak dari tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi penguat internalisasi amanat TPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Prinsip yang kedua yaitu *leave no one behind*, yaitu dalam pelaksanaan pencapaian TPB memperhatikan kelompok masyarakat marginal dan rentan seperti masyarakat kurang mampu, disabilitas, perempuan dan anak. Prinsip ini mewarnai dalam setiap tahapan/proses penyusunan rencana aksi dan laporan pencapaian. Pelibatan kaum rentan yang diwakili oleh beberapa organisasi sosial kemasyarakatan terus dipacu, aspirasi masyarakat rentan dalam sektor pembangunan juga terus digalakkan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, sosial dan sektor pembangunan lainnya. Kelompok masyarakat rentan dilibatkan sebagai pelaku pembangunan bukan sekedar objek pembangunan.

Prinsip yang ketiga *localizing SDGs*, yaitu melokalkan tujuan target TPB agar mempermudah dalam pemahaman dan pencapaian target TPB. Tujuan, target dan indikator TPB merupakan amanat global yang diratifikasi menjadi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 169 Target dan 289 Indikator secara nasional. Namun kondisi tersebut tidak dapat sepenuhnya diakomodir daerah dengan jumlah yang sama, mengingat ketersediaan data dan disagregasi data berhenti pada level nasional.

1.4 Pembiayaan TPB/SDGs

Strategi pembiayaan TPB tidak hanya bersumber dari anggaran Pemerintah, namun diperluas pada Non Pemerintah. Sumber pembiayaan pembangunan dari Non Pemerintah tidak hanya bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) saja, namun dapat diperluas pada filantropi, organisasi sosial masyarakat dan perguruan tinggi. Dari tahun 2019 hingga 2023 tercatat pembiayaan dari perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang tergabung dalam forum CSR fluktuatif, namun dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan dari Rp 83,77 Milyar di tahun 2021 menjadi Rp 140,46 Milyar di tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan semakin meningkatnya *awareness* dan komitmen serta keterlibatan Non Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.



Gambar 1. 2 Laporan Realisasi CSR 2019-2023 oleh Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD

Hasil kompilasi dari perusahaan/swasta, organisasi sosial masyarakat, filantropi dan perguruan tinggi sebanyak 21 *stakeholders* yang tercatat mendukung terhadap pencapaian target

TPB/SDGs di Jawa Tengah, diperoleh total besaran biaya yang dikeluarkan untuk pencapaian TPB/SDGs tahun 2023 sebesar 157,53 miliar rupiah.

1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Penyusunan RAD TPB 2024-2026 dilakukan melalui serangkaian tahapan dan proses yang cukup panjang. Diawali dengan identifikasi calon indikator TPB Jawa Tengah yang sudah disesuaikan dengan metadata II pada akhir tahun 2023. Output yang dihasilkan adalah tersusunnya indikator TPB Jawa Tengah 2024-2026 di tingkat provinsi. Paralel dengan hal tersebut, juga dilaksanakan *Kick Off* Penyusunan RAD TPB 2024-2026 yang menghadirkan seluruh stakeholder. Selain identifikasi terhadap calon indikator TPB Jawa Tengah, juga didiskusikan mengenai kebijakan strategi serta target pencapaian sasaran TPB Jawa Tengah 2024-2026 termasuk alokasi anggaran yang direncanakan.



Gambar 1. 3 Mekanisme dan Tahapan Penyusunan RAD TPB Jawa Tengah Tahun 2024-2026

1.6 Sistematika RAD TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Jawa Tengah terdiri atas lima bagian dan lampiran, sebagai berikut:

- Bab pertama pendahuluan menjelaskan keselarasan TPB/SDGs dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, serta komitmen komitmen Jawa Tengah dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab ini menjabarkan pula prinsip dan pembiayaan pelaksanaan TPB/SDGs di Jawa Tengah sesuai dengan perannya masing-masing, serta mekanisme tahapan proses penyusunan RAD.
- Bab kedua menjabarkan kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Jawa Tengah untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menyajikan gambaran data dasar (*baseline*) tahun 2023 dan capaian yang menjadi tolok ukur penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian TPB/SDGs hingga tahun 2026.

- Bab ketiga menyajikan target dan arah kebijakan TPB/SDGs yang selaras dengan target dan arah kebijakan pembangunan baik jangka menengah maupun tahunan. Berdasarkan arah kebijakan ini, Pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu juga dijelaskan gambaran rencana aksi program-program Non-Pemerintah yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.
- Bab empat menjelaskan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan TPB/SDGs, baik dari sisi pelaksanaan, waktu, bahan/tool serta alat pemantauan dan evaluasi.
- Bab kelima merupakan penutup yang berisi kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAN. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAN TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan Non-Pemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.
- Dokumen RAD juga dilengkapi lampiran berupa: Matriks 2b berisi program dan kegiatan Pemerintah Daerah, Matriks 3 berisi program/kegiatan Non-Pemerintah untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, Akademisi, serta Pelaku Usaha/Bisnis.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

A. Pengantar

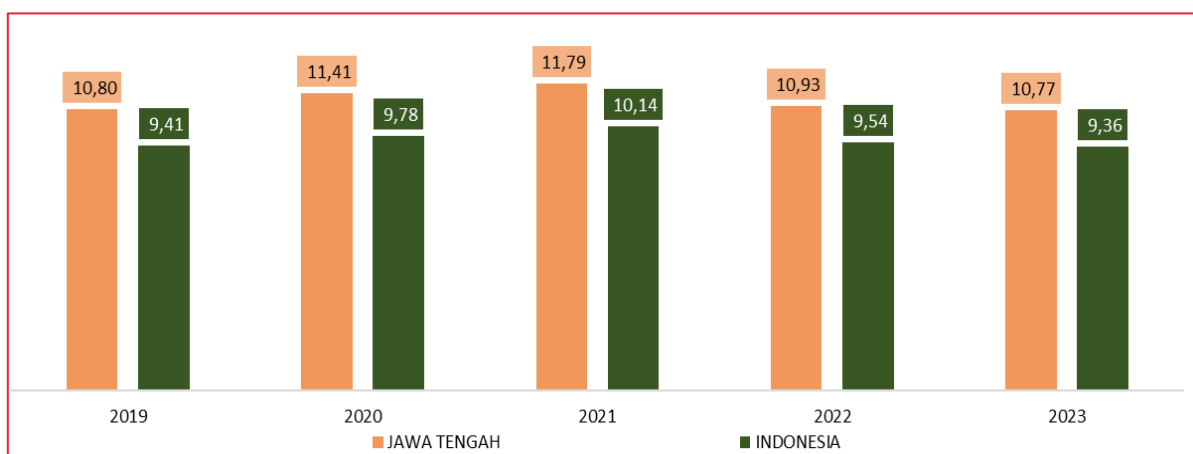
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan 1 adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, dengan target-target pencapaian antara lain mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang berpendapatan terbawah, mengurangi setidaknya setengah proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, mendorong upaya perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, menjamin hak dan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar, membangun ketahanan kelompok miskin dan rentan, menjamin mobilisasi terkait sumber daya dari berbagai sumber, serta membuat kerangka kebijakan yang memihak pada kelompok miskin dan rentan.

Tujuan 1 ini terdiri dari 7 target dan 15 indikator secara global. Dalam periode lima tahun terakhir (2019-2023) telah dilaporkan kemajuan dalam pencapaian sasaran dari beberapa indikator TPB/SDGs tujuan 1, meskipun pengentasan kemiskinan masih terus menjadi isu yang perlu perhatian dan upaya keras.

B. Status Capaian

1) Angka Kemiskinan

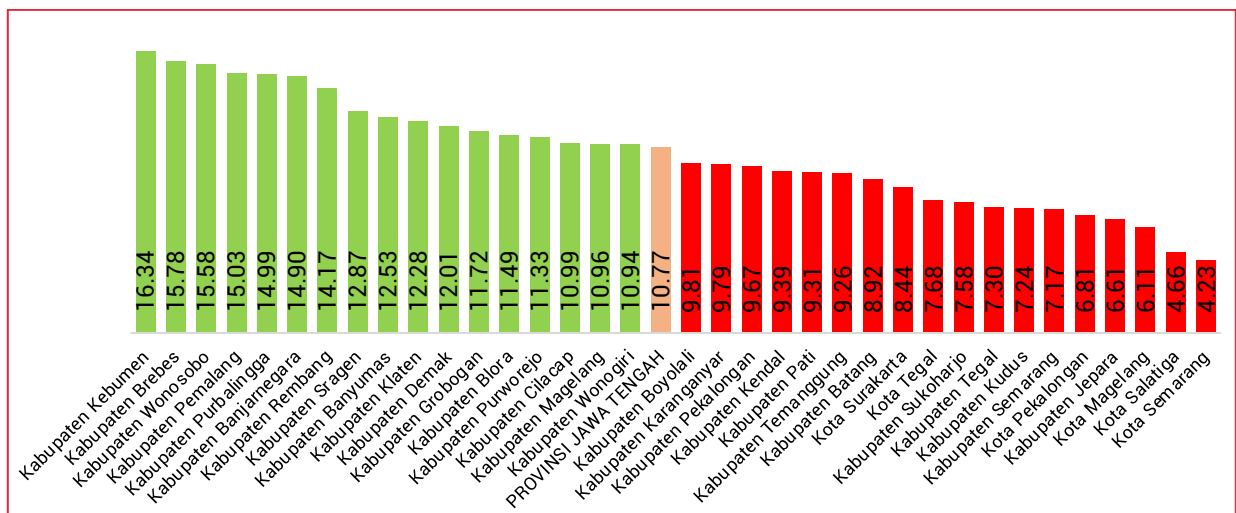
Kinerja penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir cukup baik, meski masih berada di atas angka kemiskinan Nasional. Sempat mengalami peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 hingga 2021 baik provinsi dan nasional, namun kembali menurun perlahan dalam 2 tahun terakhir (Gambar 2.1).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 1 Tingkat Kemiskinan Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Persen)

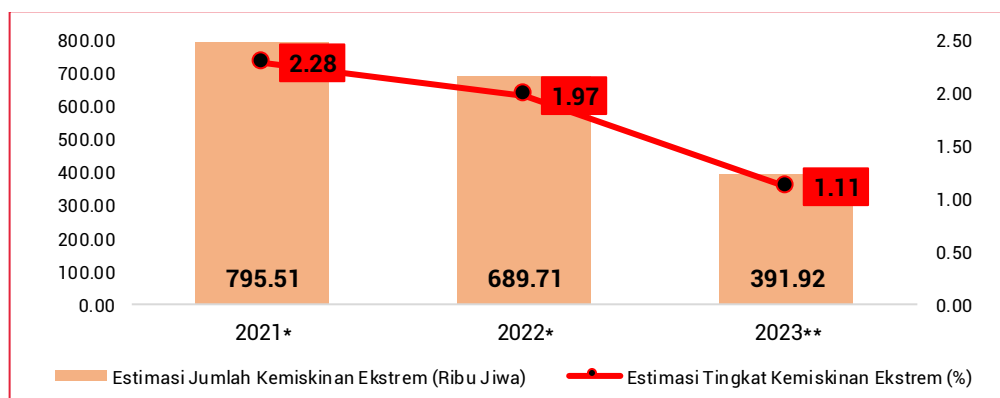
Berdasarkan capaian tingkat kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2023, masih terdapat 17 Kabupaten yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dari angka provinsi. Sebanyak 14 Kabupaten/Kota pada tahun yang sama, mampu menurunkan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari angka provinsi (0,16 persen). Penurunan angka kemiskinan cukup tinggi terdapat di Kota Magelang sebesar 0,99 persen, disusul dengan Kabupaten Tegal sebesar 0,60 persen, Kabupaten Wonosobo sebesar 0,59 persen, Kabupaten Rembang sebesar 0,48 persen, dan Kota Surakarta sebesar 0,40 persen (Gambar 2.2).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 2 Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 (Persen)

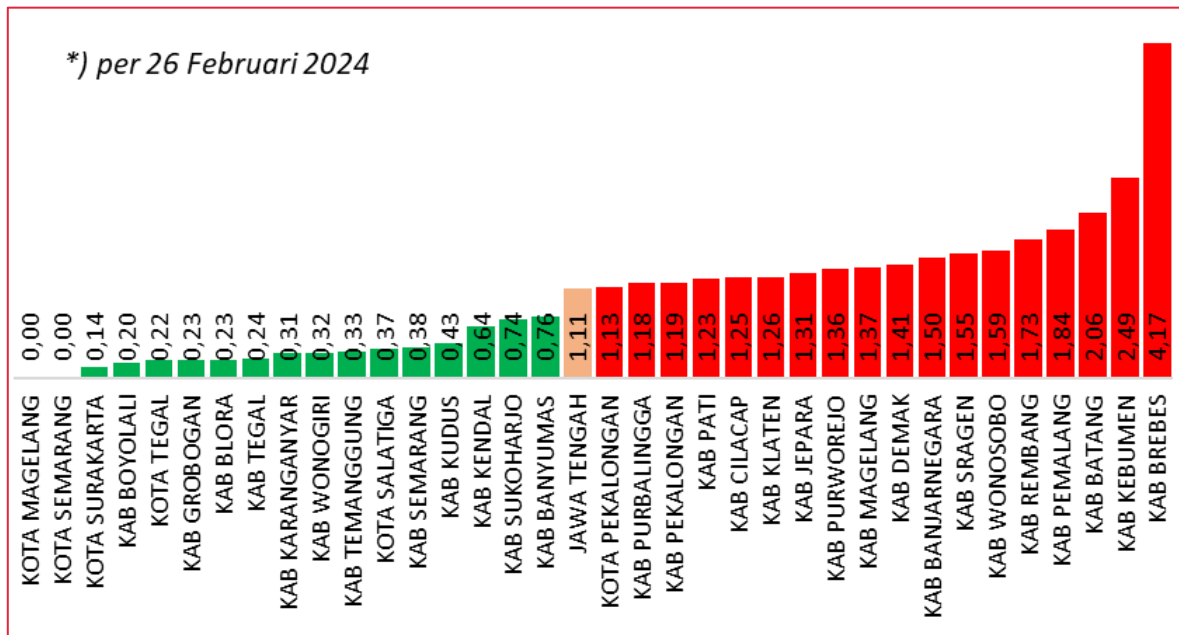
Penduduk miskin dikategorikan berdasarkan desil kemiskinan atau pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga yang dibagi dalam 10 kelompok per-sepuluhan (Desil 1-10). Penduduk miskin ekstrim merupakan bagian dari penduduk miskin, namun kemampuan pengeluaran harian mereka lebih rendah dari masyarakat miskin. Estimasi tingkat kemiskinan ekstrim Jawa Tengah (Desil 1) oleh Kemenko PMK RI selama tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 2023, estimasi tingkat kemiskinan ekstrim Jawa Tengah mampu turun 0,86 poin dibandingkan tahun 2022.



Sumber: Kemenko PMK, 2024

Gambar 2. 3 Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah Tahun 2021-2023

Mendasarkan capaian tingkat kemiskinan ekstrim pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat 1 Kota dan 17 Kabupaten yang memiliki capaian di atas angka provinsi. Dari 18 wilayah tersebut, lima di antaranya memiliki kesenjangan yang cukup tinggi terhadap capaian provinsi, antara lain Kabupaten Rembang (0,62 poin), Kabupaten Pemalang (0,73 poin), Kabupaten Batang (0,95 poin), Kabupaten Kebumen (1,38 poin) dan Kabupaten Tegal (3,06 poin). Sementara itu, kemiskinan ekstrim di Kota Magelang dan Kota Semarang pada tahun terakhir mampu mencapai 0 persen dari 0,13 persen dan 0,16 persen pada tahun sebelumnya (Tahun 2022).



Sumber: Kemenko PMK, 2024

Gambar 2. 4 Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrim Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 (Persen)

2) Sistem dan Upaya Perlindungan Sosial

Sistem perlindungan sosial saat ini terdiri atas program jaminan sosial dan program bantuan sosial yang dilaksanakan secara sinergi dan terpadu. Program jaminan sosial mencakup program jaminan kesehatan, hari tua, pensiun, kematian dan perawatan jangka panjang, sedangkan program bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai bersyarat, misalnya program PKH dan bantuan non – tunai, misalnya program bantuan sembako.

Salah satu program bantuan sosial yang dilaksanakan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKHJ) merupakan sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dalam rangka mengubah perilaku miskin. Program ini berupa pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan kesenjangan antar generasi. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Jumlah penerima bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, sebanyak 1.593.651 KPM mendapatkan bantuan PKH, meningkat 20.420 KPM dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.573.231 KPM. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan, yang artinya intervensi pemerintah belum mampu terlaksana secara optimal dalam mendorong masyarakat miskin untuk berdaya dan mandiri memutus kemiskinan.

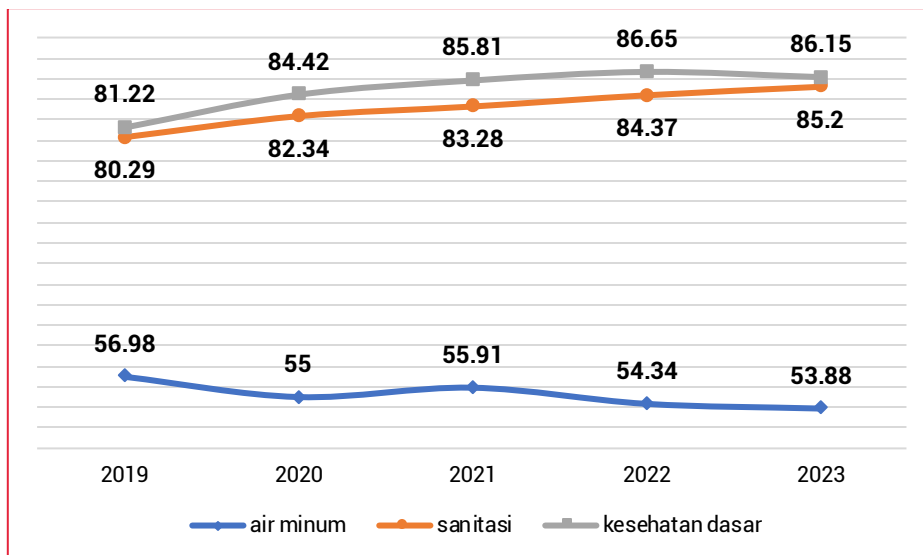
Selain program bantuan tunai, terdapat pula program jaminan kesehatan terutama untuk masyarakat miskin dan rentan. Secara proporsi, peserta jaminan kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) pada tahun 2022 sebesar 90,22% atau 14,83 juta penduduk miskin sudah mendapat akses kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada. Sedangkan dari sisi kesejahteraan tenaga kerja, sebesar 33,66% tenaga kerja telah memiliki jaminan ketenagakerjaan.

3) Akses terhadap Pelayanan Dasar

Indikator pelayanan dasar merujuk pada system penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti air minum, sanitasi dan penyehatan. Akses pada layanan air minum tercermin melalui indikator proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum menunjukkan tren yang cenderung menurun. Capaian terakhir tahun 2023 menunjukkan angka 53,88% rumah tangga dengan akses layanan air minum layak. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 54,34%.

Berbeda dengan capaian pada akses layanan air minum, proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2023, proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi mencapai 85,2%. Artinya bahwa semakin banyak rumah tangga terutama rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) berupa jamban dengan pembuangan limbah tangga septik.

Secara tren, proporsi rumah tangga dengan akses pada pelayanan dasar dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 5 Proporsi Penduduk dengan akses pada pelayanan dasar di Jawa Tengah Th. 2019-2023 (Persen)

C. Tantangan

Salah satu tantangan dalam mengurangi segala bentuk kemiskinan adalah akurasi database kemiskinan. Verifikasi-validasi (verval) data kemiskinan terus dilakukan Jawa Tengah pada awal tahap perencanaan guna mengupayakan intervensi penanganan yang tepat. Selain itu, beragamnya sumber data kemiskinan juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Saat ini, selain data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial, database untuk intervensi kemiskinan juga dapat diperoleh dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Namun, DTKS memiliki keterbatasan pada tidak tersedianya tingkat kesejahteraan (desil), sehingga berimplikasi pada sulitnya pemerintah untuk melakukan intervensi secara tepat sasaran. Tantangan lain yang dihadapi Jawa Tengah adalah mendorong penguatan kerjasama lintas sektor guna sinergitas dan harmonisasi program kegiatan, termasuk pengembangan kerjasama multipihak yang tidak hanya melibatkan peran pemerintah namun juga *non-state actor* (NSA).

Pemerintah pusat juga mulai mengarahkan daerah untuk penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang dikoordinasi oleh Bappenas/Kementerian PPN. Melalui data tersebut diharapkan dapat memberikan perbaikan pada basis data sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

A. Pengantar

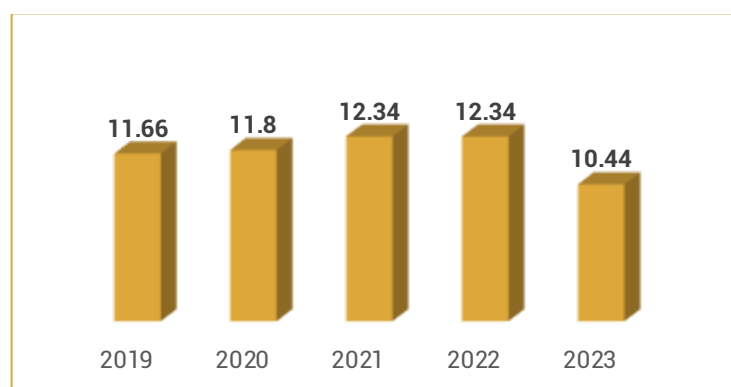
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan 2 ini terdiri dari 8 target dan 17 indikator secara global. Dalam periode lima tahun terakhir (2019-2023) telah dilaporkan kemajuan dalam pencapaian sasaran dari beberapa indikator TPB/SDGs tujuan 2, namun terdapat pula indikator yang pencapaian sasarnya masih perlu perhatian dan upaya keras.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

1) Akses dan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan capaian memburuk terjadi ketika masa pandemi Covid-19. Tahun 2020 hingga 2022, tren negatif ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka prevalensi dari 11,8% menjadi 12,34%. Namun, seiring dengan kondisi penanganan pandemi Covid-19 yang semakin membaik, PoU pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan ketahanan pangan yang cukup signifikan dengan capaian sebesar 10,44%.



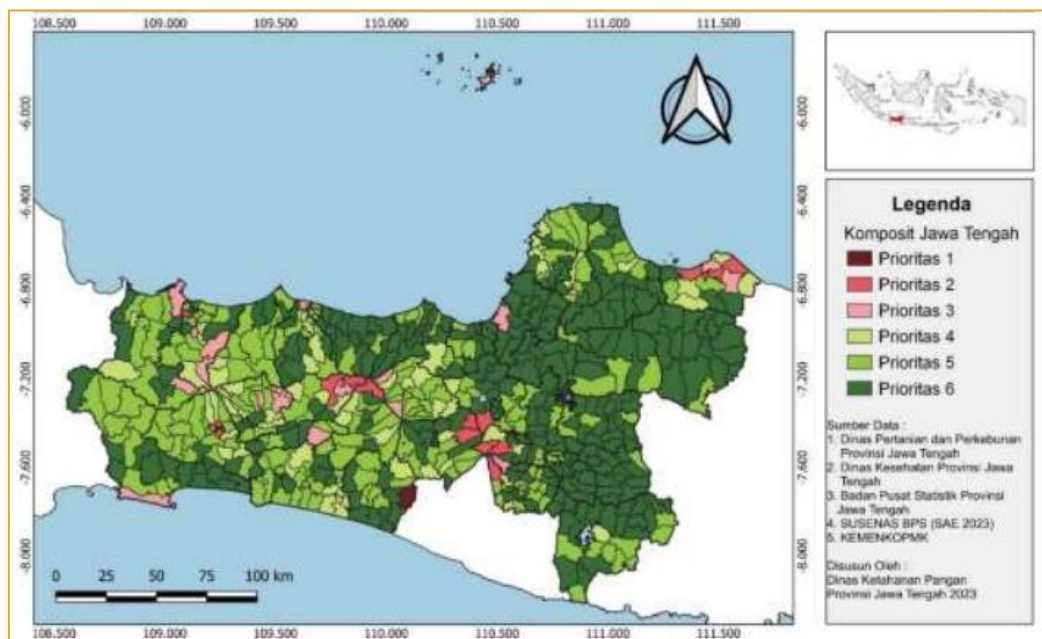
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. 6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat merupakan indikator yang memberikan perkiraan mengenai proporsi penduduk yang menghadapi kesulitan sedang atau berat dalam mengakses pangan. Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)

menghasilkan ukuran tingkat keparahan kerawanan pangan yang dialami individu atau rumah tangga, berdasarkan wawancara langsung.

Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Jawa Tengah menunjukkan tren yang cenderung memburuk sejak pandemi Covid-19. Capaian prevalensi FIES pada tahun 2023 lebih tinggi (memburuk) dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 3,09%. Artinya bahwa upaya pemerintah belum optimal dalam mengatasi dampak sosial akibat pandemi Covid-19 yaitu kesulitan dalam mengakses pangan, terutama pada penduduk berpendapatan rendah dan yang kehilangan pekerjaan.



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 7 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisa ketahanan dan kerentanan pangan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) diketahui bahwa untuk daerah rentan rawan pangan yaitu prioritas 1-3 sebanyak 37 kecamatan (6,42 %), sedangkan untuk daerah tahan rawan pangan yaitu prioritas 4-6 sebanyak 539 kecamatan (93,58 %). Terjadi penurunan daerah rentan rawan pangan (prioritas 1-3) sebanyak 41 kecamatan (52,56 %) jika dibandingkan dengan hasil analisa FSVA tahun 2022 yaitu sebanyak 78 kecamatan. Penurunan terbesar terjadi di prioritas 1 (sangat rentan pangan) yaitu sebanyak 26 kecamatan. Berdasarkan analisa indikator FSVA di daerah rentan rawan pangan, penurunan daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 disebabkan oleh:

- Peningkatan ketersediaan pangan
- Penurunan angka kesakitan
- Penurunan prevalensi stunting

Capaian konsumsi pangan dapat dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas diukur dari jumlah pangan yang dikonsumsi, sedangkan kualitas dilihat dari keragaman kelompok pangan yang dikonsumsi yang diukur dengan skor PPH. Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dari tahun 2018-2023 sudah hampir mendekati angka standar dan secara agregat skor PPH sudah mencapai 94,2 di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2021, skor PPH sebesar 86,70, lebih rendah dibandingkan capaian sebelumnya, karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; program pemerintah terkait diversifikasi beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Sesuai dengan arahan Badan Pangan Nasional RI, penghitungan skor PPH menggunakan data Susenas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Di samping itu, tahun 2018-2022 standar konsumsi yang digunakan adalah sebesar 2.100 kkal/kapita/hari (sesuai dengan WNPG XI, tahun 2018). Capaian Konsumsi tiap kelompok pangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.1. Sedangkan capaian skor PPH secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II. 1 Capaian Konsumsi tiap Kelompok Pangan di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal Kkal/kap/hr	Tahun				
			2018 Kkal/kap/hr	2019 Kkal/kap/hr	2020 Kkal/kap/hr	2021 Kkal/kap/hr	2022 Kkal/kap/hr
1	Padi-padian	1,050.00	1,235.31	1,303.1	1,221.3	1,212.9	1,116.0
2	Umbi-umbian	126	61,26	47.1	37.3	40.0	45.7
3	Pangan Hewani	252	183.77	214.7	219.6	225.6	240.0
4	Minyak dan lemak	210	215.33	226.8	227.1	238.2	240.1
5	Buah/ biji berminyak	63	30.22	20.1	19.1	17.6	17.0
6	Kacang-kacangan	105	125.58	68.7	65.7	67.7	84.0
7	Gula	105	102.02	91.8	90.4	90.0	84.2
8	Sayur & buah	126	110.53	127.0	116.7	111.6	140.4
9	lain-lain	63	26.15	51.7	50.8	50.9	50.1
	JUMLAH	2,150.00	2,090.17	2,151.1	2,047.8	2,054.4	2,017.6
	Skor PPH	100	87.3	89.6	87.1	86.7	94.4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dilihat dari konsumsi kelompok pangan, beras menjadi konsumsi pangan tertinggi di Jawa Tengah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam WNPG XI Tahun 2018, sementara konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta buah/biji berminyak justru jauh dari standar konsumsi ideal, sehingga perlu upaya peningkatan konsumsi untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani serta buah/biji berminyak.

Tabel II. 2 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi-padian	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	2.5	1.4	1.1	0.9	0.9	1.1
3	Pangan Hewani	24.0	17.1	20.0	20.4	21.0	22.9
4	Minyak dan lemak	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

No	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Buah/ biji berminyak	1.0	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4
6	Kacang-kacangan	10.0	10.0	6.4	6.1	6.3	8.0
7	Gula	2.5	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
8	Sayur & buah	30.0	25.7	29.5	27.1	26.0	30.0
9	lain-lain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Skor PPH Jateng	100	91.8	86.41	89.6	87.1	94.4
	Skor PPB Nasional	100	85.2	90.4	90.8	87.9	92.9

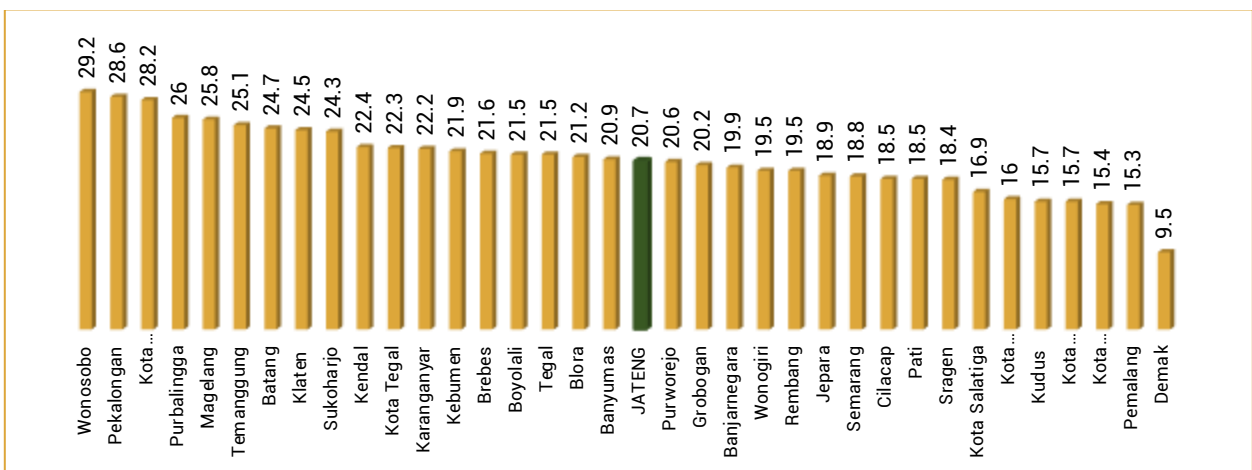
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tingginya konsumsi beras disebabkan oleh tingginya tingkat ketersediaan, kemudahan akses masyarakat terhadap komoditas tersebut yang didukung dengan harga beras yang stabil dan terjangkau. Adapun penurunan konsumsi umbi-umbian karena ketersediaan pangan olahan berbasis umbi-umbian masih terbatas. Selain itu harga produk setengah jadi dalam bentuk umbi-umbian masih lebih mahal dibandingkan harga beras dan harga tepung terigu.

2) Kebutuhan Gizi

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (*stunting*).

Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah lima tahun/balita di Jawa Tengah menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tren menurun dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan data hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi Stunting pada anak balita pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,1 persen dari angka 20,8% menjadi 20,7%. Angka stunting di Jawa Tengah tersebut berada dibawah angka nasional (21,5%). Berdasarkan standar WHO, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut, karena prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen.

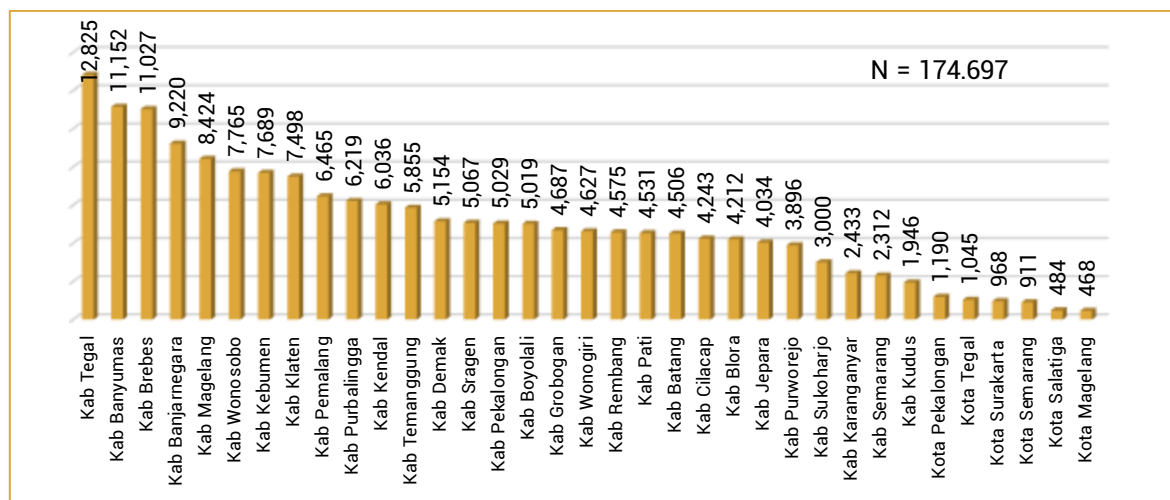


Sumber: Survei Kesehatan Indonesia, 2023

Gambar 2. 8 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2023

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 18 Kabupaten/Kota dengan prevalensi stunting pada balita lebih tinggi dari Jawa Tengah (lebih dari 20,7 persen). Sedangkan 17 Kabupaten/Kota lainnya berada dibawah capaian Jawa Tengah, dengan Kota Demak sebagai kota yang paling rendah prevalensi Stuntingnya.

Sementara itu, jika merujuk pada data e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) per tanggal 15 Januari 2023, angka stunting di Jawa Tengah berada pada rata-rata 9,98% dari hasil penimbangan pada bulan Desember 2023 dengan cakupan terhadap sebanyak 1.749.709 balita yang diukur. Dengan angka prevalensi sebagaimana data SSGI tahun 2022 sebesar 20,8% yang masih berada pada ambang batas <20% atau seperlima dari total balita sesuai dengan standar WHO, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut. Sehingga upaya penurunan stunting di Jawa Tengah masih perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.

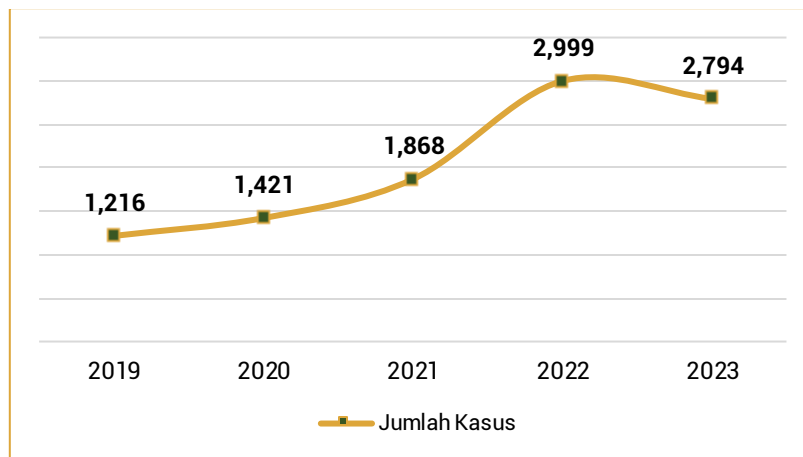


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 9 Rekap Status Gizi Balita usia 0 - 59 Bulan Di Jawa Tengah Berdasarkan e-PPGBM Bulan Desember 2023

Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (*underweight* dan *wasted*). Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun di Jawa Tengah memiliki tren capaian yang fluktuatif. Hal ini berbanding terbalik dengan prevalensi Stunting yang justru menunjukkan adanya penurunan setiap tahunnya.

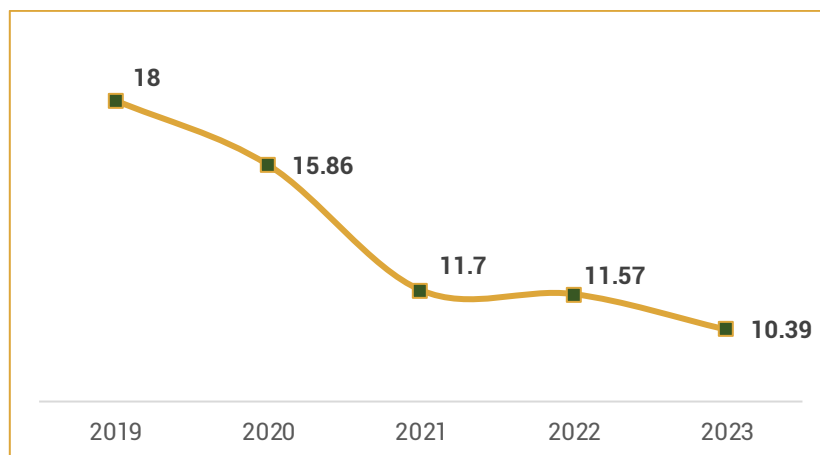
Adapun pada tahun 2022, capaian prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun meningkat dari 6,7 persen menjadi 7,9 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 7,1 persen. Secara absolut, jumlah kasus balita gizi buruk mengalami penurunan sebanyak 205 kasus dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 10 Tren Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk (BB/TB) Jawa Tengah Tahun 2019- 2023

Anemia pada ibu hamil masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas. Ibu hamil termasuk kelompok yang sangat rentan mengalami anemia, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya kebutuhan tubuh ibu akan zat besi, seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Menurut WHO, ibu hamil dikatakan mengalami anemia apabila kadar hemoglobin di dalam darah kurang dari 11 gr/dL (di bawah standar).



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 11 Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil di Jawa Tengah Tahun 2019- 2023 (Persen)

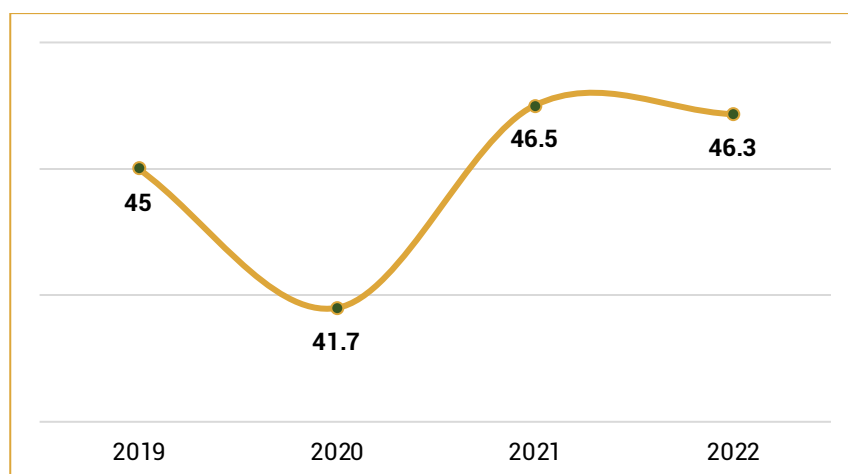
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyebutkan, prosentase ibu hamil yang mengalami anemia adalah 48.9%, ini berarti sekitar 5 dari 10 ibu hamil di Indonesia menderita anemia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, prevalensi anemia pada ibu hamil pada kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2023, prevalensi anemia pada ibu hamil di Jawa Tengah berada pada angka 10,39%. Meskipun capaian setiap tahunnya menurun, namun masih terdapat sekitar 10,39 persen ibu hamil yang mengalami anemia yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditangani. Anemia pada ibu hamil yang tidak tertangani akan berdampak terhadap tidak optimalnya

pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan yang meningkatkan risiko kelahiran prematur serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah bahkan menyebabkan kematian ibu.

Program pemerintah dalam menangani anemia pada ibu hamil salah satunya yaitu dengan pemberian tablet tambahan darah. Pemberian tablet tambah darah sebagai salah satu upaya penting dalam pencegahan dan penanggulangan anemia yang merupakan cara yang efektif karena dapat mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan zat besi dan atau asam folat. Tablet tambah darah diberikan kepada wanita usia subur dan ibu hamil. Untuk ibu hamil, tablet tambah darah diberikan setiap hari selama masa kehamilannya.

3) Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian, Pendapatan Petani Skala Kecil dan Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja (NTP/TKP) memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 12 Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja Jawa Tengah Tahun 2019- 2022 (Rp. Juta per Tenaga Kerja)

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja (NTP/TKP) selama kurun waktu tahun 2018-2022 di Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, NTP/TKP sebesar Rp. 43,5 juta per tenaga kerja, kemudian meningkat menjadi Rp. 45 juta per tenaga kerja pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan NTP/TKP tahun 2020, yaitu turun sekitar 7,13% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 41,8 juta per tenaga kerja. Perbaikan perekonomian Jawa Tengah pasca pandemi Covid-19 memberikan pengaruh positif terhadap capaian nilai tambah pertanian per tenaga kerja pada tahun 2021 yang meningkat menjadi 46,5 juta per tenaga kerja. Namun, pada tahun 2022 capaian cenderung menurun tidak signifikan menjadi 46,3 juta per tenaga kerja.

Sementara itu apabila dilihat dari luasan kawasan pertanian, berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, disebutkan bahwa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas ± 990.652 hektar, dan kawasan pertanian lahan kering seluas ± 995.587 hektar, yang diarahkan dikembangkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.025.255 hektar. Sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan sawah beririgasi teknis, semi teknis, sederhana dan perdesaan; lahan reklamasi, rawa pasang surut dan nonpasang surut; serta lahan tadah hujan.

C. Tantangan

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang sangat potensial dan merupakan salah satu lumbung pangan terbesar di Pulau Jawa. Selain sebagai provinsi sentra produksi padi, Jawa Tengah juga merupakan sentra produksi komoditas jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar. Meskipun memiliki komoditas pangan dengan produksi tinggi, Jawa Tengah masih dihadapkan dengan permasalahan ketidakcukupan konsumsi pangan oleh masyarakat. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan mengalami peningkatan yang artinya kemampuan masyarakat untuk memenuhi konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi sesuai standar.

Belum optimalnya produksi pertanian juga dapat berpengaruh terhadap sektor pangan. Tantangan pada sektor pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, secara umum komoditas pangan utama, yaitu beras, jagung, dan kedelai, telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masih diperlukan upaya stabilisasi stok antar waktu dan antar wilayah. Adapun pada aspek keterjangkauan, berdasarkan peta kerawanan dan kerentanan pangan, masih terdapat daerah di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rawan pangan. Pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antarkelompok pangan, terutama konsumsi pangan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.

2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

A. Pengantar

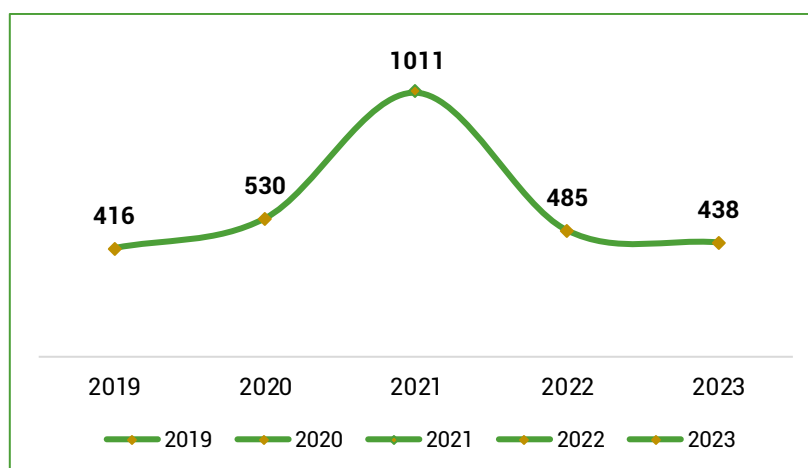
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan 3 berkaitan dengan penjaminan kesehatan yang berdampak kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Tujuan 3 ini terdiri dari 13 target dan memiliki 39 indikator secara global. Dalam periode lima tahun terakhir (2019-2023) telah dilaporkan kemajuan dalam pencapaian sasaran dari beberapa indikator TPB/SDGs tujuan 3, namun terdapat pula indikator yang pencapaian sasarnya masih perlu perhatian dan upaya keras.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

1) Angka Kematian dan Kesakitan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah pada tahun 2023 berada di angka 76,15 per 100.000 KH, cenderung semakin menurun pasca terjadinya peningkatan sangat signifikan akibat pandemi Covid-19 di tahun 2021. Adapun secara absolut, jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 438 kasus dari jumlah Kelahiran Hidup (KH) sebanyak 575.169 kelahiran pada tahun 2023.



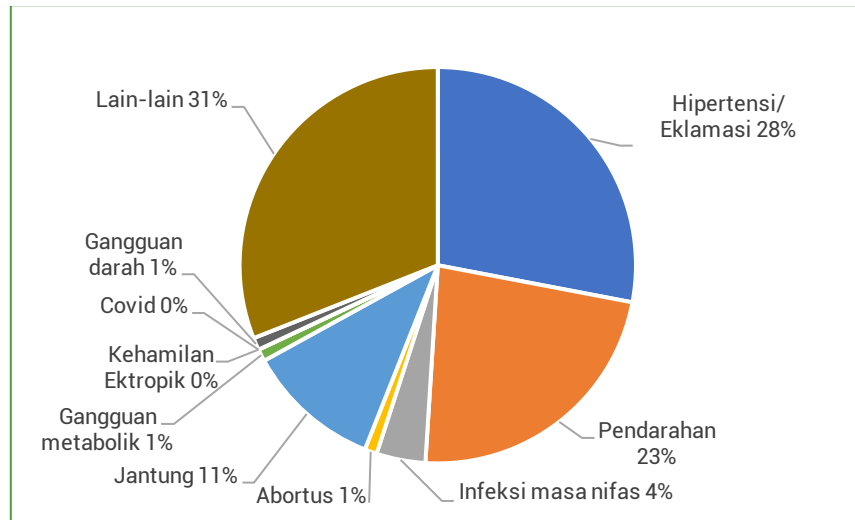
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
AKI (per 100.000 KH)	76,93	98,60	199	84,60	76,15

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 13 Angka Kematian Ibu (AKI) Jawa Tengah Tahun 2019-2023

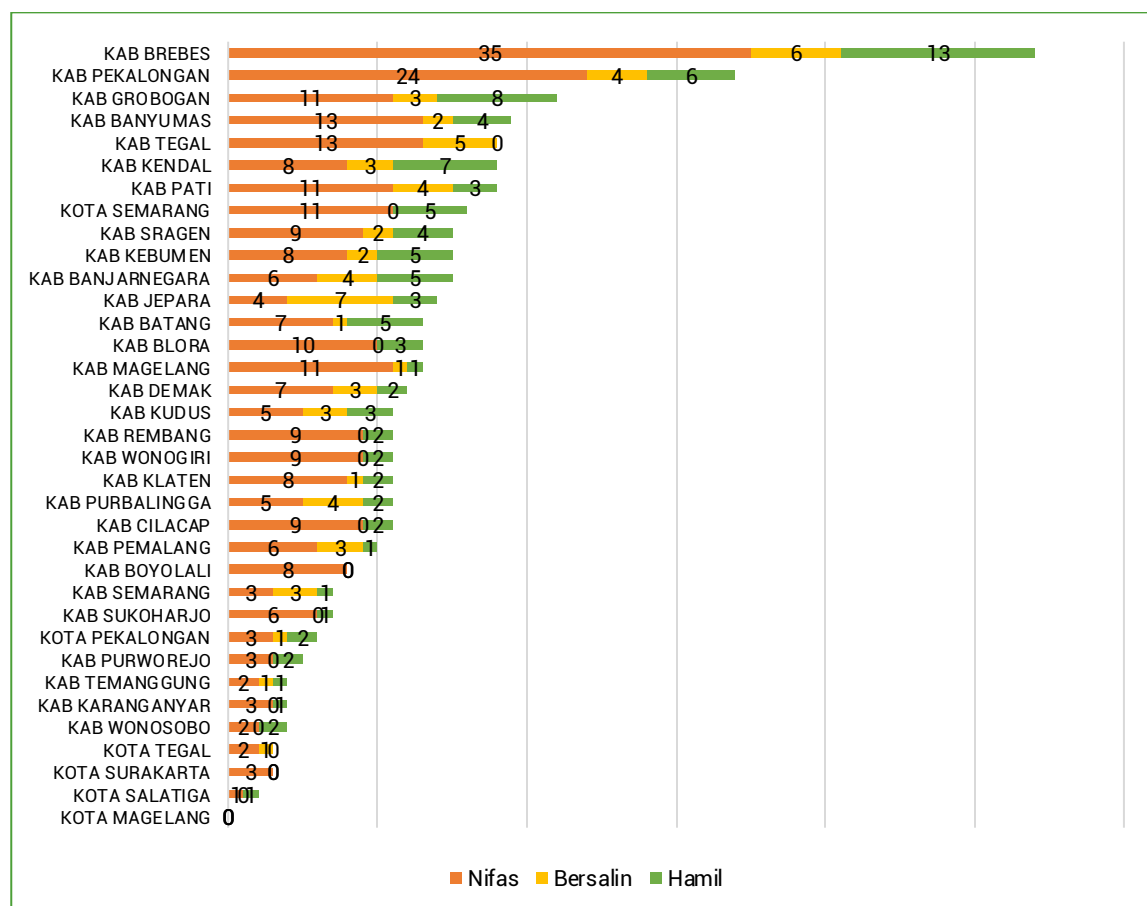
Adapun faktor penyebab kematian ibu terbesar disebabkan oleh gangguan hipertensi, perdarahan dan gangguan lainnya. Dari 35 kabupaten/kota, Kabupaten Brebes memiliki jumlah kasus kematian ibu tertinggi, disusul Kabupaten Kebumen, Banyumas dan Grobogan. Dari 6 kota

di Jawa Tengah, 5 kota memiliki jumlah kasus kematian ibu yang rendah, namun khusus Kota Semarang berada pada peringkat 10 tertinggi jumlah kasus kematian ibu. Persoalan ini perlu dikaji lebih lanjut, mengingat sebagai sebuah ibukota Provinsi Jawa Tengah, maka akses dan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan cukup memadai, namun nyatanya jumlah kasus kematian ibu masih cukup tinggi.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 14 Faktor Penyebab Kematian Ibu di Jawa Tengah Tahun 2023

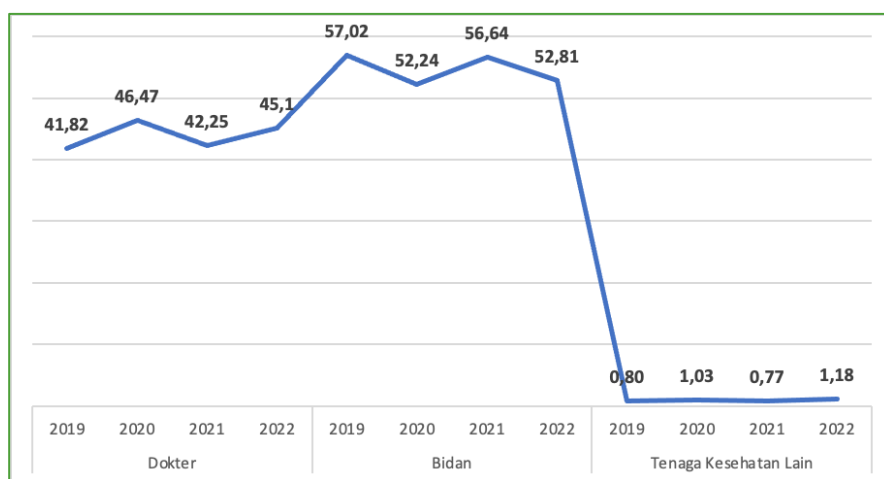


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 15 Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

Upaya percepatan penurunan AKI perlu untuk terus dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan Kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Pada tahun 2023, cakupan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa Tengah sebesar 99,6 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 99,5 persen (2022). Di sisi lain, data BPS memperlihatkan kecenderungan masyarakat Jawa Tengah dalam melakukan persalinan memilih ditolong Bidan pada kisaran 50%. Namun demikian, di tahun 2022 tren mengalami pergeseran, masyarakat yang memilih untuk melahirkan dengan ditolong Dokter mengalami peningkatan dibandingkan dengan yang ditolong bidan.

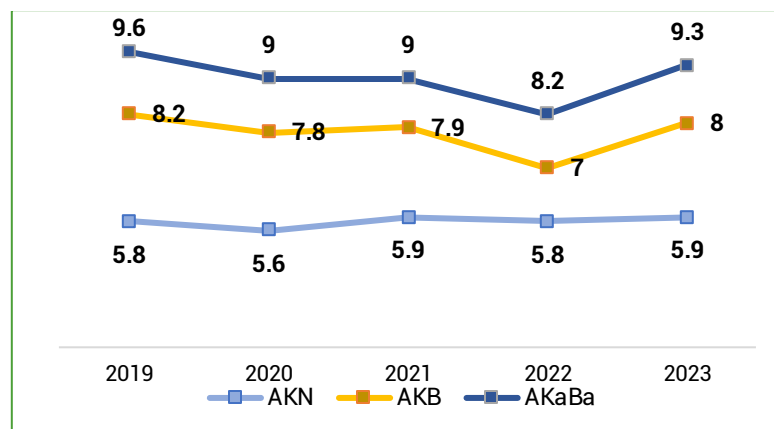


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. 16 Distribusi Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Penolong Persalinan Jawa Tengah Th. 2019-2022 (Persen)

Selain kasus kematian ibu, Jawa Tengah juga masih dihadapkan pada permasalahan tingginya angka kematian pada anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKaBa).

Secara absolut, jumlah kasus kematian bayi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebanyak 4.612 kematian bayi, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2022) yang sebanyak 4.024 kematian bayi. Kasus kematian bayi tahun 2023 tersebut menjadi kasus kematian dengan jumlah tertinggi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tren angka kematian neonatal, bayi dan balita dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut.



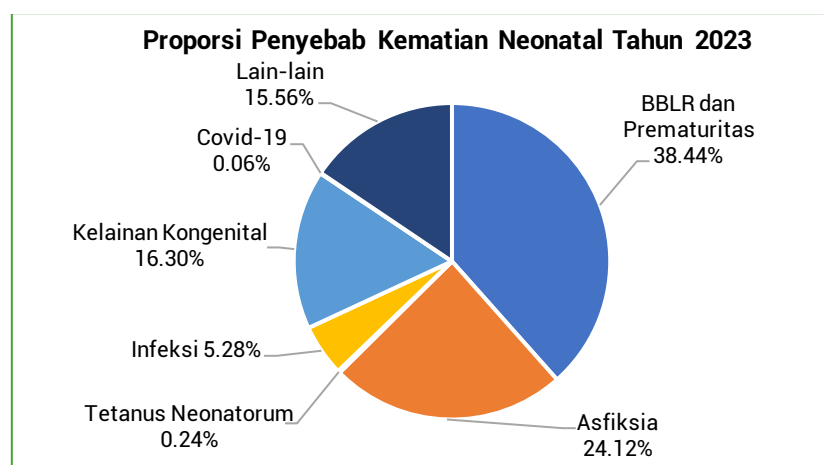
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kematian bayi	4.450	4.189	3.997	4.024	4.612
Jumlah kematian balita	5.208	4.834	4.545	4.699	5.339
Jumlah KH	540.786	537.513	508.062	573.304	575.169

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 17 Tren AKN, AKB, AKaBa Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Begitu pula dengan jumlah kematian balita pada tahun 2023 yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 4.699 kematian menjadi 5.339 kematian balita. Dari seluruh kematian balita, 63,44 persen diantaranya terjadi pada masa neonatal (3.387 kematian). Sementara itu, kematian pada masa post neonatal (usia 29 hari-11 bulan) sebesar 22,94 persen (1.225 kematian) dan kematian anak balita (usia 12- 59 bulan) sebesar 13,62 persen (727 kematian).

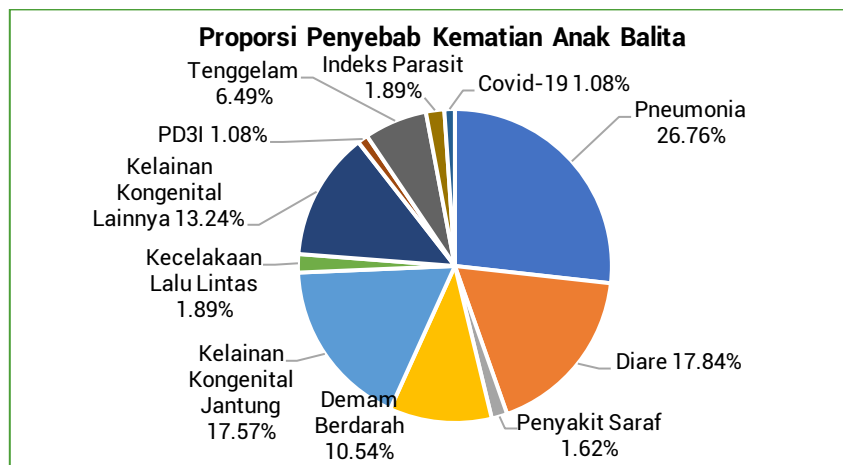
Penyebab kematian neonatal terbanyak di Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah kondisi BBLR dan Prematuritas sebesar 38,44 persen dan asfiksia sebesar 24,12 persen. Penyebab kematian lain di antaranya kelainan kongenital, infeksi, Tetanus Neonatorum, COVID-19, dan lain-lain (dapat dilihat pada Gambar 2.18).



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 18 Proporsi Penyebab Kematian Neonatal di Jawa Tengah Tahun 2023

Sementara itu, penyebab utama kematian terbanyak pada kelompok anak balita (12-59 bulan) adalah Pneumonia sebesar 26,76 persen dan Diare sebesar 17,84 persen. Penyebab kematian lainnya, yaitu kelainan kongenital jantung, Demam Berdarah, tenggelam, kecelakaan, kelainan kongenital lainnya, COVID-19, penyakit saraf, dan penyebab lainnya.



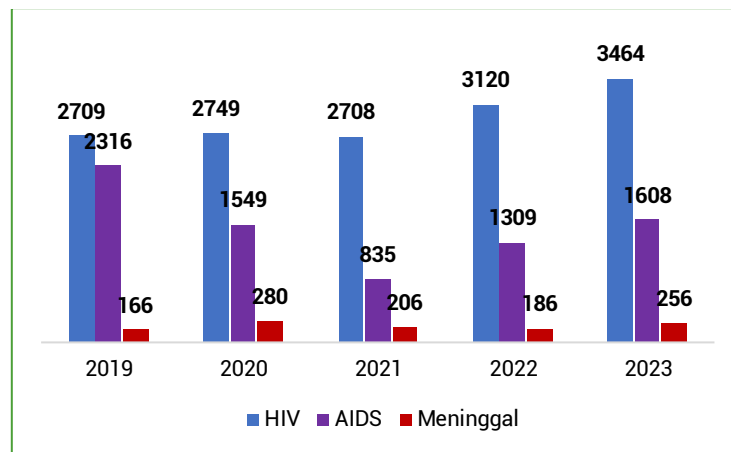
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 19 Proporsi Penyebab Kematian Anak di Jawa Tengah Tahun 2023

2) Kasus Epidemi dan Penyakit Menular

HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) yaitu sekumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV.

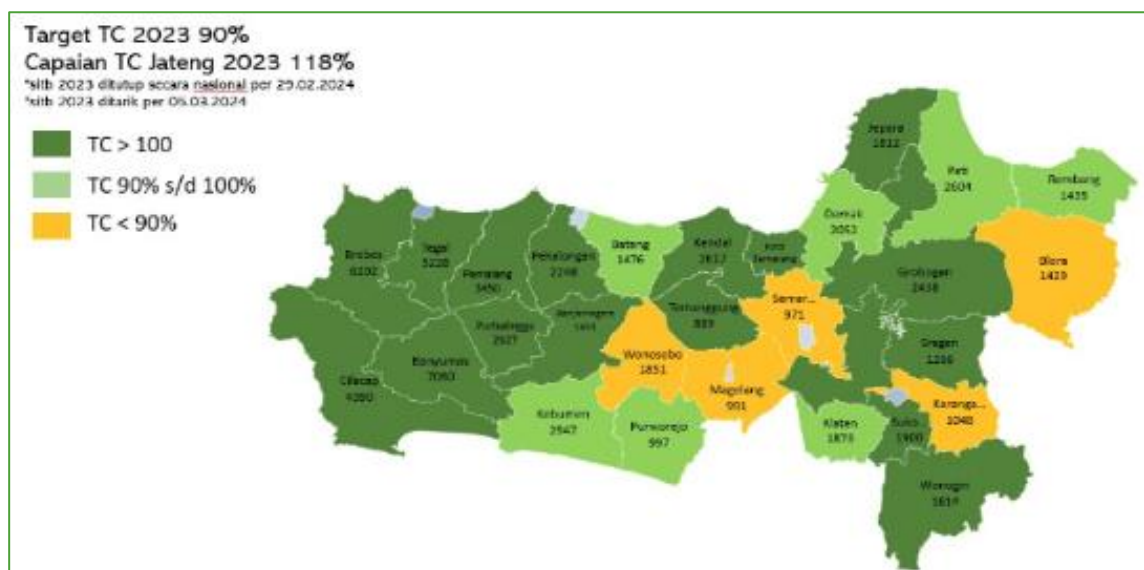
Jumlah kasus HIV, AIDS dan Meninggal sejak 2021 kecenderungan mengalami peningkatan. Estimasi jumlah orang dengan HIV AIDS di Jawa Tengah Tahun 2023 sebanyak 52.677 orang, sedangkan kumulatif penemuan kasus dari 1993 hingga 2023 sebanyak 49.780 kasus (94,5%). Penemuan kasus HIV pada laki-laki ditengarai lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan komposisi 62,8% laki-laki dan 37,2% perempuan. Adapun secara kelompok umur, kasus HIV positif lebih banyak ditemui pada penduduk kelompok usia 25-49 tahun dan masih ditemukan penularan HIV dari ibu ke anak yang di tunjukkan dengan adanya penemuan kasus HIV positif pada kelompok usia di bawah 4 tahun.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 20 Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Meninggal di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

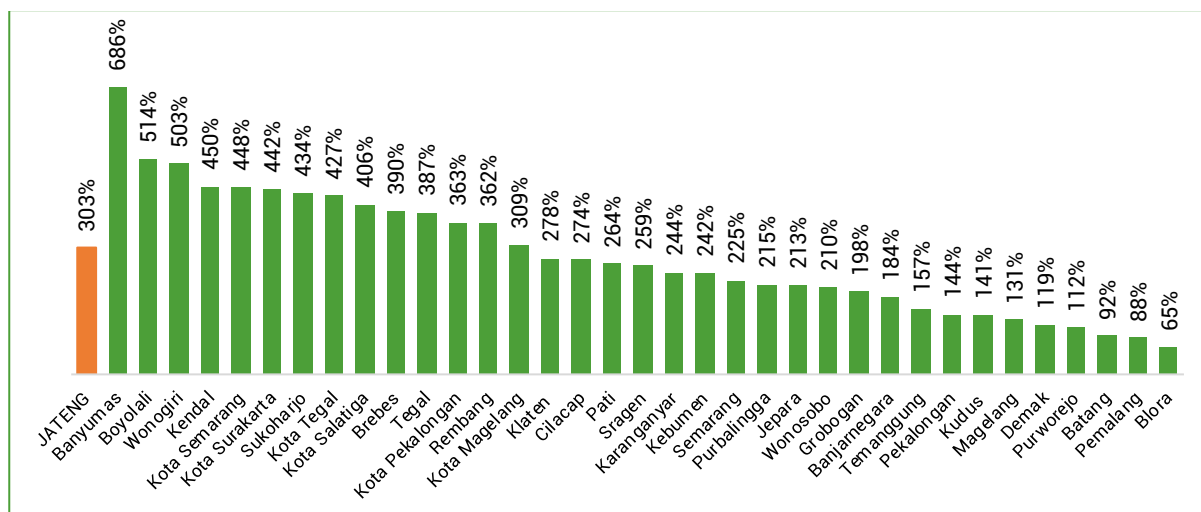
Tuberkulosis hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan baik di tingkat nasional maupun global. Hampir seperempat penduduk dunia terinfeksi oleh kuman TBC, diderita oleh 89% dewasa dan 11% anak-anak. TBC menjadi penyebab kematian tertinggi setelah HIV-AIDS. *Treatment Coverage* (TC) menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program Pengendalian Tuberkulosis. Tahun 2023 Angka Cakupan Penemuan Tuberkulosis Jawa Tengah mampu melebihi target nasional yaitu 118% dari target nasional 90%.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 21 Peta Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Jawa Tengah Th. 2023

Anak-anak usia 0-14 Tahun termasuk kelompok rentan yang tertular TBC. Indikator cakupan penemuan kasus TBC menggambarkan berapa banyak kasus TB anak yang berhasil dijangkau oleh program di antara perkiraan kasus TB yang ada. Cakupan penemuan kasus TBC anak tahun 2023 di Jawa Tengah berada pada angka 303%, dengan kasus TBC anak ditemukan 18.594, estimasi kasus TBC anak sebesar 6.130 kasus.

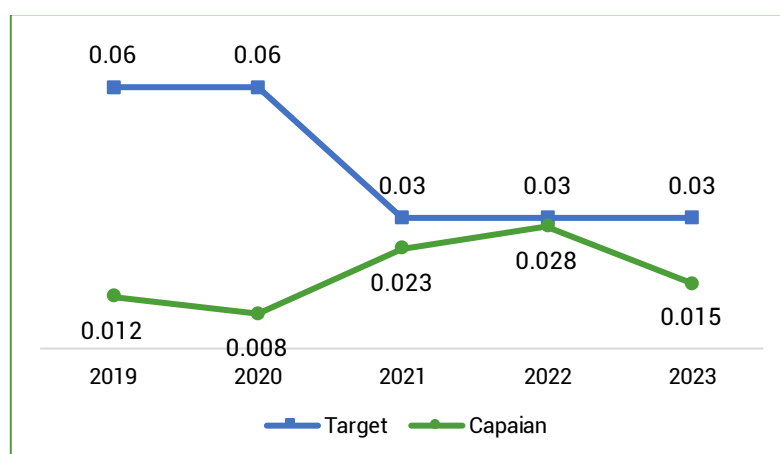


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 22 Cakupan Penemuan Kasus TBC Anak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Th. 2023

Malaria merupakan salah satu penyakit menular selain HIV-AIDS dan Tuberkulosis yang pengendaliannya menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai komitmen global yang harus dicapai padaakhir tahun 2030. Dari 35 kab/kota, 34 kab/kota yang sudah masuk dalam fase pemeliharaan eliminasi malaria non endemis malaria dan 1 kabupaten masuk dalam fase pembebasan yaitu Purworejo.

Angka kesakitan malaria digambarkan dengan indikator *Annual Parasite Incidence* (API) per 1.000 penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tersebut dengan konstanta 1.000. Adapun dalam SDGs, angka kesakitan malaria dituliskan dengan nama indikator yaitu kejadian malaria per 1.000 penduduk. Kejadian malaria per 1.000 penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat 0,015 per 1.000 penduduk, cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2022) yang mencapai angka 0,028 per 1.000 penduduk, masih dibawah target yang ditetapkan.



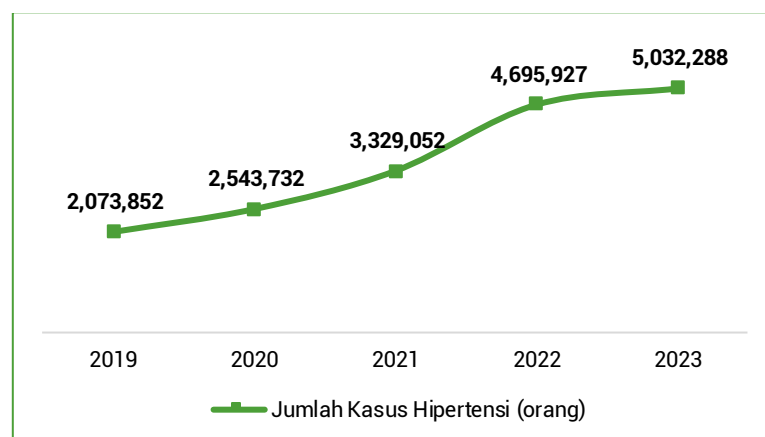
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 23 Kejadian Malaria per 1.000 penduduk di Jawa Tengah Th. 2019-2023

3) Angka Kematian Dini Akibat Penyakit Tidak Menular

Penyakit Hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh PTM yang dilaporkan, yaitu sebesar 72,0 persen, sedangkan urutan kedua terbanyak adalah Obesitas sebesar 12,44 persen dan diurutkan ke tiga adalah Diabetes Mellitus sebesar 9,59 persen. Tiga penyakit tersebut menjadi prioritas utama pengendalian PTM di Jawa Tengah. Jika Hipertensi, Obesitas dan Diabetes Mellitus tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan PTM lanjutan seperti Jantung, Stroke, Gagal Ginjal, dan sebagainya. Pengendalian PTM dapat dilakukan dengan intervensi yang tepat pada setiap sasaran/kelompok populasi tertentu sehingga peningkatan kasus baru PTM dapat ditekan.

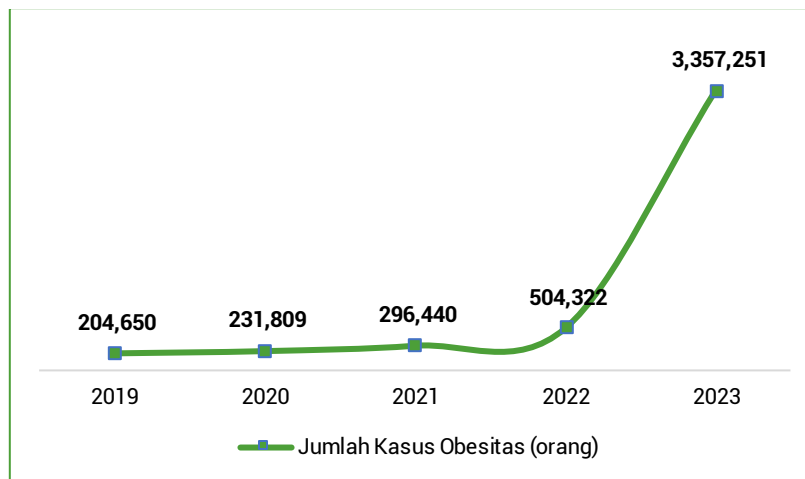
Secara tren, jumlah kasus hipertensi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus setiap tahunnya. Tahun 2023, jumlah penderita penyakit hipertensi sebanyak 5,03 juta orang, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,69 juta orang. Berikut grafik yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus hipertensi di Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 24 Jumlah Kasus Hipertensi di Jawa Tengah Th. 2019-2023

Penyakit Tidak Menular (PTM) urutan kedua terbanyak di Jawa Tengah setelah penyakit hipertensi adalah penyakit obesitas. Secara proporsi, kasus obesitas berada di angka 9,59 persen pada tahun 2023, dengan jumlah kasus sebanyak 670 ribu kasus. Jumlah kasus obesitas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif, namun cenderung meningkat (dapat dilihat pada Gambar 2.25).



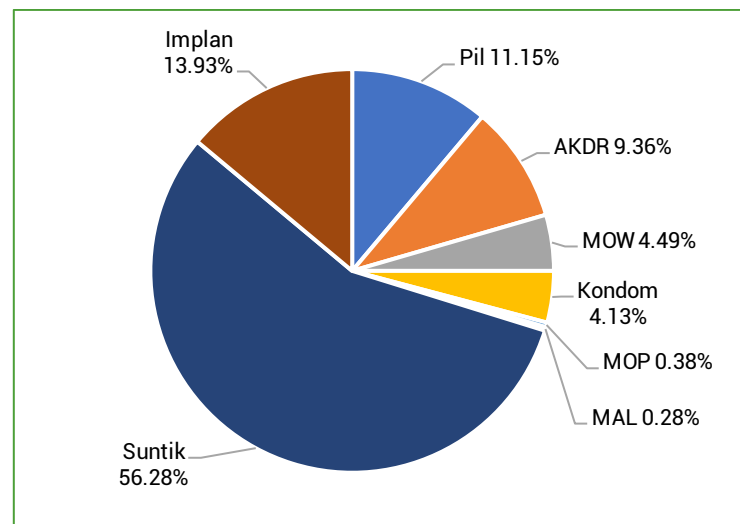
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 25 Jumlah Kasus Obesitas di Jawa Tengah Th. 2019-2023

4) Akses terhadap Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

Jumlah PUS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebanyak 5.993.886 pasang. Dari seluruh PUS yang ada, sebesar 76,3 persen adalah peserta KB aktif metode modern. Adapun jenis kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB aktif dapat dilihat pada Gambar 2.24.

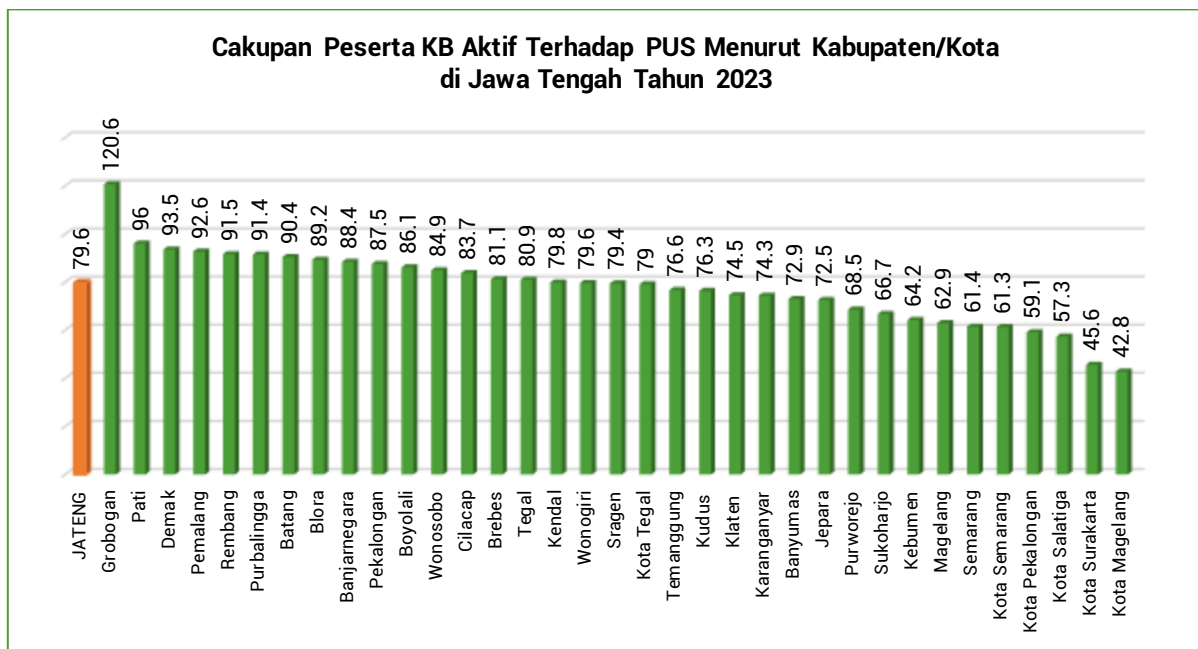


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 26 PUS Peserta KB Aktif Metode Modern di Jawa Tengah Th. 2023

Pola pemilihan jenis metode kontrasepsi modern pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta KB menggunakan suntik sebesar 56,28 persen. Pola ini terjadi setiap tahun, dimana peserta KB lebih memilih metode kontrasepsi jangka pendek meskipun sudah

mulai meningkat penggunaan metode jangka panjang (Implan 13,93 persen). Jika dilihat dari efektivitas, kedua jenis alat/obat/cara KB ini (suntik dan pil) termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Pendek sehingga tingkat efektifitas dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).



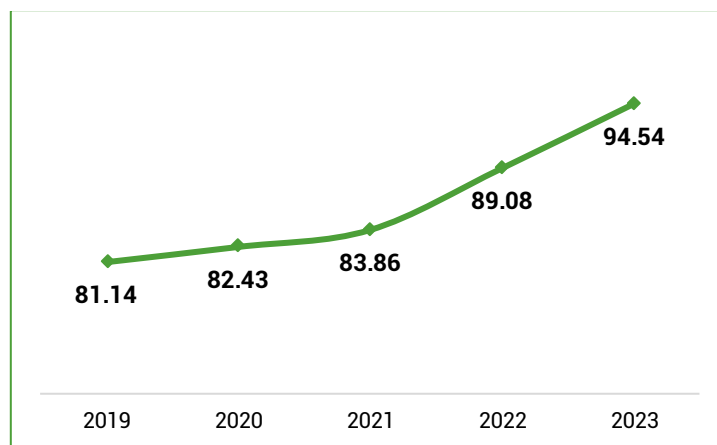
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 27 Cakupan Peserta KB Aktif terhadap PUS Menurut Kab/Kota di Jawa Tengah Th. 2023

5) Cakupan Kesehatan Universal: Jaminan Perlindungan dan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. Reformasi pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan ini telah banyak memberi manfaat kepada berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, terutama masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Program JKN, yakni mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial.

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan cakupan tersebut menandakan bahwa Jawa Tengah terus berupaya mencapai Jaminan Semesta (*Universal Health Coverage/UHC*). UHC dinilai tercapai apabila kepesertaan JKN lebih dari 95 persen. Sementara Jawa Tengah pada tahun 2023, cakupan kepesertaan JKN sebesar 94,54 persen hampir mencapai UHC. Secara absolut, jumlah kepesertaan JKN sebanyak 35,7 juta jiwa, dengan segmentasi kepesertaan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.



Segmentasi Peserta 2023	PBI APBN	PPU	PBPU	PBI APBD	BP
Total: 35.722.191	17.935.489	8.260.461	4.443.507	4.308.915	773.552

*PBI: Penerima Bantuan Iuran; *PPU: Peserta Penerima Upah; *PBPU: Peserta Bukan Penerima Upah

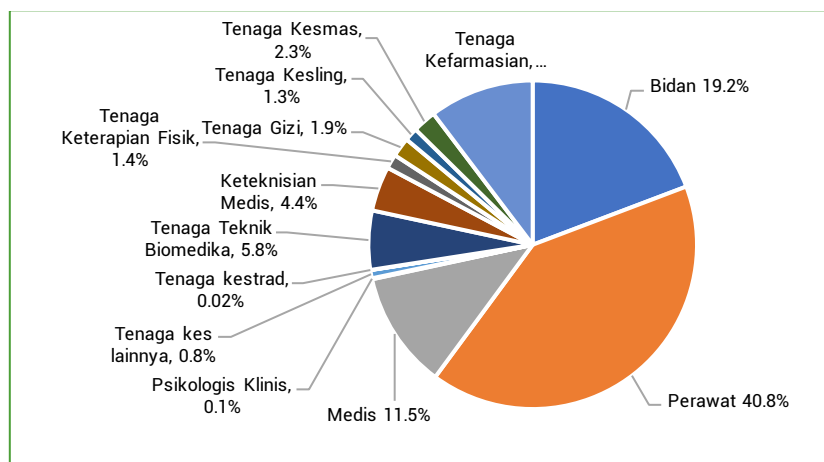
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 28 Cakupan Kepesertaan JKN di Jawa Tengah Th. 2019-2023

6) Pembiayaan Kesehatan, Pengembangan dan Rekrutmen Tenaga Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan komponen penting dalam proses transformasi kesehatan. Upaya transformasi sumber daya manusia kesehatan di fokuskan pada menjamin ketersediaan, pendistribusian yang merata, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan.

Total SDMK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebanyak 234.580 orang yang terdiri dari 153.398 orang tenaga kesehatan (65,39 persen) dan 81.182 orang tenaga penunjang kesehatan (34,61 persen). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga keperawatan sebesar 40,8 persen dari total tenaga kesehatan, sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu tenaga Kesehatan tradisional sebesar 0,02 persen dari total tenaga kesehatan. Secara lengkap, proporsi tenaga kesehatan menurut Jenis di Jawa Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 29 Proporsi Tenaga Kesehatan Menurut Jenis di Jawa Tengah Tahun 2023

C. Tantangan

Pembangunan kesehatan hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Dalam upaya yang dilakukan kemudian muncul variasi program untuk mendukung tercapainya kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk seluruh usia. Pembangunan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan penguatan sistem kesehatan.

Jawa Tengah masih menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yaitu: 1) Masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa; 2) Masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang juga berkaitan dengan masih rendahnya kualitas kesehatan reproduksi, kepesertaan program keluarga berencana (KB), dan masih tingginya perkawinan usia anak; 3) Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan warga lanjut usia (lansia); 4) Masih tingginya angka *stunting* dan gizi buruk; 5) Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan melayani sembilan prioritas layanan unggulan; dan 6) Keterbatasan prasarana dan sarana di rumah sakit.

2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

A. Pengantar

Tujuan 4 berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pembahasan Tujuan 4 mencakup empat isu utama, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan kebugaran termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

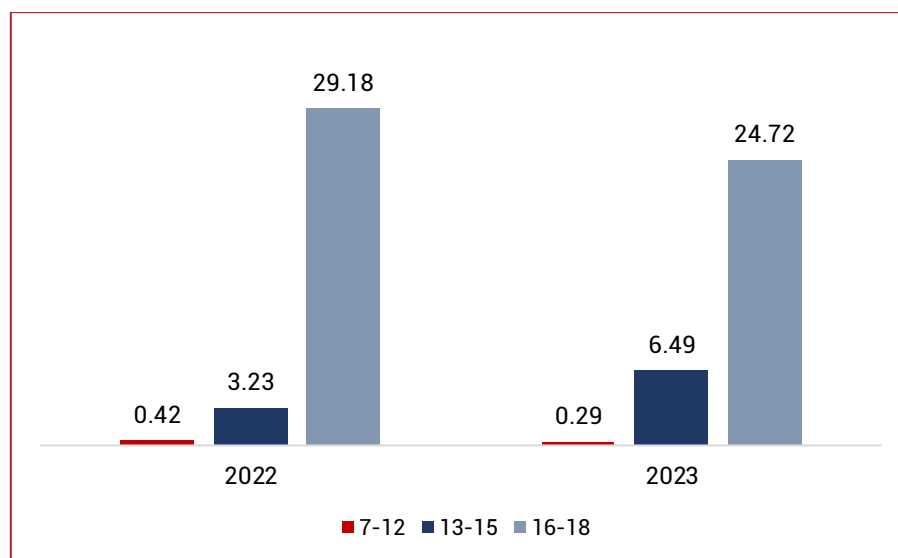
1) Akses dan Partisipasi Pendidikan

Perkembangan capaian kinerja pembangunan pendidikan di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan, namun demikian masih terdapat beberapa isu pendidikan di Jawa Tengah yang belum dapat diselesaikan dengan baik, antara lain mengenai akses dan mutu layanan pendidikan. Akses layanan pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pendidikan di Jawa Tengah, sedangkan mutu layanan pendidikan meliputi kualitas pengajaran

dan pembelajaran baik untuk pendidikan formal, non-formal termasuk pendidikan anak usia dini dan vokasi.

Akses layanan pendidikan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penduduk usia sekolah di Jawa Tengah, hal tersebut dibuktikan dengan masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Usia 7-18 Tahun di Jawa Tengah. Angka ATS tertinggi berada pada usia 16-18 tahun atau setara pendidikan jenjang menengah mencapai 24% hingga 29%. Sedangkan untuk usia 13-15 tahun angka ATS lebih kecil yaitu di bawah 10%, dan untuk usia 7-12 tahun tidak lebih dari 1%.

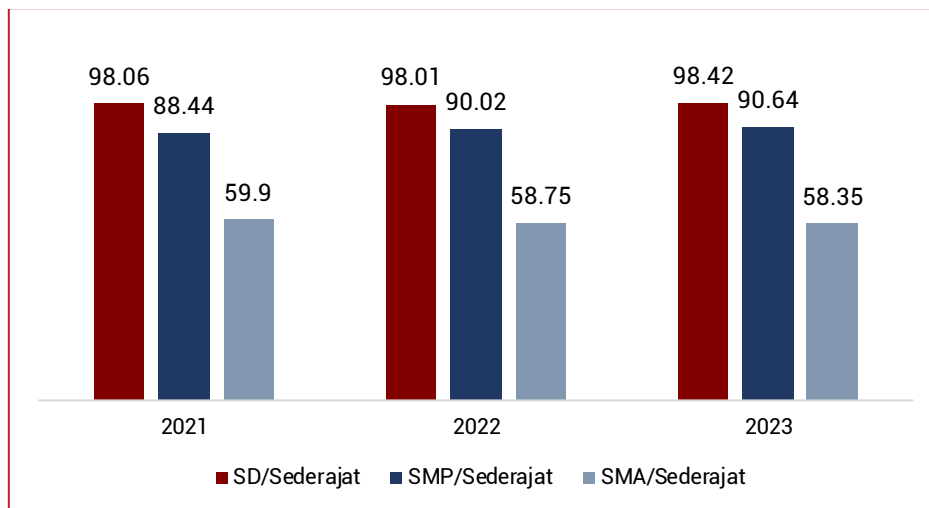
Namun dalam kurun waktu 2022-2023, tren angka ATS usia 16-18 tahun cenderung turun, sedangkan untuk usia 13-15 tahun justru meningkat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat Program WAJAR 13 Tahun mensyaratkan tuntas belajar hingga jenjang pendidikan menengah setara usia 16-18 tahun.



Sumber: Susenas Kor BPS, 2023

Gambar 2. 30 Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Usia 7-18 Tahun di Jawa Tengah Th. 2022-2023

Tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dalam rentang waktu 2021 - 2023 untuk SD/Sederajat fluktuatif, sedangkan jenjang SMP/Sederajat meningkat, namun sebaliknya untuk jenjang SMA/Sederajat menurun. Angka ATS dapat dikaitkan pula dengan tingkat penyelesaian pendidikan. Kondisi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kecenderungan banyak terdapat anak usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (jenjang pendidikan menengah), sehingga menyumbang angka ATS usia 13-15 tahun menjadi lebih banyak. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena akan berpengaruh terhadap capaian kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Tengah yang hingga sampai saat ini masih rendah yaitu setara kelas 2 SMP. Kondisi tersebut ditambah dengan jenis pengembangan industri di Jawa Tengah yang cenderung ke arah padat karya dengan kebutuhan tenaga kerja *low skilled*.

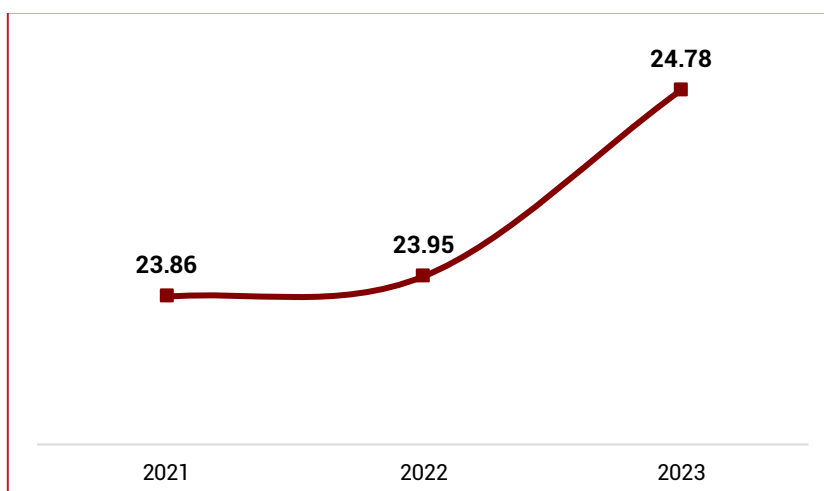


Sumber: Susenas Kor BPS, 2023

Gambar 2. 31 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang di Jawa Tengah Th. 2021-2023

Akses dan tingkat partisipasi Perguruan Tinggi juga masih rendah, ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Jawa Tengah yang masih di bawah 30%. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan menengah ke pendidikan tinggi masih rendah. Atas kondisi tersebut, maka pemerintah perlu memperhatikan lulusan pendidikan menengah ke arah kekerjaan dengan memberikan akses ke pelatihan-pelatihan keterampilan.

Namun demikian tren memperlihatkan adanya peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dari 23,86% di tahun 2021 menjadi 24,78% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan berubahnya status Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), PTN-BLU (Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum) dan PTN-Satker (Perguruan Tinggi sebagai Satuan Kerja Kementerian) memberikan peluang lebih luas kepada masyarakat untuk memilih layanan pendidikan tinggi yang lebih beragam. Hingga saat ini terdapat 497 Perguruan Tinggi di Jawa Tengah, 40 antaranya Perguruan Tinggi Negeri, lainnya swasta.



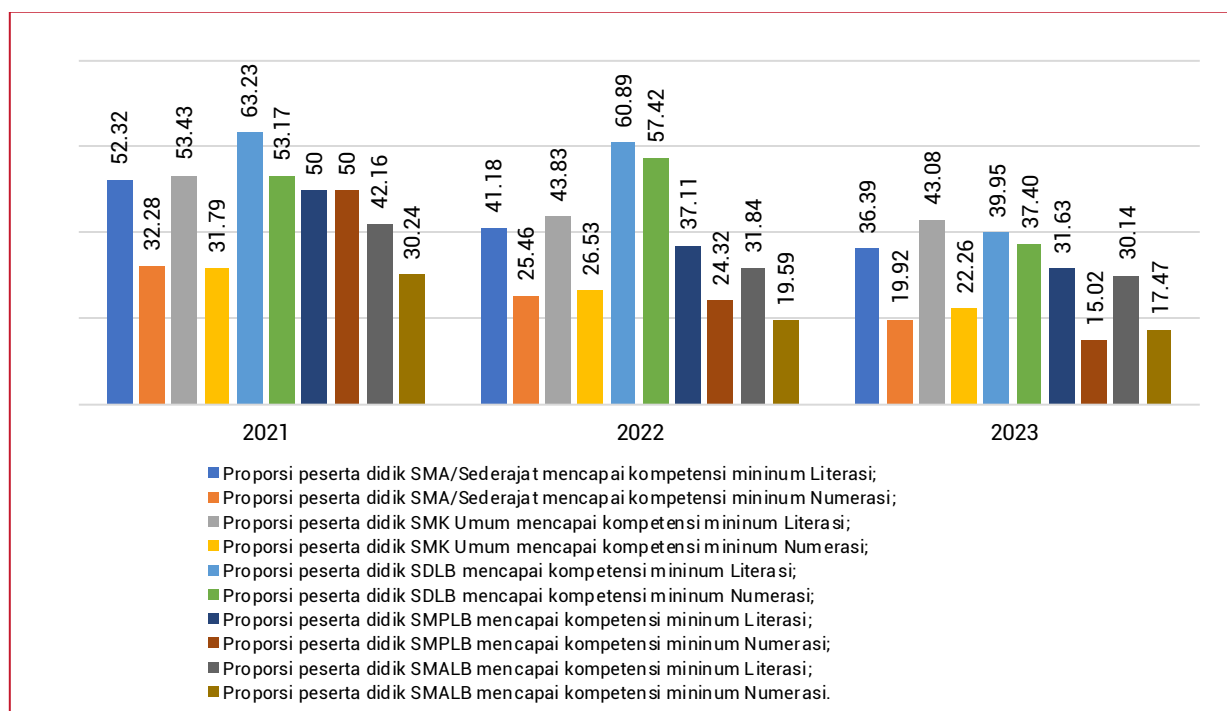
Sumber: Susenas Kor BPS, 2023

Gambar 2. 32 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Jawa Tengah Tahun 2021-2023 (Persen)

2) Kualitas dan Mutu Pembelajaran

Kualitas pendidikan dapat digambarkan melalui kualitas pengajaran dan pembelajaran, salah satunya adalah kemampuan literasi dan numerasi. Persentase siswa yang mencapai kompetensi minimum literasi numerasi Jawa Tengah pada rentang 2021 hingga 2023 cenderung mengalami penurunan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penurunan cukup signifikan pada literasi pendidikan khusus jenjang SD, dari 63% menjadi 39%. Penurunan dan rendahnya persentase siswa yang mencapai kompetensi minimum dalam kurun waktu 3 tahun ini menunjukkan masih rendahnya mutu pendidikan di Jawa Tengah.

Selain literasi numerasi, mutu pembelajaran juga dapat dilihat dari nilai karakter yang direpresentasikan dari 3 iklim yaitu Iklim Kebhinekaan, Inklusivitas dan Keamanan. Dari ke-3 iklim tersebut, skor iklim inklusivitas masih rendah yaitu pada kisaran 50 hingga 60. Sedangkan untuk iklim keamanan dan kebhinekaan sudah berada pada kisaran 70. Masih kurangnya skor iklim inklusivitas mengindikasikan bahwa masih terdapat kasus dan kejadian yang mengarah pada diskriminasi dan kekerasan atau bullying di sekolah. Kondisi ini masih dijumpai di sekolah di Jawa Tengah, bahkan beberapa kasus sempat menjadi viral di media sosial. Mengenai hal tersebut maka perlu didorong untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dengan lebih optimal. Satuan Tugas (Satgas) PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan) agar dapat menjalankan fungsi dan perannya lebih baik lagi.



Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024

Gambar 2. 33 Proporsi peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi numerasi pada jenjang pendidikan menengah dan khusus Jawa Tengah Th. 2021-2023 (Persen)

Kualifikasi guru juga menjadi salah satu penentu dari kualitas pembelajaran, dari tahun 2018 hingga 2022 di Jawa Tengah masih terdapat guru yang belum berkualifikasi S1/D4 meskipun di bawah 3% hingga 2%, dengan persentase cukup besar pada jenjang SMK.

Tabel II. 3 Kualifikasi Guru S1/D4 Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Uraian		2018		2019		2020		2021		2022	
		Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1	Sudah D4/S1	Belum D4/S1
Kualifikasi	SMA	98,15	1,85	89,50	10,50	97,18	2,82	98,83	1,17	99,05	0,95
Guru	SMK	65,80	34,20	89,46	10,54	96,34	3,66	97,35	2,65	97,59	2,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

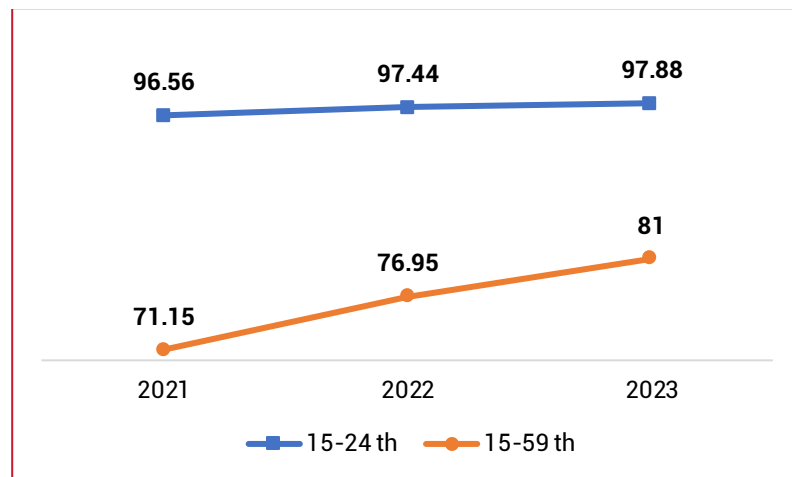
Selain guru, kualitas pembelajaran juga dipengaruhi oleh kondisi sarana prasarana pendidikan. Dari tahun 2018 hingga 2021 tren rusak berat sarana prasarana pendidikan menurun, bahkan di 2020 dan 2021 tidak ada yang mengalami rusak berat. Namun di tahun 2022 kembali dijumpai rusak berat sebesar 2,47% untuk SMA dan 0,73% untuk SMK. Sarana prasarana dalam kondisi rusak ringan atau sedang masih cukup banyak terdapat di Jawa Tengah, penurunan signifikan terjadi di tahun 2022 sebesar 23,66% untuk SMA dan 27,35% untuk SMK. Dan kondisi sarana prasarana baik hanya mencakup 70% di tahun 2022, angka ini jauh lebih baik dibandingkan empat tahun ke belakang.

Tabel II. 4 Kondisi Fisik Sarana Prasarana Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

URAIAN	2018		2019		TAHUN 2020		2021		2022	
	SMA	SMK	SMA	SMK	SMA	SMK	SMA	SMK	SMA	SMK
Rusak berat	2,14	1,24	1,28	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,73
Rusak ringan / sedang	46,58	52,55	70,17	69,06	41,59	44,28	42,76	46,90	23,66	27,35
Baik	51,29	46,20	28,55	30,26	58,41	55,72	57,24	53,10	73,87	71,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kesiapan kekerjaan, salah satunya melalui kecakapan ketrampilan IT. Era revolusi industri menuntut SDM yang cakap dan adaptif terutama dalam penguasaan teknologi informasi. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa proporsi remaja usia 15-24 tahun yang memiliki ketrampilan TIK jauh lebih tinggi dibandingkan usia 15-59 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor usia berpengaruh terhadap penguasaan IT. Ketika rentang usia diperpanjang, maka proporsi nya semakin kecil, kondisi ini mengindikasikan kemampuan beradaptasi dalam perkembangan teknologi bagi penduduk usia lanjut semakin kurang.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

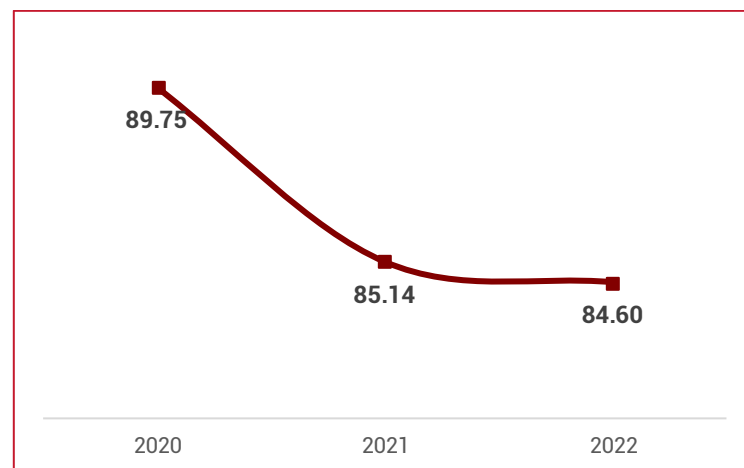
Gambar 2. 34 Proporsi Remaja (Usia 15-24 th) dan Dewasa (usia 15-59 th) dengan Ketrampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Jawa Tengah Th. 2021-2023 (Persen)

Keterampilan TIK berperan besar dalam perkembangan revolusi industri dan dunia usaha. Lulusan Perguruan Tinggi dan vokasional diharapkan mempunyai ketrampilan TIK yang memadai, sehingga kualitas tenaga kerja di Jawa Tengah mempunyai daya saing tinggi. Namun, data berdasarkan Rapor Pendidikan 2024 terhadap capaian mutu pembelajaran 2023 memperlihatkan bahwa persentase lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan pada bidang yang selaras dengan latar belakang bidang keahlian rendah yaitu hanya mencapai 44,63%. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar mendorong penyelarasan kurikulum vokasional baik di tingkat pendidikan menengah maupun tinggi selaras dan adaptif dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.

3) Pendidikan Pra-sekolah

Selain pendidikan vokasional, tidak kalah penting dalam pencapaian pembangunan pendidikan adalah bagaimana membangun karakter SDM. Pembentukan karakter SDM tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui proses panjang dan harus dimulai sejak dini. Untuk itulah pemerintah pusat merubah Program WAJAR (Wajib Belajar) dari 12 Tahun menjadi 13 Tahun. Penambahan 1 tahun dikonsentrasikan pada 1 tahun pendidikan usia dini yaitu pra-sekolah untuk anak usia 5 hingga 6 tahun. Pendidikan pra-sekolah sebagai masa transisi anak menghadapi kesiapan pembelajaran dari tidak terorganisir/terstruktur menuju pendidikan yang lebih terorganisir/terstruktur. Data BPS 2023 menunjukkan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu terjadinya penurunan partisipasi pendidikan anak usia dini 5-6 tahun di Jawa Tengah dalam 3 tahun terakhir, dari 89,75% menjadi 84,60%. Hal ini tentu menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab penurunan partisipasi pendidikan anak usia dini sejak tahun 2021. Hal ini kemungkinan disebabkan saat pandemi Covid-19 orang tua/keluarga lebih berfokus untuk perlindungan,

kesehatan dan pengasuhan keluarga serta menjaga keberlangsungan perekonomian mereka, sehingga pendidikan anak usia dini diselesaikan sendiri oleh masing-masing keluarga di rumah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. 35 Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun di Jawa Tengah Th. 2020-2022 (Persen)

C. Tantangan

Permasalahan dan tantangan dalam upaya peningkatan pendidikan berkualitas secara inklusif meliputi 2 hal utama yaitu persoalan akses dan mutu pendidikan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dan Program Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun.

1) Pemerataan Akses Layanan Pendidikan:

Jawa Tengah masih menghadapi persoalan serius terkait akses layanan pendidikan. Dalam jalur pendidikan formal sekolah negeri cenderung lebih terjangkau, mengingat adanya keringanan biaya pendidikan bahkan untuk jenjang menengah dan khusus yang merupakan kewenangan provinsi dipersyaratkan gratis. Namun tidak demikian halnya dengan sekolah swasta, dimana sekolah swasta secara proporsi justru jauh lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Atas kurang meratanya layanan pendidikan tersebut, maka di Jawa Tengah masih banyak dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai sekitar 500 ribu pada usia 7-18 tahun (Data olah Susenas, BPS 2023). ATS ini merupakan anak yang *drop-out*, lulus tidak melanjutkan jenjang lebih tinggi dan belum pernah bersekolah sama sekali.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pemerataan akses layanan pendidikan di Jawa Tengah yaitu masih terdapat *blankspot area* layanan pendidikan menengah. Dari total 576 kecamatan di Jawa Tengah, 24 kecamatan belum mempunyai layanan pendidikan menengah umum baik negeri maupun swasta.

Akses layanan pendidikan juga meliputi distribusi guru dan tenaga kependidikan yang tidak merata. Masih banyak dijumpai guru dengan kekurangan atau kelebihan jam mengajar, dimana hal ini seharusnya tidak terjadi jika distribusi dan penempatan guru dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi pemetaan dan kebutuhan. Demikian pula dengan

sarana prasarana pendidikan, banyak sekolah terutama di daerah terpencil dan rawan atau terdampak bencana memiliki sarana pendidikan kurang memadai.

2) Kualitas dan Mutu Pendidikan:

Relevansi pendidikan juga merupakan bagian dari mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan vokasi, relevansi antara pendidikan dengan dunia kerja dikatakan baik jika tercipta keselarasan antara kebutuhan lapangan pekerjaan dengan kualitas lulusan yang dihasilkan. Namun pada kenyataannya Jawa Tengah masih dihadapkan pada rendahnya relevansi pendidikan dengan pasar kerja atau dikenal dengan istilah *mismatch supply-demand*.

Hasil pembelajaran yang sekaligus mempengaruhi kualitas pendidikan yaitu tentang bagaimana membentuk karakter siswa. Pendidikan dan pembentukan karakter tidak menjadi tugas guru dan sekolah saja, namun juga melibatkan orang tua, keluarga dan masyarakat. Namun sekolah juga berkontribusi menjadi salah satu tempat untuk menempa dan membentuk karakter seorang anak, terutama pada anak usia dini. Upaya pembiasaan yang baik, pembelajaran yang menanamkan budi pekerti, kepekaan dan empati, kebhinekaan dan inklusivitas ditanamkan pada usia dini. Maka penting bagi Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan anak usia dini atau pra sekolah, sehingga Program WAJAR 13 Tahun merupakan program Wajib Belajar menambahkan satu tahun untuk pendidikan pra sekolah dicanangkan oleh pemerintah karena pendidikan anak usia dini penting sebagai investasi pendidikan jenjang selanjutnya.

Tantangan lain dunia pendidikan adalah belum optimalnya ketrampilan teknologi informasi yang dimiliki penduduk usia 15-59 tahun. Rentang usia tersebut merupakan usia produktif, yang seharusnya di era revolusi industri ketrampilan TIK menjadi syarat dan kebutuhan yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh sarana prasarana yang masih kurang termasuk penyediaan supra-struktur.

2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan 5 berkaitan dengan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan. Upaya pencapaian kesetaraan gender terhadap kaum perempuan dilakukan dalam bentuk penghapusan segala bentuk diskriminasi, penghapusan segala bentuk kekerasan, serta penghapusan praktik berbahaya pada anak dan kaum perempuan yang notabene termasuk dalam kaum rentan. Sedangkan pemberdayaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan dilakukan melalui penyediaan pelayanan publik yang berkaitan dengan rumah tangga dan keluarga, penjaminan

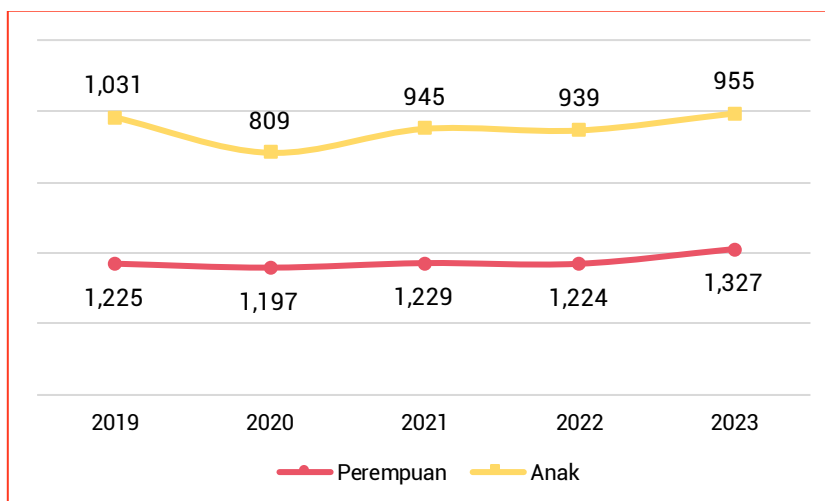
partisipasi penuh dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam kehidupan politik, penjaminan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, pemberian hak yang sama kepada perempuan terhadap sumberdaya ekonomi, serta peningkatan penggunaan teknologi yang memampukan. Dengan didukung dan diperkuat melalui adanya regulasi kebijakan untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

1) Kekerasan terhadap Kaum Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan yang perlu perhatian khusus di Jawa Tengah. Masih rendahnya perspektif masyarakat terhadap hak perempuan dan anak menjadi penyebab masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Kementerian PPA tahun 2023, diketahui bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi urutan ke-3 dengan kasus kekerasan perempuan dan anak tertinggi secara nasional. Terdapat sebanyak 955 korban kekerasan perempuan dan 1.327 korban kekerasan anak sepanjang tahun 2023.

Sampai dengan tahun 2022, tercatat rasio kekerasan terhadap perempuan sebesar 4,38 dan rasio kekerasan terhadap anak sebesar 10,33 per 100.000 penduduk. Adapun secara absolut, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, jumlah korban kekerasan perempuan dan anak cenderung fluktuatif, dengan tren yang mulai meningkat terjadi pada tahun 2020 hingga saat ini (Gambar 2.36).



Sumber: Dinas P3AKB Prov. Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 36 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Jiwa)

Apabila dilihat menurut jenis kekerasan, korban perempuan dewasa sebagian besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan kekerasan yang dialami korban anak tertinggi merupakan kekerasan seksual, disusul psikis dan fisik (Tabel II.5).

Tabel II. 5 Kekerasan Perempuan dan Anak berdasarkan Jenis Kekerasan di Jawa Tengah Th. 2019-2023
(Jiwa)

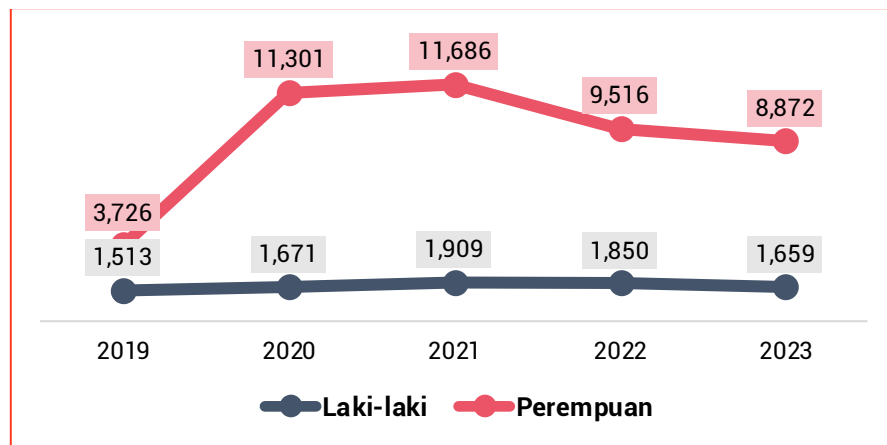
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jenis kekerasan yang dialami korban perempuan dewasa:					
Fisik	604	484	539	495	481
Psikis	438	297	372	405	373
Seksual	146	126	145	186	212
Penelantaran	203	119	135	117	117
Trafficking	1	5	10	2	8
Eksplorasi	2	0	7	9	8
Lainnya	44	26	47	60	49
Jenis kekerasan yang dialami korban anak:					
Fisik	293	205	204	193	217
Psikis	312	296	327	361	303
Seksual	700	789	807	748	755
Penelantaran	85	58	66	84	107
Trafficking	8	8	16	7	4
Eksplorasi	9	15	9	30	18
Lainnya	51	56	72	72	133

Sumber: Kementerian PPA, 2023

Kota Semarang mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi se-Jawa Tengah. Tahun 2023, Kota Semarang tercatat memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 250 kasus. Terdiri dari 135 kasus kekerasan perempuan dan 115 kasus kekerasan anak. Tingginya kasus kekerasan tersebut didorong oleh semakin bertambahnya korban yang berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, seiring dengan layanan pendampingan yang semakin optimal bagi korban. Jumlah data kekerasan yang diterima oleh Pemerintah seperti fenomena gunung es, dimana kejadian yang tampak dipermukaan (terlapor) tidak sebanding dengan kejadian sesungguhnya di lapangan yang diperkirakan jauh lebih tinggi.

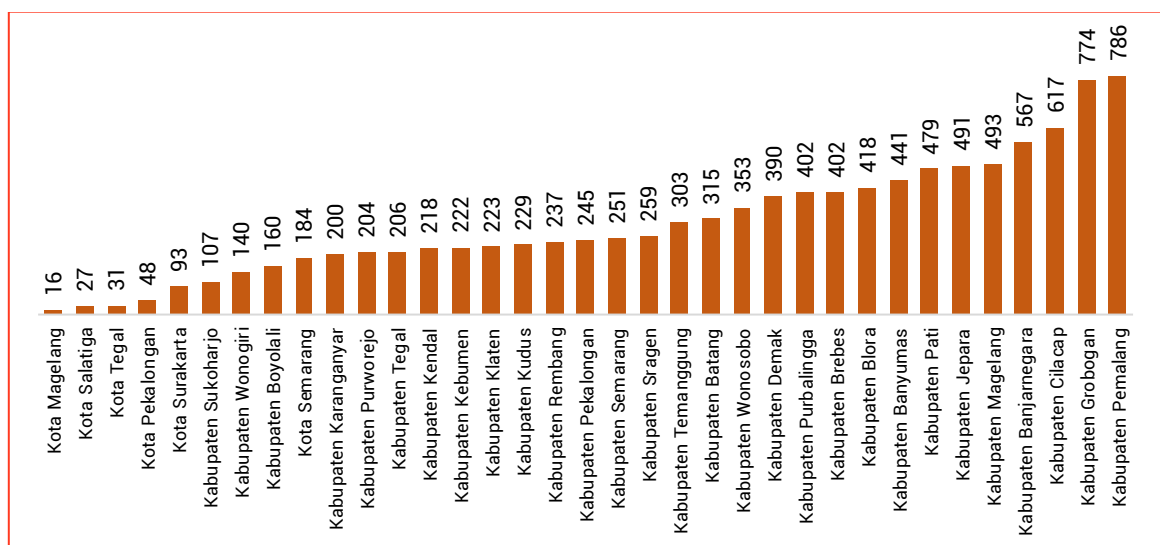
2) Perkawinan Usia Anak

Isu lain terkait anak adalah mengenai perkawinan usia anak. Perkawinan anak dibawah usia 19 tahun sepanjang tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir. Data terakhir tahun 2023 tercatat bahwa angka perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 10.531 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Pemalang (786 kasus) dan terendah di Kota Magelang (16 kasus), dapat dilihat pada Gambar 2.37 dan 2.38.



Sumber: Dinas P3AKB Prov. Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 37 Jumlah Perkawinan Dibawah Usia 18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas P3AKB Prov. Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 38 Distribusi Jumlah Perkawinan Dibawah Usia 18 Tahun berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

Perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, khususnya pada anak perempuan jika segera diikuti dengan kehamilan. Selain melahirkan, norma yang masih banyak berlaku di masyarakat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada istri untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, norma sosial mengenai peran laki-laki dalam keluarga dapat menyebabkan suami yang masih berusia muda rentan mengalami tekanan mental jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian.

3) Partisipasi Perempuan dalam Posisi Kepemimpinan

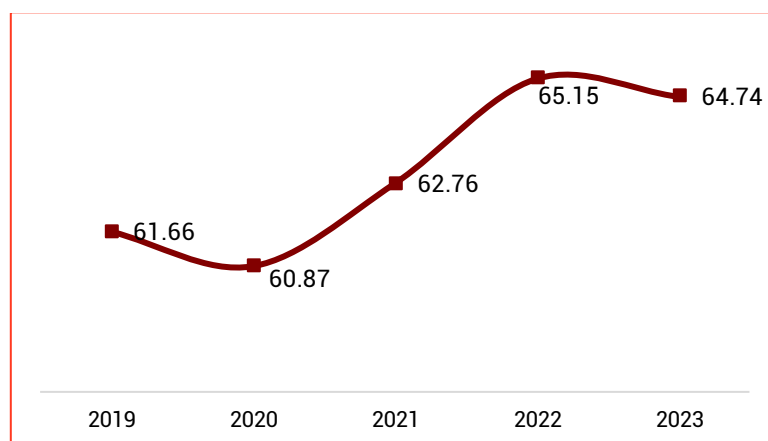
Keterlibatan dan partisipasi aktif perempuan dalam posisi kepemimpinan ditunjukkan dengan indikator proporsi perempuan di parlemen pemerintahan daerah dan proporsi perempuan di posisi managerial.

Secara capaian dalam kurun waktu lima tahun, proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen baik tingkat pusat maupun daerah menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan dari 18,61 persen tahun 2022 menjadi 19,33 persen terjadi pada tahun 2023.

Berbeda dengan proporsi perempuan di parlemen, proporsi perempuan yang berada di posisi managerial menunjukkan tren cenderung fluktuatif. Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif di Jawa Tengah meningkat 30,91 persen menjadi 32,58 persen pada tahun 2022.

4) Akses Teknologi

Penggunaan teknologi yang memampukan khususnya teknologi komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, salah satunya diukur dengan indikator proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, capaian proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam menunjukkan tren yang fluktuatif (dapat dilihat pada Gambar 2.37).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 39 Proporsi Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Jawa Tengah Th. 2019-2023

Berdasarkan data terbaru dari BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, diketahui bahwa penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir memiliki komposisi: penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 69,63 persen, sementara penduduk berjenis kelamin perempuan berada di kisaran 59,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan dan penguasaan teknologi komunikasi di Jawa Tengah masih didominasi oleh penduduk laki-laki. Begitu pula apabila melihat pada 35 Kabupaten/Kota yang ada, persentase penduduk perempuan yang memiliki/menguasai telepon seluler masih berada cukup jauh dibawah persentase penduduk laki-laki.

C. Tantangan

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Di samping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Faktanya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi tantangan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang.

Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain: a. perempuan masih menemui kesulitan dalam mengambil kesempatan dan berkiprah di sektor politik dan ekonomi; b. masih terus terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; c. adanya kasus perkawinan usia anak; d. pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak belum sepenuhnya berbasis hak anak. Secara aktual, permasalahan tersebut meliputi (1) Masih banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang-ruang publik seperti sekolah, kantor, kampus dan tempat umum, juga semakin banyaknya kekerasan berbasis gender *online*, (2) Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak utamanya Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), (3) Pengasuhan oleh keluarga selama ini belum responsif terhadap hak-hak anak, serta (4) Masih minimnya sistem perlindungan anak di masyarakat.

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini memiliki capaian lebih rendah dibanding laki-laki serta mengalami berbagai diskriminasi sebagai dampak budaya patriarki. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen. Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh signifikan terhadap disahkannya peraturan-peraturan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik di level nasional maupun daerah.

2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

A. Pengantar

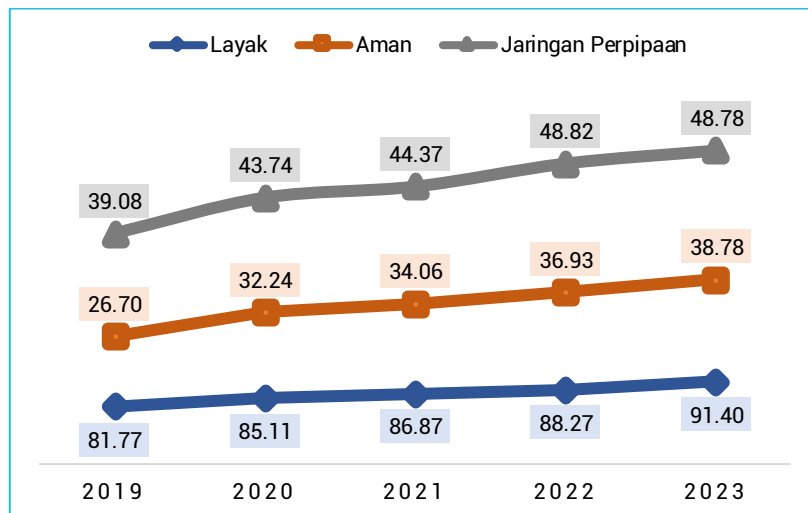
Tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan target-target pencapaian untuk pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya air, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Dengan ketersediaan air dan sanitasi yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat yang pada akhirnya secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi secara positif. Pencapaian target tujuan 6 Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada: (1) Akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau; (2) Akses terhadap

sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata; (3) Peningkatan kualitas dan efisiensi penggunaan air; dan (4) Pengelolaan sumber daya air.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

1) Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

Air menjadi sumber kehidupan dan kebutuhan dasar bagi kehidupan. Kebutuhan dasar tersebut harus dipenuhi dengan sistem penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien, efektif, dan terintegrasi kepada sektor sanitasi. Jika kebutuhan ini terpenuhi maka masyarakat dapat hidup sehat, produktif, dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tahapan proses pengolahan memenuhi syarat kesehatan dan langsung diminum. Air minum didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, air yang didistribusikan melalui tanki air, air kemasan, air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan untuk masyarakat. Sumber air minum aman adalah yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan).



Sumber: Dinas PU-BMCK Provinsi Jawa Tengah, 2023

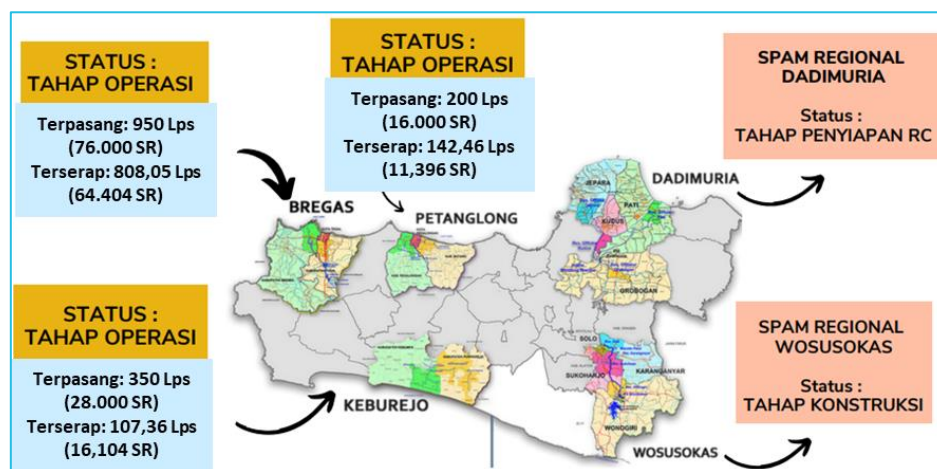
Gambar 2. 40 Capaian Akses Air Minum Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Cakupan akses air minum layak pada tahun 2023 sebesar 91,40 persen, tercatat dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 cakupan masih sebesar 81,77 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air minum aman pada tahun 2023 sebesar 38,78 persen, tercatat dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 cakupan masih sebesar 22,70 persen. Sedangkan untuk cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2025 sebesar 48,78 persen sedangkan pada tahun 2019 cakupan masih sebesar 39,08 persen.

Penyediaan akses air minum dan sanitasi perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya air yang mencukupi baik dari sisi kualitas dan kuantitas, pencegahan pencemaran terhadap sumber-

sumber air baku dari pencemaran, dan tutupan vegetasi untuk menjaga, memelihara dan menjamin ketersediaan air baku.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh air minum di Jawa Tengah terdapat 5 (lima) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo dan Petanglong, serta sedang dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wosusukas, dan proses inisiasi yaitu SPAM Regional Dadimuria. Sedangkan dalam rangka percepatan pencapaian akses menyeluruh air limbah domestik, diinisiasi penyediaan sarana prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Jawa Tengah.



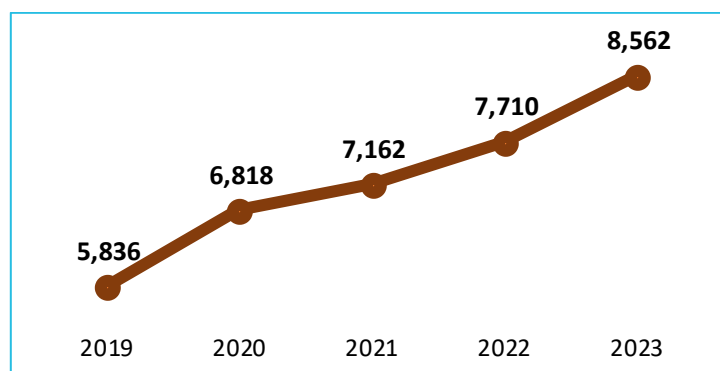
Sumber: Dinas PU-BMCK Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 41 SPAM Regional Jawa Tengah

Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun (CTPS) dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Terdapat 5 pilar STBM yaitu Stop Buang Air Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah Rumah Tangga, serta Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada Masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program open defecation free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan di Jawa Tengah agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga.

Selama tahun 2019-2023 terjadi peningkatan desa ODF dari 5.836 desa di tahun 2019 menjadi 8.562 desa di tahun 2023 (terdapat penambahan 2.726 desa ODF dalam kurun waktu 5

tahun). Hal ini diikuti dengan semakin banyak masyarakat yang mengerti dan meningkatkan perilaku hidup sehat.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 42 Desa ODF di Jawa Tengah

2) Kualitas dan Efisiensi Penggunaan Air

Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta Tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan meningkat, salah satunya penyediaan air untuk air baku. Pemenuhan air baku penting bahkan utama karena digunakan utamanya untuk pemenuhan kebutuhan air minum. Selain air minum, air baku juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata).

Tabel II. 6 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kebutuhan Air Baku (juta m3/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	755,35	760,33	760,33	770,08	775,00
Ketersediaan Air Baku (juta m3/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	466,78	467,62	467,62	477,45	484,40
Ketersediaan Air Baku (%)	61,80	61,39	61,50	62,00	62,50

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Infrastruktur sumber daya air di Jawa Tengah juga semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi sarana sumber daya air antara lain ditunjukkan dengan kondisi jaringan irigasi, yang sampai dengan tahun 2023, jaringan irigasi dalam kondisi baik dan rusak ringan sebesar 82,80 persen atau seluas 71.928 ha, Sementara luas daerah irigasi (DI) di Jawa Tengah seluas 953.804 hektar, dengan DI kewenangan provinsi sebanyak 108 seluas 86.865 hektar atau 9,11 persen dari total luas DI di Jawa Tengah.

Ketersediaan air khususnya untuk air baku dipengaruhi oleh jumlah bangunan bendungan/waduk. Sampai saat ini terdapat 41 bangunan bendungan/waduk (9 waduk besar dan 32 waduk kecil). Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 61,80 persen menjadi 62,50 persen di tahun 2023.

C. Tantangan

Permasalahan sumber daya air tidak hanya terkait ketersediaan air, namun lebih luas permasalahannya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air disebabkan kurangnya sarana tampungan air baku dan rusaknya jaringan irigasi untuk pertanian. Sementara itu, terkait dengan permasalahan belum optimalnya pengendalian daya rusak air ditunjukkan dengan adanya kerusakan prasarana sarana sungai dan pengendali banjir.

Selain permasalahan sumber daya air permukaan sebagaimana digambarkan sebelumnya, di Jawa Tengah juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi menyebabkan terjadinya terjadinya *land subsidence* atau penurunan tanah. Kondisi tersebut saat ini telah terjadi di Jawa Tengah terutama pada wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah. Mengacu pada hasil evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi pada CAT di Jawa Tengah tahun 2022, CAT Semarang Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang terdapat zona rusak. Dan kejadian *land subsidence* juga tercatat terjadi di kabupaten/kota di wilayah pesisir pantai utara di antaranya Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. Jumlah pengambilan air tanah di Jawa Tengah cenderung naik secara fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 hingga tahun 2022 jumlah pengambilan air tanah menunjukkan penurunan.

2.7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern

A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang ke-7 (tujuh) merupakan tujuan yang berkaitan dengan penjaminan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern. Pembahasan Tujuan 7 mencakup 4 (tiga) isu utama yaitu: (a) penjaminan akses universal layanan energi terjangkau, andal dan modern; (b) peningkatan pangsa energi terbarukan; (c) perbaikan efisiensi energi; dan (d) perluasan infrastruktur dan peningkatan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern. Dalam periode lima tahun terakhir (2019-2023) indikator TPB/SDGs tujuan 7 secara capaian terus menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang baik setiap tahunnya. Meskipun begitu, terdapat pula indikator yang harus dilakukan upaya percepatan.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

1) Akses Layanan Energi

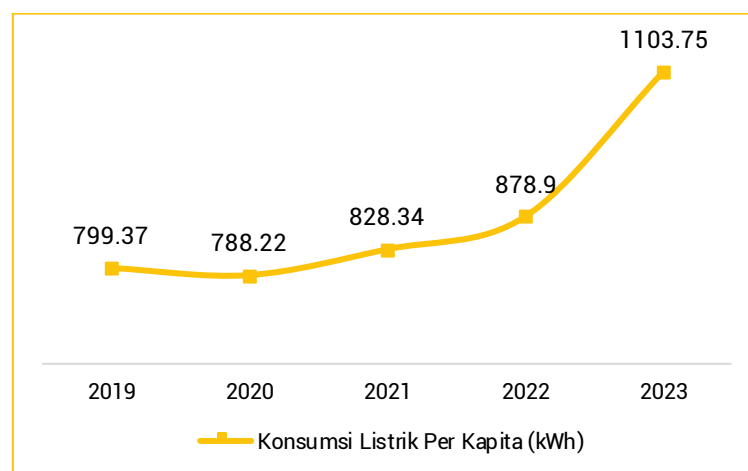
Rasio Elektrifikasi digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, capaian rasio elektrifikasi cenderung meningkat, dengan angka sebesar 99,99 persen

pada tahun 2023. Artinya masih terdapat 0,01 persen penduduk yang belum memiliki akses listrik, yang sebagian besar merupakan penduduk miskin.

Upaya peningkatan pemenuhan akses listrik bagi masyarakat yang belum memiliki akses listrik terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Program Sambungan Listrik Murah dengan mengoptimalkan pendanaan dari seluruh pihak diluar APBD, seperti APBN, BUMN dan Swasta. Pada tahun 2023, telah terlaksana pekerjaan sambungan listrik rumah bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 28.937 KK di Jawa Tengah dari target 15.000 KK. Adapun pada pelaksanaan pekerjaan sambungan listrik rumah terutama untuk warga tidak mampu terkendala data calon penerima yang bersifat dinamis sehingga alokasi calon penerima yang direncanakan sudah tidak relevan dengan kondisi sebenarnya.

Konsumsi listrik per kapita merupakan perbandingan jumlah penjualan tenaga listrik dengan jumlah penduduk. Konsumsi listrik per kapita di Jawa Tengah dinilai masih rendah, dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan energi listrik karena belum meratanya akses tenaga listrik, terutama bagi rumah tangga dan industri. Pertumbuhan beban (*demand*) konsumsi tenaga listrik di Jawa Tengah masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan *supply* penyediaan tenaga listrik.

Seiring dengan peningkatan rasio ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah, berbanding lurus dengan tingkat energi terjual listrik di Jawa Tengah. Energi terjual listrik di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari data Buku Statistik PLN. Selama kurun waktu 2014 hingga 2022 menunjukkan peningkatan energi terjual dari 26.301 GWh pada tahun 2019 menjadi 27.564,64 GWh pada tahun 2022. Kenaikan penjualan listrik menjadi sinyal bahwa perekonomian Jawa Tengah tumbuh dengan baik. Setelah berkontraksi dengan peristiwa Covid-19, aktivitas masyarakat kembali pulih sehingga mendorong peningkatan konsumsi listrik terutama di sektor industri dan retail.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 43 Konsumsi Listrik Per Kapita Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2023, konsumsi listrik mengalami tren cenderung meningkat dari 799,37 kWh per kapita menjadi 1.103,75 kWh per kapita. Konsumsi listrik per kapita ini erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi konsumsi listrik perkapita disuatu daerah maka semakin tinggi juga potensi kesejahteraan di daerah tersebut.

Konsumsi listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Menurut data dari PLN UID Jateng DIY, konsumsi listrik Jawa Timur sudah mencapai 907 kWh/kapita, Jawa Barat sebesar 1.012 kWh/kapita, dan DKI Jakarta telah mencapai 3.248 kWh/kapita. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan. Tidak hanya mendorong pemanfaatan untuk kegiatan konsumtif tetapi utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif.

Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang digunakan untuk melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih dan aman. Capaian rasio penggunaan gas rumah tangga di Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Artinya semakin banyak rumah tangga di Jawa Tengah yang memanfaatkan gas bumi sebagai bahan bakar rumah tangga yang aman. Pada tahun 2023, rasio penggunaan gas rumah tangga sebesar 92,51%, meningkat sebanyak 9,98% dari tahun 2019.

Pengembangan jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil terus didorong dalam rangka mendukung pemanfaatan energi bersih ramah lingkungan di masa transisi energi saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, melalui dana APBN Kementerian ESDM, telah dibangun jaringan gas (jargas) di Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang sebanyak 8.700 sambungan rumah tangga telah terpasang dan di Kabupaten Blora sebanyak 4.600 sambungan rumah tangga.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan bidang migas di Jawa Tengah, antara lain realisasi lifting migas yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan, harga jual gas bumi yang belum memenuhi nilai keekonomian karena keterbatasan infrastruktur pipa gas, serta tidak adanya kewenangan terkait pengembangan gas di Pemerintah Daerah.

2) Bauran Energi Terbarukan

Berdasarkan hasil evaluasi bauran energi tahun 2023, saat ini proporsi sumber energi dengan pemakaian terbesar di Jawa Tengah bersumber dari minyak bumi yang mencapai 58,58% dan batu bara sebesar 20,94%. Hal ini dikarenakan lokasi Provinsi Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa dan menjadi penghubung antara Jawa Timur dan Jawa Barat sehingga konsumsi minyak bumi terutama BBM tergolong tinggi yang digunakan untuk alat transportasi.

Transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan terus didorong realisasinya melalui adanya Perda RUED Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018. Dalam perda tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah menargetkan persentase EBT dalam bauran energi sebesar 21,32% tahun

2025 dan 28,82% pada tahun 2050. Dalam pelaksanaannya, meskipun penggunaan energi fosil masih relatif tinggi di Jawa Tengah, namun pemanfaatan EBT terus menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Persentase pemanfaatan EBT dalam bauran energi, hingga tahun 2023 telah mencapai 15,98% dari kondisi awal pada tahun 2014 sebesar 7,01%. Energi baru terbarukan yang dikembangkan di Jawa Tengah antara lain biodiesel, biomassa, PLTA, PLTP dan PLTS.

Perkembangan pemanfaatan EBT dalam kurun lima tahun terakhir (tahun 2019-2023) disajikan dalam Gambar 2.44 berikut.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 44 Timeline Capaian Bauran EBT di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

C. Tantangan

Tantangan ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi distribusinya dan keberlanjutan dari sisi produksi energi listriknya. Permasalahan konsumsi listrik per kapita di Jawa Tengah adalah pada sisi demand. Kondisi saat ini konsumsi listrik per kapita di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Konsumsi listrik di Jawa Tengah sebesar 745,59 kWh/kapita pada 2022, Jawa Timur sebesar 907 kWh/kapita, Jawa Barat sudah mencapai 1.012 kWh/kapita, dan DKI Jakarta telah mencapai 3.248 kWh/kapita. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan, utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif.

Tantangan lain bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu untuk terus tetap mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan, yaitu EBT, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, *waste to energy* (biomassa), gas rawa, dan panas bumi.

2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua

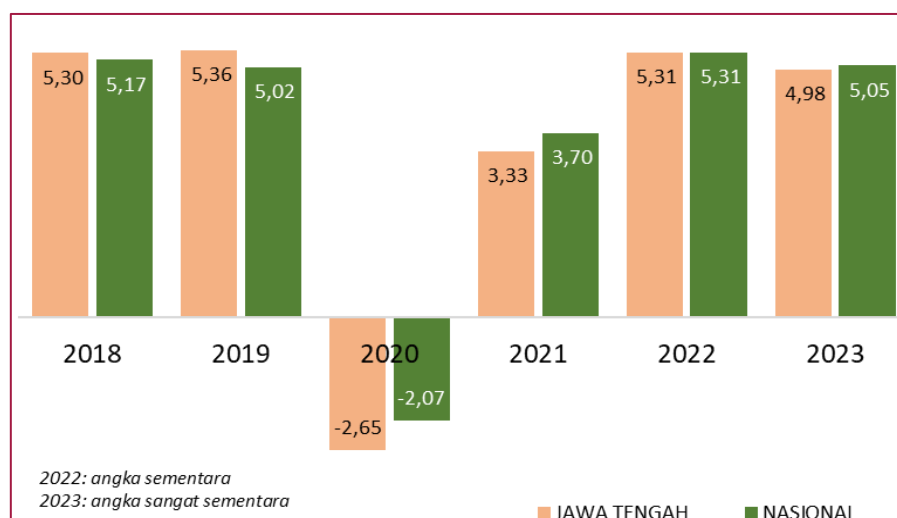
A. Pengantar

Tujuan 8 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan berfokus pada (1) mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita, (2) menciptakan tingkat produktivitas yang lebih tinggi, (3) penciptaan lapangan kerja yang layak, (4) pekerjaan layak yang inklusif, (5) mengurangi angka NEET, (6) mengurangi proporsi pekerja anak, (7) menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk semua pekerja dan (8) mempromosikan pariwisata berkelanjutan.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

1) Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan PDRBnya. Sempat mengalami distraksi saat pandemi Cov-19 di tahun 2020 hingga mencapai -2 persen, namun pertumbuhan ekonomi baik Nasional dan Jawa Tengah mampu pulih lebih cepat pada tahun-tahun berikutnya. Pulihnya kinerja perekonomian Jawa Tengah terpantau masih berada di bawah kinerja Nasional pada tahun 2021 dan tahun 2023 (Gambar 2.45).

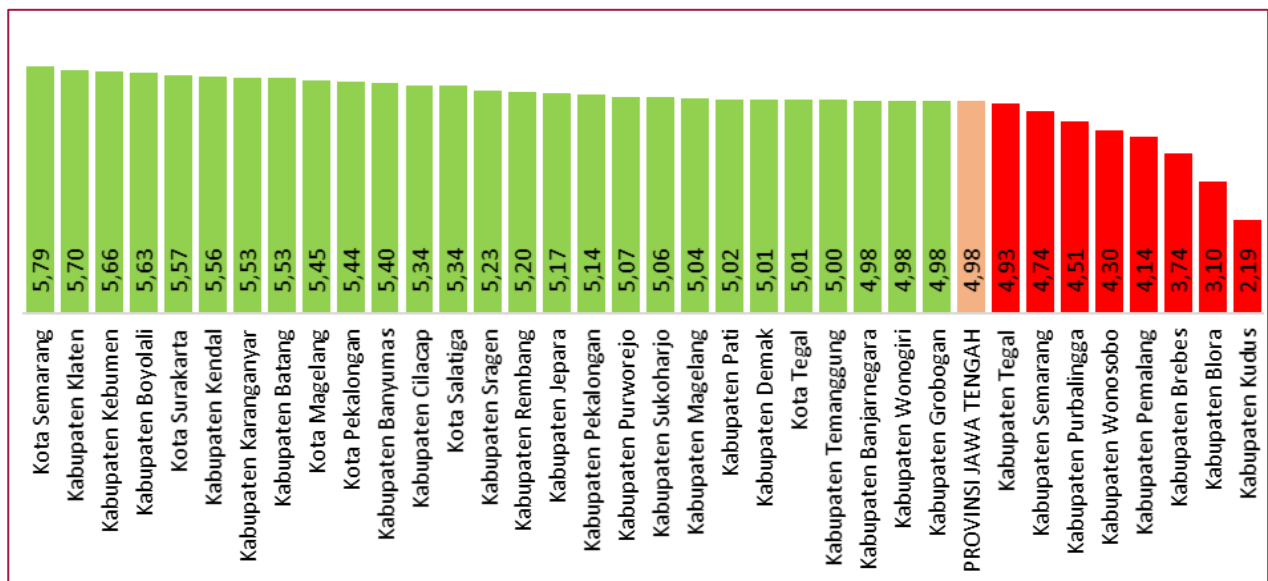


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 45 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Persen)

Pulihnya kinerja perekonomian Jawa Tengah tidak terlepas dari membaiknya perekonomian 35 Kabupaten/Kota. Berdasarkan capaian kinerja perekonomian tahun 2023, terdapat 8 Kabupaten yang berada di bawah angka provinsi (Gambar 2.44) Dari 8 Kabupaten tersebut, 5 Kabupaten di antaranya konsisten berada di bawah angka provinsi sejak tahun 2022 (kondisi *New Normal* atau pasca Covid-19) yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Blora dan Kabupaten Kudus. Namun, 2 dari 5 Kabupaten tersebut yaitu

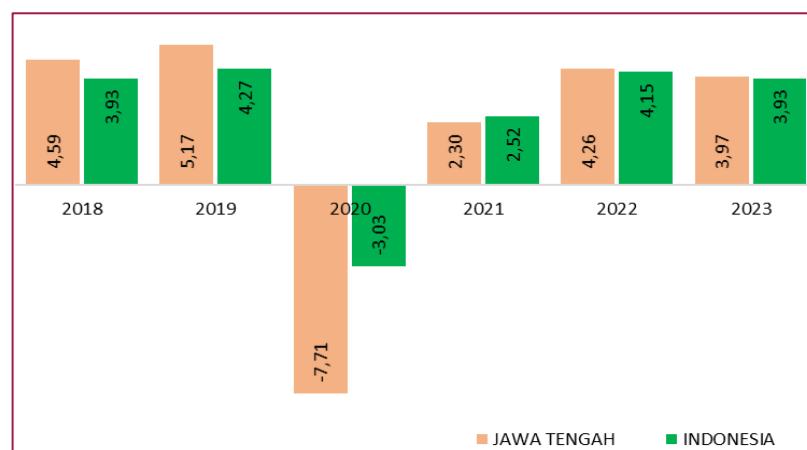
Kabupaten Blora dan Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2018-2023) capaian kinerja perekonomiannya konsisten berada di bawah angka provinsi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 46 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 (Persen)

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, maka kinerja perekonomian dapat pula diukur dari laju pertumbuhan PDRB perkapitanya. Hal tersebut mampu menunjukkan perubahan standar kehidupan rata-rata penduduk, karena peningkatan nilai PDRB diharapkan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kinerja laju pertumbuhan PDRB perkapita Jawa Tengah sejalan dengan kinerja laju pertumbuhan PDRBnya. Standar kehidupan rata-rata penduduk di Jawa Tengah tercatat masih di bawah angka Nasional pada tahun 2023 (Gambar 2.47).

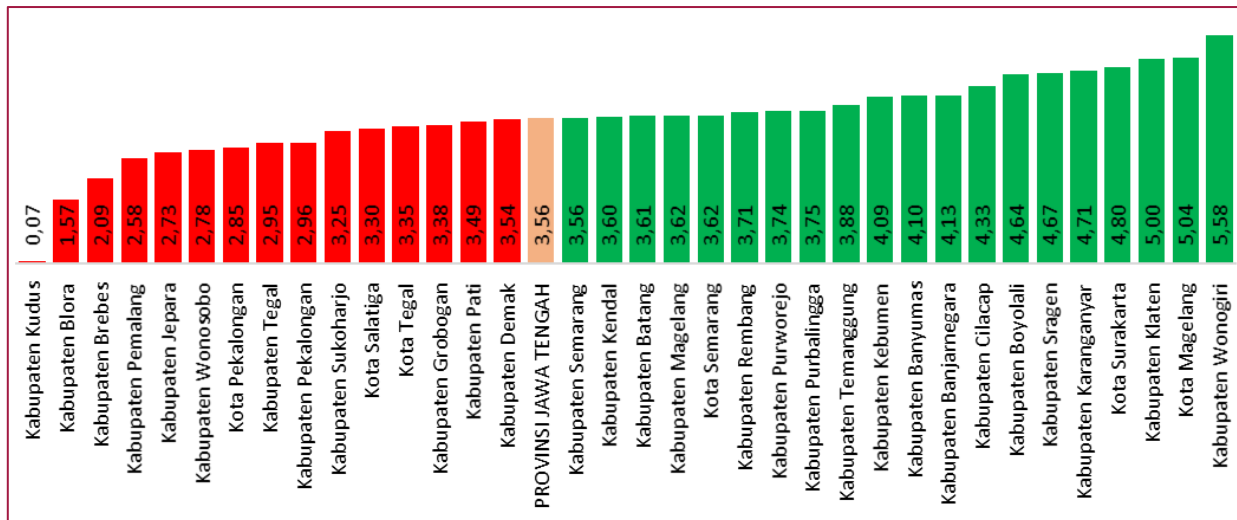


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 47 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 (Persen)

Sedikit berbeda dengan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota (Gambar 2.48), Kabupaten Tegal dan Kabupaten Semarang meski memiliki angka pertumbuhan

ekonomi yang lebih rendah dibandingkan provinsi namun ke dua wilayah tersebut memiliki pertumbuhan standar kehidupan rata-rata penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan provinsi di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk pada ke dua wilayah tersebut masih lebih rendah dibandingkan peningkatan PDRBnya, sehingga penduduk pada ke dua wilayah tersebut mampu memiliki standar kehidupan yang lebih tinggi meski pertumbuhan PDRBnya termasuk yang terendah.

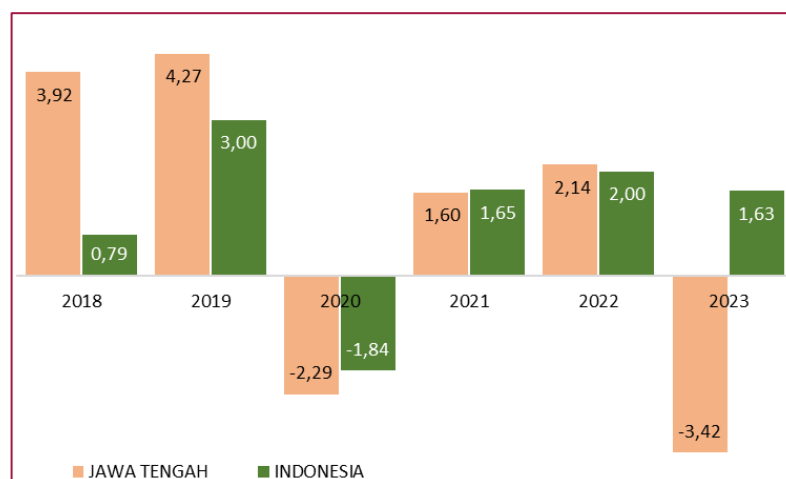


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 2. 48 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2023 (Persen)

2) Produktivitas Ekonomi

Goals ke 8 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Guna melihat tingkat produktivitas tenaga kerja suatu wilayah maka dapat digunakan tingkat pertumbuhan riil per orang bekerja dalam periode waktu tertentu. Pada tahun 2023, tingkat pertumbuhan riil per orang bekerja di Jawa Tengah terdistraksi cukup dalam bahkan lebih tinggi dibandingkan masa pandemi Covid-19. Penurunan tersebut diindikasikan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada beberapa sektor dengan tingkat produktivitas rendah, seperti sektor jasa. Hal tersebut sinkron dengan karakteristik tenaga kerja berdasarkan pendidikan di Jawa Tengah yang masih didominasi oleh pendidikan menengah ke bawah. Konsisten dengan kondisi $y-t-y$ (Agustus 2022-Agustus 2023) proporsi daya serap tenaga kerja sektor formal yang juga menunjukkan penurunan (39,61% dari 39,84%), berbanding terbalik dengan serapan sektor non-formal (60,39% dari 60,16%).

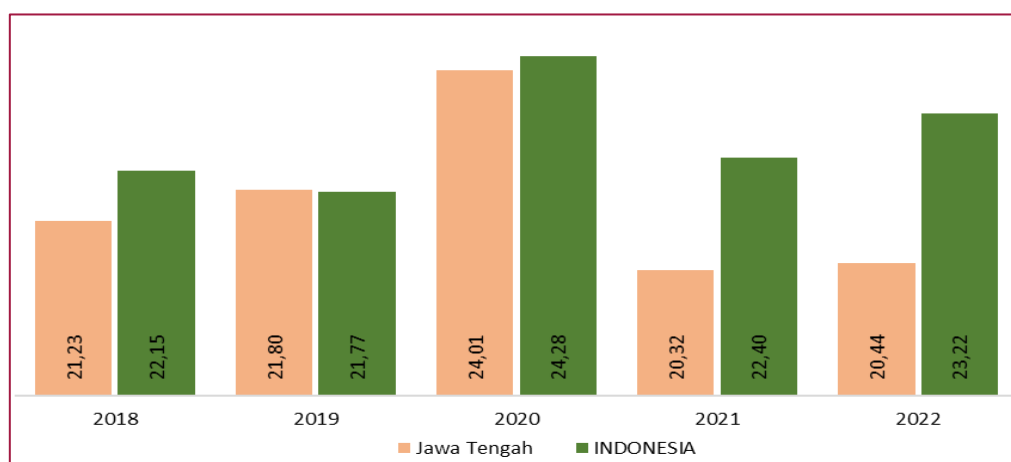


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 49 Tingkat Pertumbuhan Riil per Orang Bekerja Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 (Persen)

3) Pekerjaan Tetap dan Produktif

Melihat keaktifan penduduk usia produktif di Jawa Tengah, proporsi penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak bersekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) di Jawa Tengah cenderung lebih rendah dibandingkan angka nasional. Namun, pada tahun terakhir (2022) angka NEET Jawa Tengah mengalami peningkatan meski tidak signifikan dengan peningkatan angka nasional. Meski NEET Jawa Tengah jauh di bawah angka nasional, akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa ± 20 persen penduduk usia 15-24 tahun di Jawa Tengah kurang berpartisipasi dalam mendukung perekonomian Jawa Tengah.

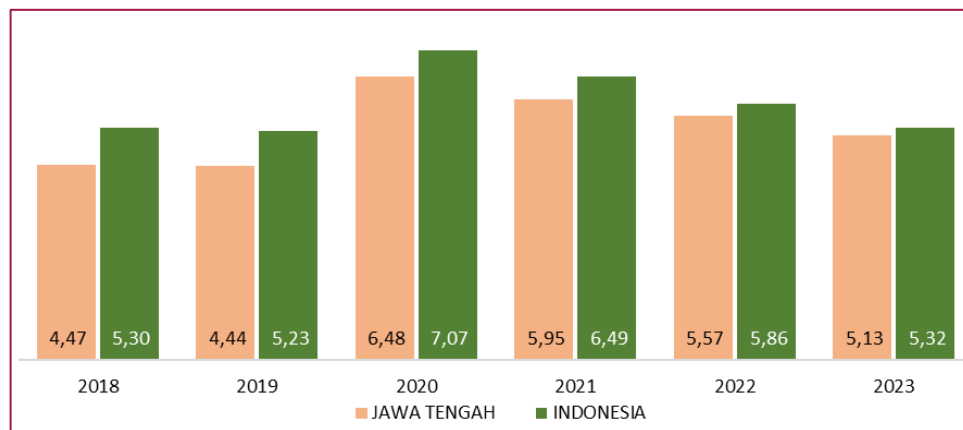


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 50 NEET Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen)

Meski NEET Jawa Tengah turun sangat tajam pada tahun 2021-2022, namun angka pengangguran Jawa Tengah yang ditunjukkan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan yang cukup lambat dan masih relatif lebih tinggi dibandingkan capaian sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan karakteristiknya, pengangguran dengan lulusan pendidikan dasar ke bawah cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2022.

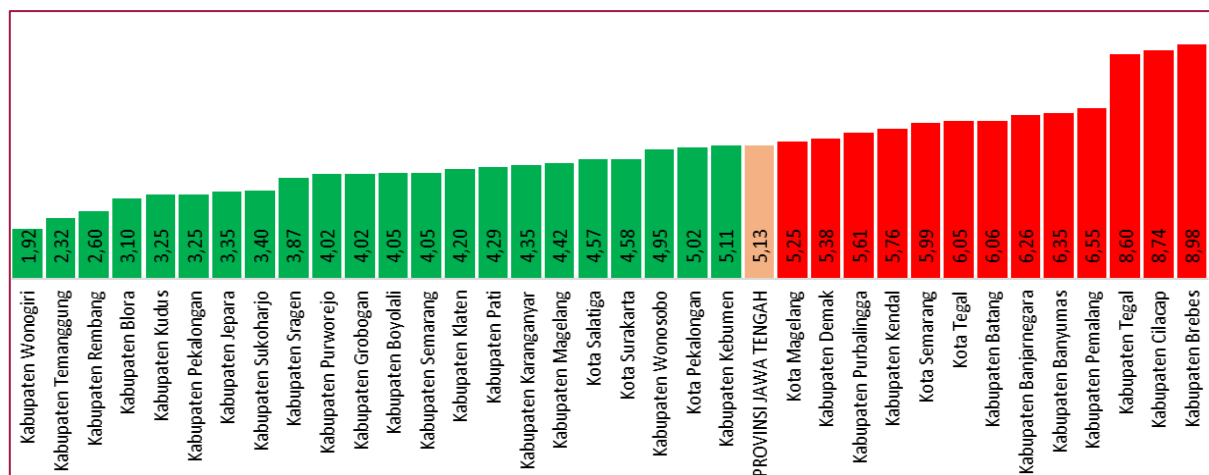
Sementara itu, pengangguran dengan tingkat lulusan pendidikan menengah dan tinggi justru berkinerja baik dan menurun perlahan hingga tahun 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 51 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 (Persen)

TPT pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2023 menunjukkan 13 Kabupaten/Kota memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan angka provinsi. Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Tegal dalam 6 tahun ke belakang (2018-2023) masih konsisten berada dalam 5 besar Kabupaten/Kota yang memiliki nilai TPT tertinggi, dengan gap ke tiga wilayah tersebut terhadap capaian Jawa Tengah cukup jauh, yakni 3 sampai 4 poin. Hal tersebut didukung dengan dominasi pengangguran pada tingkat lulusan pendidikan menengah pada ke-3 wilayah tersebut yang juga termasuk dalam 5 besar Kabupaten/Kota tertinggi di Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 52 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023 (Persen)

C. Tantangan

Tantangan untuk menjawab pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah salah satunya adalah pertumbuhan penduduk usia produktif yang harus berjalan paralel dengan peningkatan kualitasnya, dan serapan penduduk usia produktif di pasar tenaga kerja.

Selain dari sisi demand, tantangan pemerintah dalam menjaga supply untuk mengarahkan investasi masuk di Jawa Tengah ke arah industri hijau guna pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga perlu menjadi perhatian.

Tantangan lainnya, masih besarnya peran sektor informal dalam perekonomian Jawa Tengah sehingga cukup dominan menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi rendah. Dominasi tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi rata-rata pendidikan terakhir penduduk di Jawa Tengah.

2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

A. Pengantar

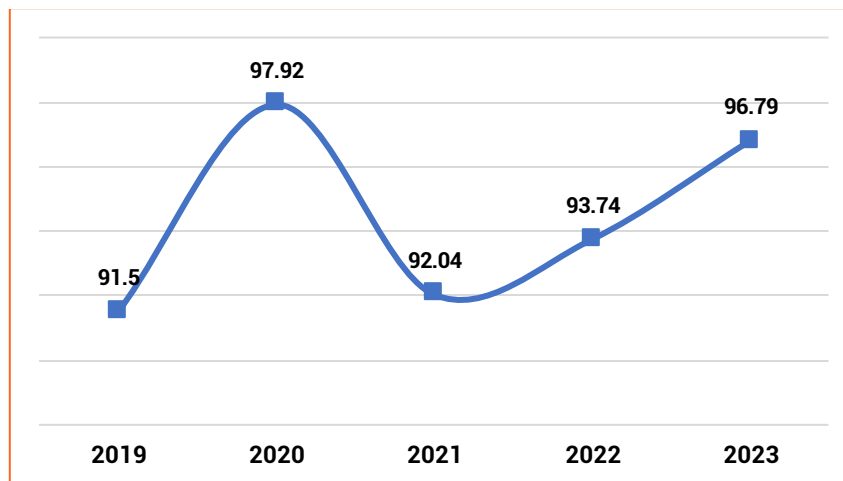
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 9 merupakan tujuan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang andal dan tangguh, peningkatan industri inklusif serta upaya mendorong inovasi. Pembahasan Tujuan 9 mencakup 4 (empat) isu utama yaitu: (a) pengembangan infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan tangguh; (b) promosi industrialisasi inklusif dan berkelanjutan; (c) pemanfaatan teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan; dan (d) peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dalam periode lima tahun terakhir (2019-2023) indikator TPB/SDGs tujuan 9 secara capaian terus menunjukkan peningkatan dan kemajuan yang baik setiap tahunnya. Meskipun begitu, terdapat pula indikator yang harus dilakukan upaya percepatan.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

1) Pengembangan Infrastruktur yang Berkualitas dan Andal

Kondisi mantap jalan nasional didefinisikan sebagai proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Pada tahun 2023, panjang jalan nasional di Jawa Tengah yaitu 1.581,45 km, dengan kondisi mantap mencapai 1.530,63 km atau sebesar 96,79%. Sedangkan jalan dengan kondisi tidak mantap mencapai 50,82 km atau 3,21%. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 2.53).

Sebagian besar jalan di Provinsi Jawa Tengah (87,12 persen) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan sisanya merupakan kewenangan Nasional (4,99 persen). Sedangkan panjang jalan di Jawa Tengah yang menjadi kewenangan provinsi sebesar 7,88 persen dari total panjang jalan di Jawa Tengah atau sepanjang 2.404,74 km. Kondisi jalan kewenangan provinsi yang telah sesuai standar yaitu sepanjang 954,201 km atau 39,68 persen.



Tahun	Panjang Jalan (km)	Kondisi Mantap (km)
2019	1789.2	1741.78
2020	1518.08	1486.41
2021	1518.09	1398.01
2022	1518.09	1423.02
2023	1581.45	1530.63

Sumber: Kementerian PUPR, 2024

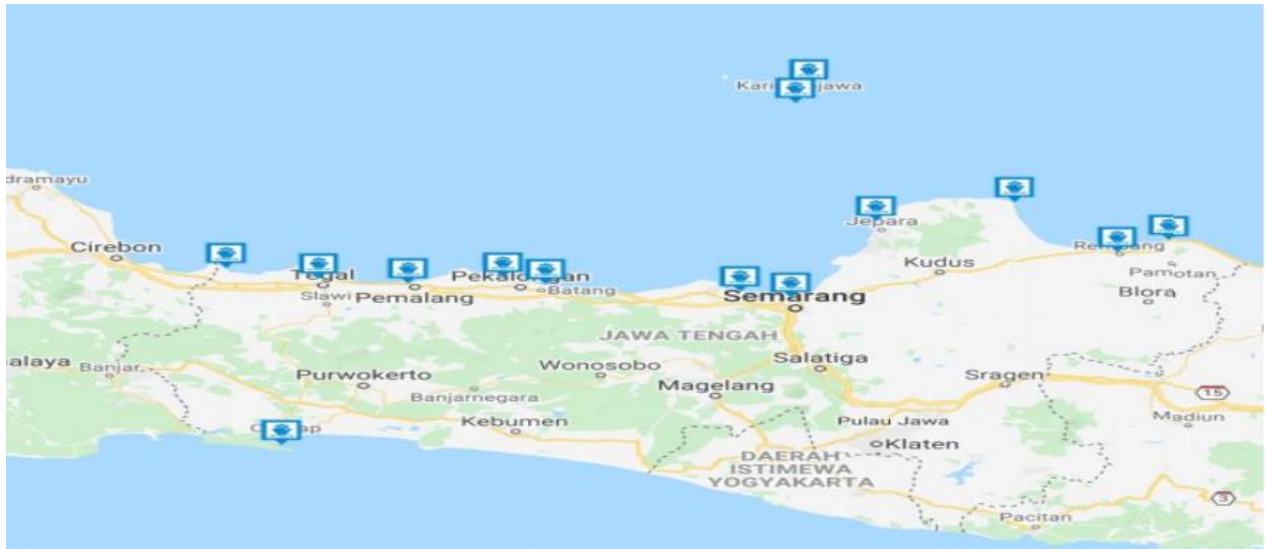
Gambar 2. 53 Persentase Kondisi Mantap Jalan Nasional Jawa Tengah Th. 2019-2023 (Persen)

Dari sisi infrastruktur transportasi udara, Jawa Tengah memiliki 6 bandara yang melayani penerbangan komersial yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Bandara Tunggul Wulung Cilacap, Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga, Bandara Ngloram Cepu, serta Bandara Dewadaru Jepara. Bandara Soedirman Purbalingga (Wirasaba) dan Bandara Ngloram Blora merupakan dua bandara baru yang diresmikan pada tahun 2021 sebagai bandara komersial dengan kapasitas kurang lebih 200.000 penumpang per tahun.

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Karimunjawa, telah dikembangkan Bandara Dewadaru untuk memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara terkait dengan kepariwisataan. Sedangkan untuk mendukung pengembangan Jawa Tengah khususnya di wilayah timur maka dilakukan pengembangan Bandara Ngloram Kabupaten Blora. Sementara Bandara Tunggul Wulung Cilacap dominan digunakan sebagai sarana pendidikan sekolah penerbangan. Dikarenakan Bandara Tunggul Wulung Cilacap sulit untuk dikembangkan, maka untuk mendukung pengembangan wilayah tengah dan selatan, dilakukan pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) di Kabupaten Purbalingga dalam rangka pemerataan pembangunan.

Adapun untuk menunjang transportasi laut, terdapat 36 dermaga penyeberangan yang dioperasikan di Jawa Tengah, yaitu Pelabuhan Kendal, Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Karimunjawa, (Cilacap di Sleko, Prenca, Alas Malang, Motehan, Sodong, Wijayapura, Lomanis, Cigintung, Perkuyan, Kutawaru, Klaces, Patimuan, Karanganyar), Waduk Gajah Mungkur di Dermaga wisata Waduk GM, Waduk Sempor, Waduk Mrica, Waduk Penjalin, Waduk Malahayu,

(Wadaslintang di Dermaga Tritis, Kumijing, Plunjaran, Kalibening TPI2, TPI4, Sumberejo, Prasasti (Kebumen), Erorejo), (Kedung Ombo di Kedunguter Sragen, Kemukus Sragen, WKO Boyolayar Sragen, Embun Bening Kec. Geyer Kab. Grobogan, Wana Wisata desa Blawong Kemusu Boyolali), Lutungmati (Batang), Tegalsari (Kendal), Mundu (Batang), Jatipurwo (Kendal), Tegalwangi (Brebes), Bojong (Kab.Tegal), Randusangawetan (Brebes), Kajongan (Kota Tegal), Beton (Kota Surakarta), Gading (Sukoharjo).



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 54 Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah

Pelabuhan di Jawa Tengah terdiri dari satu pelabuhan utama (Tanjung Emas Semarang), dua pelabuhan pengumpul (Tanjung Intan Cilacap, dan Tegal), delapan pelabuhan pengumpan regional (Batang, Kendal, Jepara, Legok Bajak, Karimunjawa, Juwana, Tasik Agung dan Sluke), dan tiga pelabuhan lokal (Brebes, Pekalongan dan Pemalang). Secara umum, kondisi pelabuhan pengumpul regional sebagai berikut: 1) Pelabuhan Juwana berada pada alur sungai; 2) Pelabuhan Tasik Agung tidak ada aktivitas karena di dasar kolam terdapat karang hidup; 3) Pelabuhan Batang dan Kendal kedalaman kolam dan alur pelayarannya tidak ideal karena sedimentasi; 4) Pelabuhan Kendal terdapat usulan untuk menjadi satu kesatuan dengan Pelabuhan Tanjung Emas; dan 5) Pelabuhan Jepara, Legonbajak, Karimunjawa dan Sluke secara fisik masih dalam kondisi yang cukup baik.

2) Proporsi Industri dalam Lapangan Kerja dan PDRB

Selama periode 2019 hingga 2023, struktur perekonomian Jawa Tengah tidak mengalami perubahan yang berarti. Distribusi PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2023, kategori industri pengolahan/manufaktur masih menjadi penopang utama dengan total

kontribusi sebesar 34,03 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 33,93 persen.

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur pada tahun 2023 menunjukkan progres positif di masa pasca Pandemi Covid-19 ini. Capaian laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur sebesar 4,31 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,88 persen.

3) Pemanfaatan Teknologi dan Proses Industri Bersih dan Ramah Lingkungan

Penghitungan Rasio emisi CO₂/dengan nilai tambah sektor industri manufaktur mencakup emisi dari sektor IPPU (*Industrial Processing and Product Use*). Tahun 2022, rasio emisi CO₂/dengan nilai tambah sektor industri manufaktur mencapai 14 persen, menjadi capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut diindikasikan sebagai dampak dari semakin berkembangnya industri manufaktur di Jawa Tengah.

C. Tantangan

Industri memiliki peranan yang sangat penting sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor ekonomi yang memberikan sumbangsih dan kontribusi terbesar pada ekonomi Jawa Tengah. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi kontribusi sektor industri pengolahan, antara lain, belum optimalnya produksi industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah. Sektor lain yaitu usaha kecil dan menengah, serta koperasi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB Jawa Tengah. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah antara lain: belum optimalnya omzet usaha kecil dan menengah serta belum optimalnya tingkat kesehatan koperasi.

Ketersediaan infrastruktur menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan infrastruktur adalah masih adanya jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana. Kualitas pelayanan transportasi

juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi juga masih diperlukan utamanya peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi dalam mendukung pengurangan tingkat kecelakaan. Peningkatan kualitas layanan angkutan umum juga masih diperlukan terutama peningkatan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi serta integrasi antarmoda yang secara bertahap harus dipenuhi.

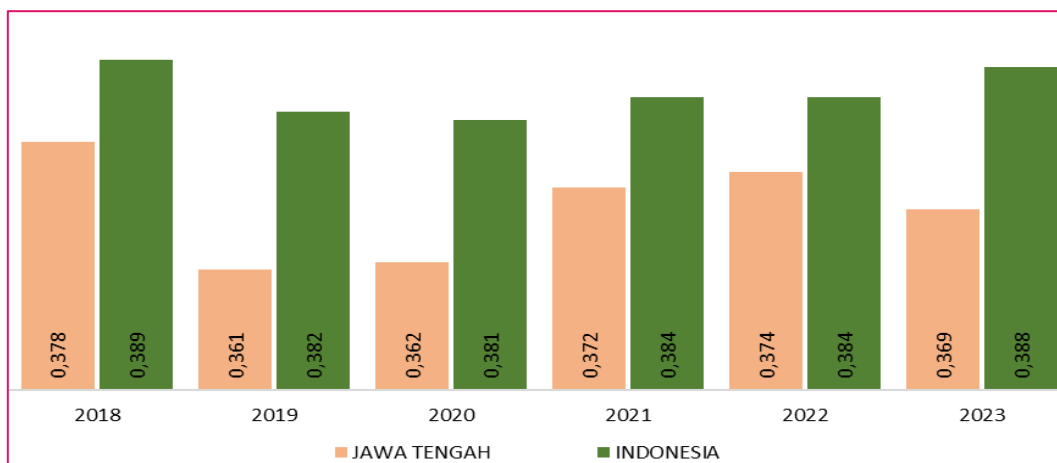
2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

A. Pengantar

Tujuan 10 dalam TPB yang berfokus pada pengurangan kesenjangan intra dan antar negara, dengan beberapa target pencapaian antara lain: (1) mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi, (2) memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik, (3) menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, dan (4) mengadopsi kebijakan (fiskal, upah dan perlindungan sosial) serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

Salah satu ukuran untuk mengukur kesenjangan dalam wilayah adalah melalui rasio gini. Semakin tingginya angka gini rasio menunjukkan ketimpangan yang mendekati sempurna. Angka rasio gini Jawa Tengah meski cenderung meningkat selama pandemi hingga pasca pandemi namun masih berada di bawah angka nasional. Meningkatnya rasio gini Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2022 (pandemi Covid-19) yang menyebabkan lambatnya perekonomian sehingga masyarakat berpenghasilan rendah/rentan miskin akan terdampak lebih banyak dibandingkan masyarakat berpenghasilan tinggi di Jawa Tengah. Rasio gini Jawa Tengah membaik pada tahun terakhir (2023) seiring dengan membaiknya perekonomian yang juga dirasakan oleh masyarakat rentan miskin. Berdasarkan karakteristik wilayahnya menunjukkan bahwa ketimpangan daerah perkotaan di Jawa Tengah masih relatif tinggi dan cenderung meningkat secara perlahan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 55 Rasio Gini Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Kinerja rasio gini 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat 12 Kabupaten/Kota yang memiliki angka rasio gini lebih tinggi dari angka provinsi. Tingginya ketimpangan pada daerah perkotaan juga ditunjukkan pada Gambar 2.56, bahwa 5 dari 6 kota di Jawa Tengah memiliki ketimpangan yang relatif lebih tinggi dari angka provinsi. Terkendalnya angka rasio gini Jawa Tengah didukung oleh penurunan ketimpangan pada beberapa Kabupaten/Kota, seperti Kabupaten Pati, Kota Surakarta, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga dan Kota Semarang, meski beberapa daerah perkotaan masih memiliki ketimpangan yang cukup tinggi.

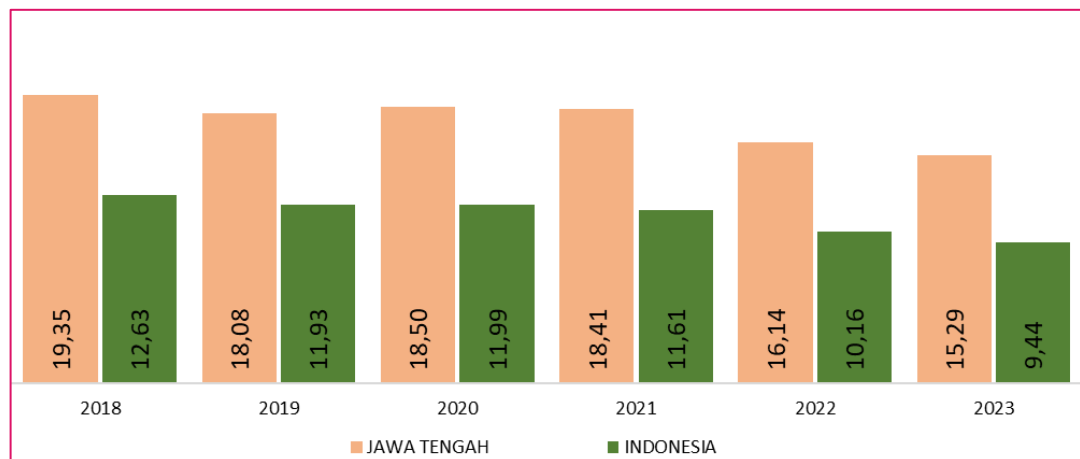


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 56 Rasio Gini Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

Ketimpangan dan kemiskinan merupakan dua hal penting yang beriringan namun kinerja ke duanya jauh berbeda. Tahun 2019, ketimpangan Jawa Tengah mampu turun cukup tajam namun pada tahun yang sama penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan di Jawa Tengah justru turun melambat. Hingga pasca Cov-19, penurunan proporsi penduduk di bawah

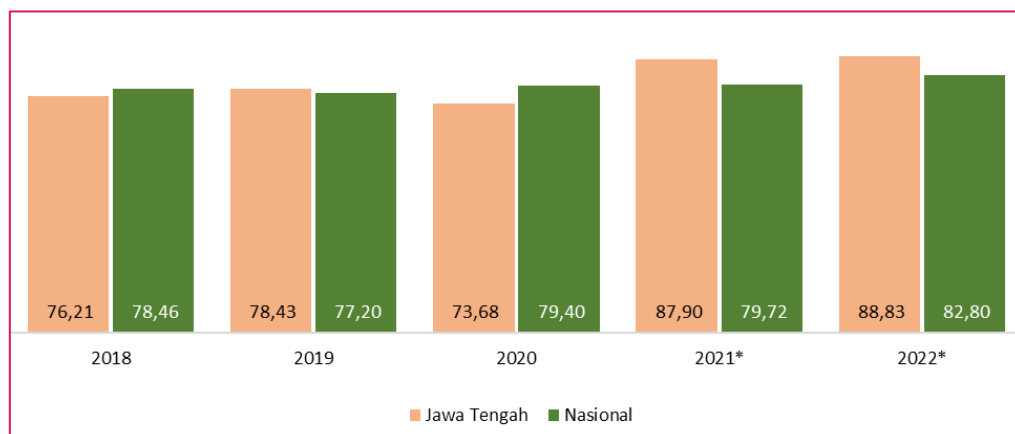
50% dari median pendapatan di Jawa Tengah masih cukup lambat, berbeda dengan angka nasional yang mampu turun hingga single digit pada tahun 2023.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 57 Proporsi Penduduk yang hidup di bawah 50% dari Median Pendapatan Jawa Tengah dan Nasional Th. 2018-2023 (Persen)

Kesenjangan juga dapat disebabkan karena kesempatan yang dimiliki setiap orang tidak sama. Salah satu ukurannya dengan melihat komposit pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu aspek kebebasan sipil, sebagai salah satu inti dari konsepsi demokrasi. Menggunakan metode perhitungan lama (2018-2020), aspek kebebasan sipil di Jawa Tengah cenderung berada di bawah angka nasional. Namun, dengan metode perhitungan baru menunjukkan bahwa kebebasan sipil di Jawa Tengah mampu melebihi angka nasional.



Keterangan: *) berdasarkan metode baru

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2. 58 Aspek Kebebasan Sipil Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

C. Tantangan

Ketimpangan dapat terjadi karena salah satu faktor seperti prioritas pembangunan lebih aktif di wilayah perkotaan sedangkan wilayah pedesaan jarang tersentuh. Dengan adanya perbedaan pembangunan dan infrastruktur juga berdampak terhadap perbedaan pendapatan masyarakat

baik yang ada di kota maupun di daerah. Ini menjadi salah satu masalah kompleks yang dihadapi dalam proses pembangunan suatu wilayah yaitu ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Provinsi Jawa Tengah juga tidak terlepas dari permasalahan ketimpangan wilayah atau kesenjangan distribusi pendapatan antar wilayah. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat namun di beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Apabila diukur dengan menggunakan Indeks Williamson, ketimpangan pembangunan antar wilayah di Jawa Tengah masih tergolong ketidakmerataan tinggi. Ketimpangan ini terjadi karena masing-masing kabupaten/kota memiliki sumber daya alam dan infrastruktur yang berbeda-beda dimana hal tersebut menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah yang memilikinya.

Sebagai contoh, seperti Kabupaten Kudus yang memiliki sejumlah perusahaan besar nasional yang beroperasi di daerah tersebut. Kota Semarang memiliki berbagai fasilitas seperti pelabuhan antar pulau dan bandara internasional, sehingga menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah. Disisi lain Kabupaten Grobogan mempunyai PDRB per kapita terendah. Sektor yang berkontribusi menopang perekonomiannya adalah pertanian. Ini merupakan usaha keras pemerintah untuk menciptakan iklim kondusif bagi penanam modal di dalam maupun modal asing untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan lebih menggali lagi potensi pertanian yang bisa menjadi produk unggulan dari Kabupaten Grobogan sehingga bisa menambah nilai tambah bruto wilayah tersebut. Dengan bertambahnya nilai tambah bruto tersebut akan menekan ketimpangan di Jawa Tengah.

2.11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

A. Pengantar

Kota dan permukiman memiliki peran penting dalam menjamin kualitas kehidupan manusia. Terlebih saat ini sudah lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di kota dan kawasan perkotaan. Kota tidak hanya menjadi habitat bagi manusia dan beragam keanekaragaman hayati lainnya, tetapi juga sebagai sarana bertransaksi ekonomi, interaksi sosial, serta penjagaan ekosistem alam secara berkelanjutan. Di samping itu, dengan konsentrasi penduduk yang begitu besar dan dengan berbagai latar belakang, kota menawarkan beragam peluang bagi penduduknya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi baru.

Tujuan 11 adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan, dengan target untuk perumahan yang layak, sistem transportasi, dan resiko bencana. Pencapaian target tujuan 11 Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada: (1) Peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau; (2) Pengguna moda transportasi umum; (3) Urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan; (4) Menjaga warisan budaya dan alam; (5) Pengurangan resiko bencana dan dampak lingkungan perkotaan; (6) Penyediaan ruang publik

dan RTH yang aman, inklusif & mudah dijangkau; dan (7) Perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

1) Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, selain berfungsi sebagai tempat tinggal rumah juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar, berkumpul dan tempat untuk saling berinteraksi antara anggota keluarga. Rumah menjadi hak dasar yang harus dipenuhi sesuai kriteria standar agak layak untuk dihuni.

Program pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berdampak pada terpenuhinya kebutuhan dasar hunian, namun juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakatnya secara berkelanjutan. Kualitas rumah yang baik sebagai tempat tinggal dapat memberikan pengaruh positif pada psikologis dan Kesehatan penghuni rumah. Kondisi ini akan mempengaruhi peningkatan produktivitas penghuni rumah tangga. Hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m², memiliki akses air minum dan akses sanitasi layak. Indikator ini digunakan untuk memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.

Tabel II. 7 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

TAHUN	SUMBER PEMBIAYAAN				PENANGANAN MELALUI PENGANGGARAN (UNIT)	VERIVALI LAPANGAN
	APBN	APBD PROV.	APBD KAB/KOTA	CSR & SWADAYA		
2019	36.725	23.208	26.651	15.986	102.570	
2020	48.809	10.298	12.855	3.268	75.230	
2021	32.623	11.293	11.370	1.593	56.879	397.572
2022	35.771	11.487	12.714	2.659	62.631	231.279
2023	26.542	16.592	12.229	2.610	68.006	372.771
Total	180.470	72.878	75.819	26.116	365.316	1.001.622

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2023

Beberapa isu strategis sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang diampu oleh urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang harus ditangani adalah berikut: Berdasarkan data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 dan pertumbuhan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari tahun 2018-2023 masih ada sekitar 1.000.309 Unit RTLH yang tersebar di Jawa Tengah; Masih tingginya angka backlog rumah di Jawa Tengah yaitu sampai akhir tahun 2023 backlog keberpenghunian sebanyak 309.768 Unit; Perumahan pasca bencana yang belum tertangani sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 7 Unit dari target; penyelenggaraan padat karya sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan pada akhir tahun 2023 sisa Kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 287,18 Ha.

Penanganan RTLH dilakukan dengan dua cara yaitu bantuan stimulan material dan usulan atas kondisi rumah berdasar data yang masuk. Total bantuan stimulan RTLH dari sumber anggaran APBN sampai dengan 2023 sebanyak 226.779 unit, sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 26.542 unit. Total bantuan stimulan RTLH dari sumber anggaran APBD Provinsi sampai dengan 2023 sebanyak 125.568 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 16.592 unit. Total penanganan RTLH dari sumber anggaran APBD Kabupaten/ Kota sampai dengan 2023 sebanyak 89.089 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 12.229 unit. Total penanganan RTLH dari sumber anggaran CSR/BAZNAS/Lainnya sampai dengan 2023 sebanyak 49.412 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 2.610 unit. Total penanganan RTLH dari verifikasi lapangan sampai dengan akhir Tahun 2023 sebanyak 1.157.789 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 372.771 unit.

2) Moda Transportasi Umum

Peningkatan layanan angkutan umum penumpang di perkotaan perlu ditingkatkan kenyamanan, kehandalan serta keamanannya. Salah satu upaya yang ditempuh dengan pengembangan transportasi massal perkotaan pada wilayah aglomerasi. Terminal penumpang di Jawa Tengah pada tahun 2023 sejumlah 221 terminal yang terdiri dari 19 terminal tipe A (kewenangan pusat), 24 terminal tipe B (kewenangan provinsi) dan 178 terminal tipe C (kewenangan kabupaten/kota).

Tabel II. 8 Jumlah Terminal Penumpang di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Jumlah Terminal dan Kewenangannya	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terminal tipe A (Pusat)	17	19	19	19	19
2.	Terminal tipe B (Provinsi)	24	24	24	24	24
3.	Terminal tipe C (Kabupaten/Kota)	178	178	178	178	178
Total Terminal di Jawa Tengah		118	219	221	221	221

Sumber : Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Bappeda Kab./Kota, 2024

Jumlah kendaraan masuk ke terminal tipe B semakin meningkat dalam 2 tahun terakhir, dan masih didominasi oleh bis besar yang merupakan armada Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan juga Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Tabel II. 9 Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No.	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bis Besar	479.583	202.640	149.252	271.242	264.998
2.	Bis Sedang	139.951	71.036	57.057	77.349	76.828
3.	Bis Kecil	73.979	64.756	34.883	58.901	56.000
4.	Mobil Penumpang Umum	45.521	39.846	21.365	45.254	48.280
Total		739.034	378.278	262.557	452.746	446.106

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jumlah armada angkutan umum mengalami penurunan dari tahun ke tahun, selain merupakan lanjutan dampak dari pandemi Covid-19 juga masyarakat lebih berminat menggunakan moda angkutan pribadi.

Tabel II. 10 Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	902	902	902	902	902
2.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	269	272	272	272	272
3.	Angkutan wisata (kendaraan)	4.666	4.666	3.093	2.754	2.754
4.	Jumlah bus (unit)	12.737	12.737	12.737	10.825	6.881
5.	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan diperlukan peningkatan cakupan wilayah yang terlayani koridor Trans Jateng untuk memudahkan penumpang naik dan turun. Pemenuhan kebutuhan halte Trans Jateng dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masih belum optimal, masih ada 36,70% yang belum terbangun.

Tabel II. 11 Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2023

Koridor Trans Jateng	Inventarisasi Halte			
	Kebutuhan	Terbangun		Belum Terbangun*
		Aset Pemrov	Aset Kab/Kota/Swasta	
Kota Semarang – Bawen	94	40	52	2
Purwokerto – Purbalingga	62	60	2	0
Kota Semarang – Weleri	53	40	13	0
Kab. Magelang – Kutoarjo	49	38	0	11
Surakarta – Sumberlawang	85	17	5	63
Kota Semarang – Grobogan	69	20	0	49
Surakarta – Wonogiri	122	12	41	69
Total	534	226	112	196

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Catatan : * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target 2030 = 32 persen). Pengguna transportasi umum diharapkan selalu meningkat seiring dengan peningkatan penumpang Trans Jateng.

Tabel II. 12 Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2017 – 2023

No	Wilayah Pengembangan / Koridor Trans Jateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)						Total 2017-2023
		2017 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Kedungsepur							
1.	T. Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)	2.611.014	2.117.390	1.054.091	1.136.921	1.686.921	1.954.632	10.560.969

Wilayah		Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)						
No	Pengembangan / Koridor TransJateng	2017 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total 2017-2023
2.	T. Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke Weleri (Agus. 2022)	-	178.943	592.411	682.477	1.235.294	1.479.581	4.168.706
3.	T. Penggaron – T. Godong – T. Gubug (Okt.2021)	-	-	-	133.380	774.188	925.977	1.833.545
	Barlingmascakeb							
4.	Purwokerto – Purbalingga (Agus. 2018)	351.896	1.141.126	613.804	673.120	1.261.351	1.344.065	5.385.362
	Subosukowonosraten							
5.	Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)	-	-	55.442	327.786	676.153	810.218	1.869.599
6.	Tirtonadi – Wonogiri (Agustus 2023)	-	-	-	-	-	471.794	471.794
	Purwomanggung							
7.	Kutoarjo – Borobudur (September 2020)	-	-	106.124	485.848	872.555	1.047.738	2.512.265
Total 7 Koridor		2.962.910	3.437.459	2.421.872	3.439.532	6.506.462	8.034.005	26.802.240

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

3) Pengurangan Risiko Bencana dan Dampak Lingkungan Perkotaan

Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi di Indonesia dengan ancaman bencana tinggi. Potensi ancaman yang ada di Jawa Tengah meliputi: 1) bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan; 2) bencana non-alam, yaitu epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi.

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2019-2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 1.356 kejadian di tahun 2019 menjadi 2.396 kejadian di tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 946 (data TW2). Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi tanah longsor, angin topan, banjir dan kebakaran. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,5 persen) dari total 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (24,9 persen) rawan tanah longsor.

Tabel II. 13 Jumlah Kejadian Bencana Alam di Jateng Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angin topan	706	629	439	671	115
2	Banjir	171	459	242	374	131
3	Gas beracun	0	2	0	0	0
4	Gempa bumi	5	2	5	4	12
5	Kebakaran	718	356	229	312	491
6	Kekeringan	30	0	0	0	34

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
7	Letusan gn.Api	2	12	5	1	8
8	Tanah longsor	18	387	0	1.010	126
9	Tsunami	0	0	0	0	0
10	Gelombang pasang	6	3	6	24	29
Jumlah		1.356	2.870	1.753	2.396	946

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data TWII Tahun 2023

Selama kurun waktu 2019-2023, kejadian bencana telah menimbulkan korban jiwa paling banyak diakibatkan oleh bencana tanah longsor. Pada tahun 2023 terdapat 8 orang meninggal dunia, 1 hilang, 20 luka berat dan 54 luka ringan.

Tabel II. 14 Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban (Orang)			
		Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2019	2.356	39	4	24	175
2020	2.909	32	3	15	91
2021	1.753	34	5	14	73
2022	2.440	22	2	27	100
2023	946	8	1	20	54
Jumlah		135	15	100	493

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Taksiran kerugian pada tahun 2019 hingga 2023 jumlah tingkat kerugian fluktuatif dan taksiran kerugian tertinggi terjadi akibat bencana Tanah longsor dengan kerugian di tahun 2023 Rp 2.473.680.000,- dan kerugian keseluruhan ditaksir sebesar Rp 6.276.980.000,-.

Tabel II. 15 Taksiran Kerugian Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Jenis Bencana	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)
1	Angin Topan	706	15.367.598	NA	5.469.095	437	4.288.779	671	6.267.966	115	1.585.200
2	Banjir	171	2.777.845		32.798.305	242	44.106.000	374	2.367.000	132	412.500
3	Tanah Longsor	718	9.354.277		16.806.207	740	7.098.159	1.010	7.052.281	126	2.473.680
4	Kekeringan	30	0		0	0	0	0	0	0	0
5	Kebakaran	718	55.387.150		18.779.138	229	52.965.785	312	217.955.599	491	690.600
6	Gempa Bumi	5	65.000		0	5	0	4	0	0	1.115.000
7	Letusan Gunung Api	2	0		0	5	0	1	0	0	0
8	Ombak Besar	6	0		0	6	45.000	24	25.000	0	0
9	Lainnya	-	-		0	46	131.687,50	44	581.000	0	0
Jumlah		2.356	82.951.870	2.870	73.582.747	1.753	108.823.410,5	2.440	234.248.846	946	6.276.980

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri

untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 189 desa, dari total seluruh desa/kelurahan sebanyak 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Tabel II. 16 Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk
2019	18	92 desa
2020	3	95 desa
2021	30	125 Desa
2022	7	132 Desa
2023	57	189 Desa

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Jumlah timbulan sampah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2019 sejumlah 5.604.080,65 ton/tahun menjadi 4,633,091.70 ton/tahun pada semester 1 tahun 2023. Jumlah timbulan sampah sebesar 4,633,091.70 ton/tahun dengan jumlah sampah yang dapat dikurangi sebesar 851,417.03 ton/tahun. Sedangkan sampah yang tertangani pada tahun 2023 (semester 1) baru mencakup 1,747,814.42 ton/tahun dengan total pengelolaan sampah sebanyak 2,599,231.45 ton/tahun atau sebesar 56.10 persen.

Tabel II. 17 Persentase Sampah yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023 (Data Semester 1)
1	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun)	5.604.080,65	6.055.617,05	6.152.654,76	6.363.805,99	4,633,091.70
2	Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun)	1.069.308,62	1.175.675,24	1.128.400,92	1.320.900,64	851,417.03
3	Jumlah sampah yang tertangani (Ton/tahun)	2.774.189,20	2.626.441,58	2.408.372,35	2.590.829,95	1,747,814.42
4	Total Pengelolaan Sampah	3.843.497,82	3.802.116,82	3.536.773	3.911.730,59	2,599,231.45
Persentase Pengelolaan Sampah (%)		68,58	62,79	57,48	61,47	56.10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Tengah ini selain karena jumlah timbulan yang semakin meningkat, jumlah TPA yang semakin sedikit, juga dikarenakan oleh banyaknya sarana prasarana pengolahan sampah yang kondisinya sudah rusak, sehingga kinerja pengelolaan sampah menjadi tidak optimal. Secara teknis, kondisi TPA di Jawa Tengah ini masih banyak yang menggunakan sistem open dumping. Biaya untuk beralih ke sistem sanitary landfill dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (teknologi RDF maupun Wasate to Energy) masih

cukup tinggi, sehingga alternatif paling mudah adalah pengelolaan sampah dengan sistem open dumping dan masih banyak ditemui masyarakat membakar maupun membuang sampah ke sungai.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019) yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan sistem persampahan terpadu yakni Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pelaksanaan pembangunan TPST Regional Magelang adalah penyusunan Feasibility Study (DLHK, 2019), penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL (DLHK, 2020), penyusunan DED (DLHK, 2021) dan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan, Feasibility Study jalan masuk, serta proses persiapan pengadaan tanah (DLHK, 2022), tahun 2023 proses pelaksanaan pengadaan tanah oleh Tim BPN serta proses pelepasan kawasan hutan (DLHK, Maret 2023), dan progres untuk 2024 adalah akses jalan masuk ke TPST (BMCK, 2024), pembentukan kelembagaan dan penyusunan DED landfill (DLHK, 2024), serta penyusunan kajian dampak negatif (DLH Kab. Magelang, 2024).

4) Ruang Publik dan RTH Yang Aman, Inklusif & Mudah Dijangkau

Dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen, pemerintah provinsi perlu melakukan upaya pendorongan untuk mewujudkan hal tersebut. Rata-rata luasan RTH publik di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 7,86 persen dari luas perkotaan di Jawa Tengah. Proporsi ini tentunya masih jauh dari angka sebagaimana yang diamanatkan.

Tabel II. 18 Rata-rata Luasan dan Persentase RTH di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah Th. 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Luas (Hektar)			Persentase		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kota Semarang	2.700,68	2.700,68	2.700,68	6,99%	6,99%	6,99%
2	Kab. Semarang	756,48	756,48	382,87	6,73%	6,73%	6,31%
3	Kota Salatiga	482,16	482,16	482,16	8,33%	8,33%	8,33%
4	Kab. Kendal	477,62	477,62	393,82	5,43%	5,43%	4,48%
5	Kab. Demak	392,02	392,02	311,56	5,49%	5,49%	4,37%
6	Kab. Grobogan	869,91	869,91	869,91	11,70%	11,70%	11,70%
7	Kab. Pati	615,39	615,39	352,47	5,66%	5,66%	3,88%
8	Kab. Kudus	1.036,77	1.036,77	1.036,77	9,92%	9,92%	9,92%
9	Kab. Jepara	449,05	468,35	468,35	4,72%	4,88%	4,88%
10	Kab. Blora	547,84	547,84	547,84	12,34%	12,34%	12,34%
11	Kab. Rembang	448,48	448,48	448,48	16,33%	16,33%	16,33%
12	Kab. Klaten	611,43	611,43	547,82	6,17%	6,17%	5,58%
13	Kab. Boyolali	114,44	195,68	195,68	3,20%	4,96%	4,96%
14	Kab. Wonogiri	357,85	357,85	316,59	5,80%	5,80%	7,24%
15	Kab. Sukoharjo	998,32	998,32	177,40	6,15%	6,15%	2,59%
16	Kab. Sragen	208,64	242	242	2,78%	5,57%	5,57%
17	Kota Surakarta	583,78	583,78	583,78	12,35%	12,35%	12,35%
18	Kab. Karanganyar	252,65	252,65	252,65	7,40%	7,40%	7,40%
19	Kab. Purworejo	524,41	524,41	524,41	7,30%	7,30%	7,30%
20	Kab. Temanggung	245,45	245,45	245,45	7,56%	7,56%	7,56%

No	Kabupaten/Kota	Luas (Hektar)			Persentase		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
21	Kab. Wonosobo	504,13	504,13	504,13	14,41%	14,41%	14,41%
22	Kab. Kebumen	1.434,68	1.434,68	1.434,68	11,00%	11,00%	11,00%
23	Kab. Magelang	543,62	1.055,54	1.055,54	3,47%	9,30%	9,30%
24	Kota Magelang	449,15	449,15	449,15	24,22%	24,22%	24,22%
25	Kab. Banjarnegara	403,23	403,23	403,23	10,03%	10,03%	10,03%
26	Kab. Banyumas	1.178,83	1.178,83	1.178,83	5,79%	5,79%	5,79%
27	Kab. Batang	345,47	345,47	345,47	7,51%	7,51%	7,51%
28	Kab. Brebes	1.185,43	1.185,43	1.185,43	9,62%	9,62%	9,62%
29	Kab. Cilacap	1.677,33	1.677,33	1.677,33	6,48%	6,48%	6,48%
30	Kota Pekalongan	294,91	294,91	294,91	6,35%	6,35%	6,35%
31	Kota Tegal	592,9	592,9	592,9	15,12%	15,12%	15,12%
32	Kab Pekalongan	196,09	120,17	120,17	3,89%	4,53%	4,53%
33	Kab. Pemalang	1.267,67	1.267,67	1.267,67	16,72%	16,72%	16,72%
34	Kab. Purbalingga	164,49	164,49	164,49	5,89%	5,89%	5,89%
35	Kab. Tegal	377,46	377,46	203,53	5,70%	5,70%	6,97%
Jumlah Provinsi Jawa Tengah		23.288,76	23.858,66	21.958,15	7,49%	7,91%	7,86%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

C. Tantangan

Rumah menjadi hak dasar yang harus dipenuhi sesuai kriteria standar agak layak untuk dihuni. Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa tantangan: (1) Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (Backlog Rumah) yang masih tinggi; (2) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); (3) Perlu pendampingan penanganan rumah masyarakat korban bencana rusak parah dan/atau harus direlokasi ke lokasi yang lebih aman serta masyarakat yang tinggal di lahan milik provinsi, atau tinggal di daerah yang direncanakan untuk dilaksanakan program pemerintah; (4) Perlunya sinergi penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Beberapa tekanan lingkungan seperti perubahan tata guna lahan, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, dan pencemaran lingkungan. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun

2022 sebesar 67,53 yang masuk dalam kategori sedang. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya perubahan tutupan lahan, masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan limbah. Untuk pengelolaan sampah dibutuhkan penyediaan prasarana sarana pengolah limbah dan persampahan (TPST regional, SPALD-S, TPS 3R, IPAL komunal).

Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan

ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi, peningkatan kualitas layanan angkutan umum, dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi serta integrasi antarmoda. Salah satu akar masalah sektor transportasi adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah yang perlu dikendalikan. Hal lain yang masih perlu dikembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi dan sistem logistik yang lebih efisien.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Dibutuhkan penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana.

2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

A. Pengantar

Tujuan 12 adalah Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan. Pencapaian target tujuan 12 Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada: (1) mengurangi limbah pangan; (2) pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan; (3) mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan Kembali; (4) memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran, baik pencemaran air udara, maupun akibat sampah. Kualitas air di Jawa Tengah dominan berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran pada tahun 2021 sebesar 3,39. Dan dari 25 sungai di Jawa Tengah yang dilakukan pemantauan seluruhnya berada pada status tercemar ringan-sedang. Sebanyak 24 sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 1 sungai berada pada status cemar sedang yaitu Sungai Palur. Permasalahan utama pencemaran air sungai di Provinsi Jawa Tengah berasal dari pembuangan air limbah domestik, sampah rumah tangga, limbah industri maupun UMKM, serta limbah pertanian dan peternakan. Sementara itu tingkat pencemaran air laut dalam kondisi baik dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2022 sebesar 72,15. Demikian juga tingkat pencemaran udara di Jawa Tengah dinilai masih dalam kategori baik, yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara tahun 2022 sebesar 85,14.

Jumlah timbulan sampah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2019 sejumlah 5.604.080,65 ton/tahun menjadi 4,633,091.70 ton/tahun pada semester 1 tahun 2023. Jumlah timbulan sampah sebesar 4,633,091.70 ton/tahun dengan jumlah sampah yang dapat dikurangi sebesar 851,417.03 ton/tahun. Sedangkan sampah yang tertangani pada tahun 2023 (semester 1) baru mencakup 1,747,814.42 ton/tahun dengan total pengelolaan sampah sebanyak 2,599,231.45 ton/tahun atau sebesar 56.10 persen.

Tabel II. 19 Persentase Sampah yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023 (Data Semester 1)
1	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun)	5.604.080,65	6.055.617,05	6.152.654,76	6.363.805,99	4,633,091.70
2	Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun)	1.069.308,62	1.175.675,24	1.128.400,92	1.320.900,64	851,417.03
3	Jumlah sampah yang tertangani (Ton/tahun)	2.774.189,20	2.626.441,58	2.408.372,35	2.590.829,95	1,747,814.42
4	Total Pengelolaan Sampah	3.843.497,82	3.802.116,82	3.536.773	3.911.730,59	2,599,231.45
Persentase Pengelolaan Sampah (%)		68,58	62,79	57,48	61,47	56.10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Tengah ini selain karena jumlah timbunan yang semakin meningkat, jumlah TPA yang semakin sedikit, juga dikarenakan oleh banyaknya sarana prasarana pengolahan sampah yang kondisinya sudah rusak, sehingga kinerja pengelolaan sampah menjadi tidak optimal. Secara teknis, kondisi TPA di Jawa Tengah ini masih banyak yang menggunakan sistem open dumping. Biaya untuk beralih ke sistem sanitary landfill dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (teknologi RDF maupun *Waste to Energy*) masih cukup tinggi, sehingga alternatif paling mudah adalah pengelolaan sampah dengan sistem open dumping dan masih banyak ditemui masyarakat membakar maupun membuang sampah ke sungai.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019) yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan sistem persampahan terpadu yakni Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pelaksanaan pembangunan TPST Regional Magelang adalah penyusunan *Feasibility Study* (DLHK, 2019), penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL (DLHK, 2020), penyusunan DED (DLHK, 2021) dan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan, *Feasibility Study* jalan masuk, serta proses persiapan pengadaan tanah (DLHK, 2022), tahun 2023 proses pelaksanaan pengadaan tanah oleh Tim BPN serta proses pelepasan kawasan hutan (DLHK, Maret 2023), dan progress untuk 2024 adalah akses jalan masuk ke TPST (BMCK, 2024), pembentukan kelembagaan dan penyusunan DED landfill (DLHK, 2024), serta penyusunan kajian dampak negatif (DLH Kab. Magelang, 2024).

Selain timbunan sampah, peningkatan aktivitas seperti industri, pelayanan (rumah sakit, hotel dan lain sebagainya) juga akan menambah sumber pencemar dan volume limbah yang dihasilkan. Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) umumnya dihasilkan dari sektor industri.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 59 Jumlah Limbah B3 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

Total Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 1.589.621,42 ton/tahun. Produksi limbah B3 paling besar berasal dari Kabupaten Cilacap karena adanya industri semen, beton dan PLTU Batubara yang berasal dari FABA (*Fly Ash and Bottom Ash*).

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Jawa Tengah dalam menyokong perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pada PDRB belum optimal. Kondisi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, masih rendahnya pengeluaran wisatawan, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum optimalnya promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinas wisata, integrasi antardestinas wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, serta kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

Di Jawa Tengah terdapat 6 Kawasan Pariwisata yang masuk ke dalam KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) antara lain KSPN Borobudur dan sekitarnya; KSPN Dieng dan sekitarnya; KSPN Merapi–Merbabu dan sekitarnya; KSPN Karimunjawa dan sekitarnya; KSPN Sangiran dan sekitarnya; KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Kawasan Pariwisata Provinsi antara lain Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya; Destinasi

Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Rembang–Blora dan sekitarnya

C. Tantangan

Timbulan sampah dan limbah menjadi permasalahan yang cukup serius seiring meningkatnya jumlah penduduk dan berbagai aktivitasnya. Selain itu masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan limbah, masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, serta masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah. Hal tersebut tentu menjadi tantangan yang harus dihadapi kedepannya. Dibutuhkan inovasi sebagai upaya pengelolaan timbulan sampah yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

A. Pengantar

Perubahan iklim telah, sedang dan akan dapat menimbulkan dampak yang nyata terhadap masyarakat di semua negara dan wilayah. Dampak perubahan iklim beresiko mengganggu perekonomian nasional dan mempengaruhi kehidupan masyarakat saat sekarang dan akan lebih besar lagi dampaknya di masa mendatang tanpa ada penanganan yang kontinyu dan menyeluruh. Dampak perubahan iklim ini dapat dirasakan mulai dari perubahan pola cuaca, meningkatnya permukaan air laut, kejadian cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, hingga bencana terkait iklim atau hidrometeorologi akibat pemanasan global atau perubahan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan.

Penanganan perubahan iklim dalam bentuk pembangunan yang rendah karbon untuk menekan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pembangunan yang berketahanan iklim untuk peningkatan ketangguhan dan mengurangi kerentanan masyarakat dan sektor akibat dampak negatif perubahan iklim perlu disinergikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga merupakan instrumen penting dalam upaya transformasi pembangunan hijau menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pencapaian target tujuan 13 Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada (1) Kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam; (2) Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan; dan (3) Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

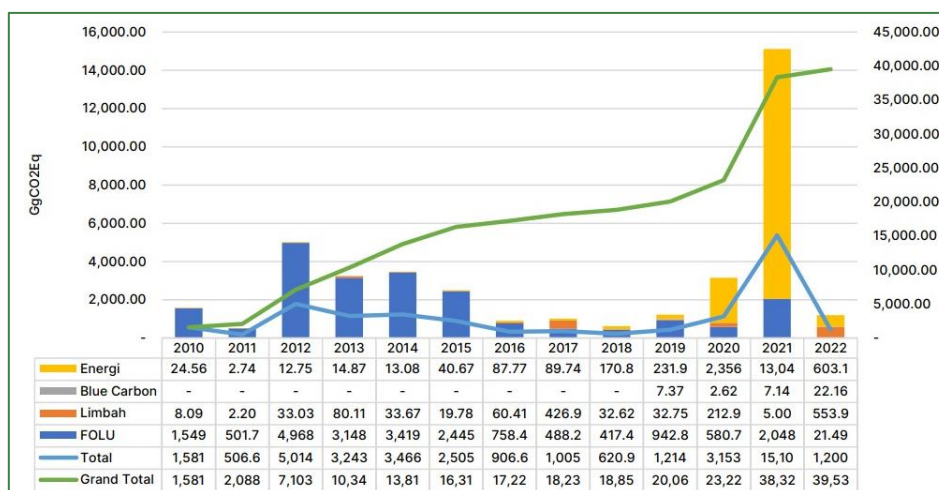
Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK.

Perubahan iklim dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan pelaporan yang dilakukan pada aplikasi AKSARA Bappenas, potensi penurunan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2010-2022 adalah sebesar 17,118 juta ton CO₂eq. Sedangkan potensi penurunan emisi untuk tahun 2021 saja adalah sebesar 7,517 juta ton CO₂eq dengan kontributor utamapotensi penurunan emisi GRK dari sektor energi yang mencapai 6,492 juta ton CO₂eq. Peningkatan aksi-aksi mitigasi pada sektor energi berasal dari sektor transportasi yang merupakan dukungan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Tabel II. 20 Aksi Penurunan Emisi GRK Untuk Setiap Sektor di Jawa Tengah Tahun 2021

No	Sektor	Emisi (Ton CO ₂ eq)
1	Energi	6.492.423,75
2	Pertanian	972.157,80
3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	-
4	Pengelolaan Limbah	225,26
5	Kehutanan dan Penggunaan Lahan	52.775,80
Total Emisi GRK		7.517.582,61

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, 2023

Gambar 2. 60 Aksi Penurunan Emisi GRK setiap Sektor di Jawa Tengah Tahun 2010-2022

Selain aksi-aksi mitigasi pembangunan rendah karbon, upaya lain dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim adalah melalui aksi adaptasi perubahan iklim. Aksi adaptasi ini dibagi menjadi empat sektor yaitu sektor air, pesisir dan kelautan, pertanian, dan kesehatan. Peningkatan ketahanan iklim ditujukan melalui kegiatan-kegiatan untuk menurunkan tingkat kerentanan dan meningkatkan kapasitas ketahanan iklim, sehingga mampu bertahan terhadap dampak dari perubahan iklim, yang dilaksanakan pada lokasi intervensi aksi ketahanan iklim. Lokasi intervensi aksi ketahanan iklim adalah lokasi terdampak perubahan iklim yang dikategorikan dalam tiga tingkatan prioritas yaitu super prioritas, top prioritas, dan prioritas berdasarkan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang berpotensi terjadi.

C. Tantangan

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Permasalahan pada perubahan iklim salah satunya terkait dengan meningkatnya emisi GRK akibat aktivitas ekonomi dan penduduk belum diimbangi dengan capaian penurunan emisi GRK masih rendah. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

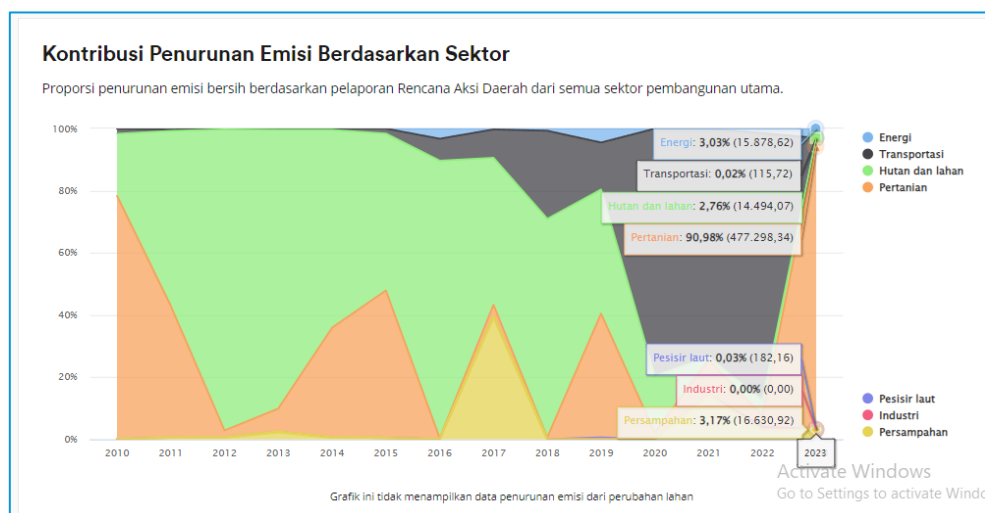
A. Pengantar

Tujuan 14 adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dengan target melestarikan wilayah pesisir, menghentikan penangkapan ikan secara ilegal, dan memberikan perlindungan untuk nelayan. Pencapaian target tujuan 14 Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada: (1) Mencegah dan mengurangi semua jenis pencemaran laut; (2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; (3) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perairan dan perikanan; dan (4) Peningkatan perlindungan terhadap nelayan.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

Di sektor kelautan dan perikanan, pencapaian kegiatan-kegiatan aksi pembangunan rendah karbon disumbang oleh kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan penenggelaman terumbu karang buatan, penanaman bibit mangrove dan vegetasi pantai jenis cemara laut serta penerapan budidaya perikanan yang berkelanjutan dengan penggunaan obat dan pakan ramah lingkungan.

Pesisir memiliki ekosistem yang memiliki peran penting dalam penyimpanan dan penyerapan CO₂. Ekosistem tersebut terdiri dari ekosistem mangrove, lamun, dan rawa asin. Ketiga ekosistem ini menyerap CO₂ secara alami selama proses fotosintesis. Selanjutnya karbon disimpan dalam bentuk biomassa atas (daun, batang dan ranting), biomassa bawah (akar), dan terakumulasi di tanah di mana karbon tersimpan dalam jumlah lebih banyak serta dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan biomassa. Hasil kajian KKP dan LIPI menyebutkan bahwa dengan mempertahankan area mangrove dan lamun sebesar 1 ha, kedua ekosistem tersebut dapat menyerap karbon sebesar 52,85 ton CO₂ / tahun (pada area mangrove) dan 24,15 ton CO₂ / tahun (pada area lamun) (Laporan RAN GRK, 2019).



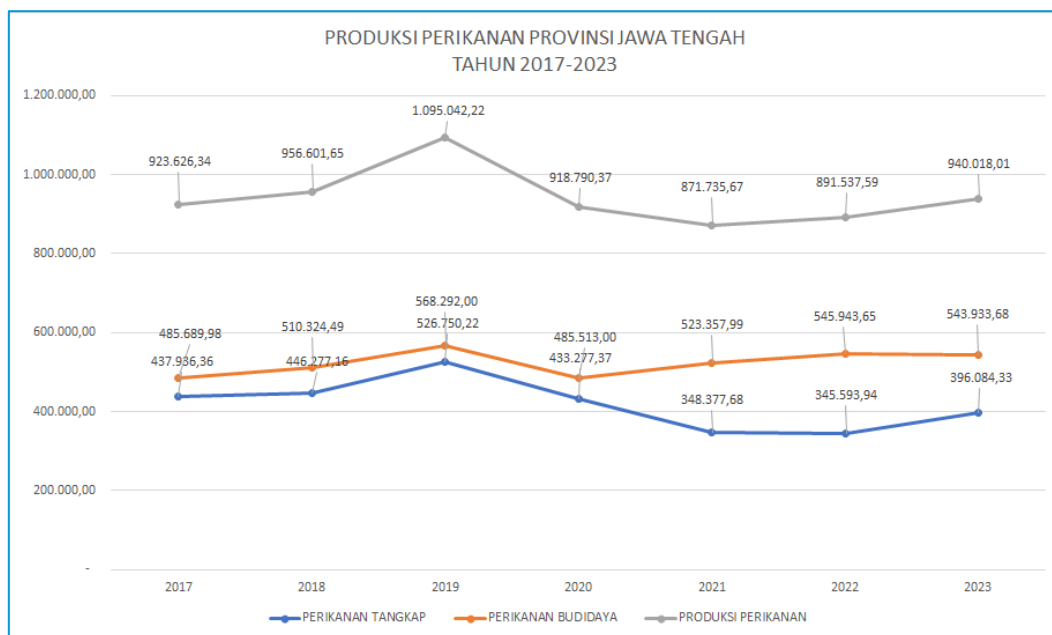
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 61 Kontribusi Penurunan Emisi berdasarkan Sektor di Jawa Tengah Tahun 2010-2022

Kontribusi penurunan emisi sektor kelautan dan perikanan meningkat dari tahun 2018 hingga 2022 dan mengalami penurunan di tahun 2023 dengan nilai sebesar 0,03% (182,16). Agar Pembangunan Rendah Karbon dapat berjalan secara optimal pada sektor kelautan dan perikanan, beberapa strategi kebijakan yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

- Kesadaran bersama para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan pertanian;
- Integrasi Pembangunan Rendah Karbon sektor kelautan dan perikanan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
- Penerapan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk menyukseskan ketiga strategi di atas dan mendorong implementasi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon sektor kelautan dan perikanan, kolaborasi aktif pemangku kepentingan pertanian yang terlibat sangat diperlukan untuk memberikan hasil yang bermakna dan konkret untuk Indonesia (LCDI, 2022).



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 62 Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2023

Dari sisi prasarana penunjang produksi perikanan tangkap, Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Secara umum pelabuhan perikanan di Jawa Tengah telah memiliki kriteria yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Akan tetapi seiring dengan meningkatnya jumlah kapal, beberapa pelabuhan telah melebihi kapasitas daya tampung kapal yang ditetapkan sebagai PPP maka diperlukan peningkatan kapasitas dermaga maupun kolam pelabuhan, juga perbaikan atau pembangunan breakwater (penahan gelombang) dengan panjang yang sesuai.

Di sisi lain, risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan saat melaut cukup tinggi. Kasus yang terbaru pada tahun 2022 terjadi kebakaran kapal di Kabupaten Cilacap dan Kota Tegal sejumlah 70 kapal dengan nilai kerugian sebesar Rp212.000.000.000. Oleh karena itu, perlu diberikan perlindungan kepada nelayan dalam bentuk asuransi nelayan. Asuransi nelayan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan berukuran paling besar sepuluh *Gross Tonnage* (GT). Nelayan Jawa Tengah yang sudah memperoleh bantuan premi asuransi sebanyak 40.000 nelayan dari total 129.620 nelayan. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 50 klaim dengan nilai Rp1.216.262.959, pada tahun 2021 sebanyak 12 klaim dengan nilai Rp201.846.000, dan pada tahun 2022 sebanyak 93 klaim dengan nilai Rp1.536.491.607.

Konservasi adalah suatu upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya (UU No. 45 Tahun 2009) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta perubahannya (UU Nomor 1 Tahun 2014) mengarahkan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan lainnya mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan menjabarkan arahan kedua Undang-Undang tersebut dengan mengamanatkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan konservasi sumber daya ikan dan salah satunya adalah melalui penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Selanjutnya selaras dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengelolaan sumber daya alam di laut 0 – 12 mil laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Kawasan konservasi perairan di Jawa Tengah terdapat pada 4 kawasan yaitu (1) Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara; (2) Ujungnegoro Roban, Kabupaten Batang; (3) Karangjeruk, Kabupaten Tegal, (4) Pulau panjang, Kabupaten Jepara, dan (5) Karang Jahe, Kabupaten Rembang. Pada tahun 2022 terdapat penambahan kawasan konservasi di Karangjeruk Kabupaten Tegal, Pulau Panjang Kabupaten Jepara, dan Karang Jahe Kabupaten Rembang sehingga kawasan konservasi perairan di Jawa Tengah menjadi 114.403,65 ha.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 63 Luas Kawasan Konservasi di Jawa Tengah

C. Tantangan

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan dan garam, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui usaha pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa tantangan dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu: (1) Belum optimalnya produksi perikanan; (2) Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan; (3) Tingginya kerusakan ekosistem perikanan.

Dibutuhkan juga aksi-aksi mitigasi pada sektor pesisir dan kelautan. Untuk sektor kelautan dan pesisir aksi adaptasi berupa penyediaan bangunan/vegetasi pelindung pantai,

pengembangan sentra pengelolaan produksi perikanan tangkap laut, dan penguatan regulasi pengelolaan ruang laut.

2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Daratan

A. Pengantar

Tujuan 15 adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dengan target pelestarian, restorasi dan pemanfaatan ekosistem daratan yang berkelanjutan. Pencapaian target tujuan 15 Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada: (1) Pemantauan terhadap tutupan Kawasan hutan dan lahan; (2) Pemulihan Kawasan konservasi; serta (3) Peningkatan kesatuan pengelolaan hutan.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

Kualitas lahan dinilai dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lahan. Kondisi ini juga berkaitan dengan semakin meningkatnya luas lahan kritis di Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah sebesar 375.733 ha (11,45 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah).

Pada tahun 2021, hutan negara/kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 649.354,96 ha dan hutan rakyat seluas 684.317,70 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah seluas 1.333.672,66 ha. Berdasarkan status lahan, lahan kritis tersebut 86 persen tersebar di lahan masyarakat/tanah hak, sedangkan sisanya 14 persen tersebar di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kategori kritis di Jawa Tengah dilakukan melalui kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/lahan masyarakat.

Sedangkan pada lahan kritis yang tersebar di kawasan hutan/hutan negara dilakukan melalui reboisasi hutan baik pada hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Pemulihan lahan kritis di kawasan hutan negara, khususnya yang berkaitan erat dengan permasalahan sosial seperti konflik tenurial, terbatasnya akses kelola hutan dan lain sebagainya dilakukan melalui program perhutanan sosial dengan lima skema yaitu: (1) Hutan Desa (HD); (2) Hutan Kemasyarakatan (HKm); (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR); (4) Hutan Adat (HA); (5) Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Untuk menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dalam implementasi penanganan lahan kritis diterapkan melalui

agroforestry. Perkembangan upaya penanganan lahan kritis tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 21 Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Jawa Tengah Th. 2018–2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Hutan dalam dan luar kawasan (ha)	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13
Luas Kritis (ha)	375.733*)	375.733*)	375.733*)	375.733*)	375.733
Luas lahan yang direhabilitasi per tahun (ha)	23.361	23.431	32.389	23.477	21.371
Perbandingan luas yang direhabilitasi per tahun (%)	6,22	6,24	8,62	6,24	5,69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Penanganan lahan kritis di Jawa Tengah tahun 2018-2022 secara konsisten dilakukan pada lahan seluas 124.029 Ha (33 persen) terhadap luas lahan kritis sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018. Keberadaan lahan kritis ini telah berkontribusi terhadap penurunan daya dukung DAS, sehingga rehabilitasi lahan kritis difokuskan pada 19 DAS prioritas yang perlu dipulihkan daya dukungnya dan 12 DAS prioritas yang perlu dipertahankan daya dukungnya di di Jawa Tengah.

Tabel II. 22 Daerah Aliran Sungai Prioritas di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Nama DAS	Keterangan	No	Nama DAS	Keterangan
1	DAS Progo	Dipulihkan	1	DAS Rambut	Dipertahankan
2	DAS Serayu	Dipulihkan	2	DAS Lampir	Dipertahankan
3	DAS Bogowonto	Dipulihkan	3	DAS Banger	Dipertahankan
4	DAS Luk Ulo	Dipulihkan	4	DAS Babon	Dipertahankan
5	DAS Tuntang,	Dipulihkan	5	DAS Blorong	Dipertahankan
6	DAS Pemali,	Dipulihkan	6	DAS Jragung	Dipertahankan
7	DAS Solo,	Dipulihkan	7	DAS Kaliombo	Dipertahankan
8	DAS Citandui.	Dipulihkan	8	DAS Gede	Dipertahankan
9	DAS Bodri,	Dipulihkan	9	DAS Randugunting	Dipertahankan
10	DAS Garang,	Dipulihkan	10	DAS Jalicokroyasan	Dipertahankan
11	DAS Serang,	Dipulihkan	11	DAS Ijo	Dipertahankan
12	DAS Cacaban,	Dipulihkan	12	DAS Tipar	Dipertahankan
13	DAS Juwana,	Dipulihkan			
14	DAS Comal,	Dipulihkan			
15	DAS WawarMedono	Dipulihkan			
16	DAS Babakan	Dipulihkan			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selain rehabilitasi lahan kritis/pemulihan DAS, dilakukan juga upaya mempertahankan tutupan lahan melalui inisiatif-inisiatif konservasi kawasan melalui pembentukan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) dan Cagar Biosfer. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. KEE menjadi upaya

daerah untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan dinamis dalam perkembangannya. KEE juga dapat menjadi fungsi pemanfaatan yang memperhatikan keberlanjutan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat ekologi (lestari). Saat ini di Jawa Tengah sudah ditetapkan tiga KEE yang merupakan kawasan ekosistem lahan basah mangrove, sedangkan KEE pada ekosistem terestrial dalam tahap inisiasi untuk penetapan.

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Sedangkan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ditentukan sejauh mana pengguna kawasan hutan (yang bersifat perorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum swasta) memenuhi kewajiban terhadap izin/kerja sama yang telah ditetapkan dan industri pengolahan hasil hutan tertib dalam penatausahaan hasil hutan. Berikut gambaran perkembangan produksi kayu di Jawa Tengah.

Tabel II. 23 Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara di Jawa Tengah Th. 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Kayu Asal Hutan Rakyat (m3)	2.597.954,53	2.632.756,10	2.682.476,19	1.821.315,97	2,149,541.51
2	Produksi Kayu Asal Hutan Negara (m3)	254.657	278.118,06	361.641,11	249.517,67	328,451.67
Total Produksi Kayu (m3)		2.852.611,53	2.910.874,16	3.044.117,30	1.821.315,97	2,477,993.17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam kurun waktu 2018-2022, telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 90 SK untuk 90 kelompok perhutanan sosial di Jawa Tengah dengan luas total sebesar 79.461,49 Ha. Sebagai salah satu upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19 dilakukan penguatan perhutanan sosial yang diarahkan pada penataan kelembagaan, pengembangan usaha kelompok dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok serta pengelolaan kawasan berdasar perencanaan teknis.

Tabel II. 24 Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Th. 2018 – 2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemberian Akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat (ha)	28.300,87	35.173,63	35.828,84	79.461,49	79.461,49
2	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi (kelompok)	54	79	81	90	90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pemulihan Ekosistem ini merupakan tindak lanjut dari rencana yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) Balai KSDA Jawa Tengah. Adapun sasaran pemulihan ekosistem ini adalah kawasan konservasi yang telah mengalami degradasi, baik itu akibat bencana alam, kebakaran hutan, perambahan, penebangan liar, introduksi jenis asing dan perkembangan jenis invasif di blok rehabilitasi dan blok lainnya. Dengan kegiatan Pemulihan Ekosistem ini diharapkan ekosistem kawasan dapat dikembalikan sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan.

C. Tantangan

Beberapa tantangan dalam ekosistem daratan yaitu: 1) masih adanya lahan kritis dan lahan mangrove yang perlu direhabilitasi; 2) masih rendahnya penambahan industri pengolah hasil hutan yang memperoleh sertifikasi verifikasi legalitas kayu; 3) masih adanya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan.

2.16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan 16 adalah memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan 16 ini memiliki target mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun; menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak; menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya; serta mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

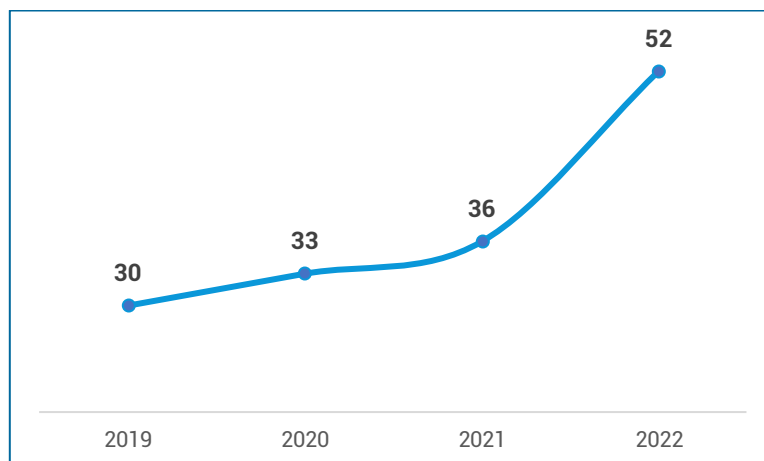
Tujuan 16 ini terdiri dari 6 target dan 32 indikator secara global. Dalam periode lima tahun terakhir (2019-2023) telah dilaporkan kemajuan dalam pencapaian sasaran dari beberapa indikator TPB/SDGs tujuan 16, namun terdapat pula indikator yang pencapaian sasarnya masih perlu perhatian dan upaya keras.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

1) Segala Bentuk Kekerasan dan terkait Angka Kematian

Mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun merupakan target yang akan dicapai dalam rangka menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai. Upaya mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian yang ditunjukkan dengan beberapa indikator. Indikator tersebut yaitu 16.1.1.(a) jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, yang merupakan indikator proksi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir.

Dalam periode tahun 2019 – 2023, jumlah kasus kejahatan pembunuhan cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat keamanan di masyarakat mengalami penurunan yang berdampak pada maraknya kasus kejahatan ekstrim pembunuhan. Secara series, tren peningkatan jumlah kasus kejahatan pembunuhan dapat dilihat pada Gambar 2.64.



Sumber: POLDA Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 64 Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan di Jawa Tengah Th.2019 – 2022

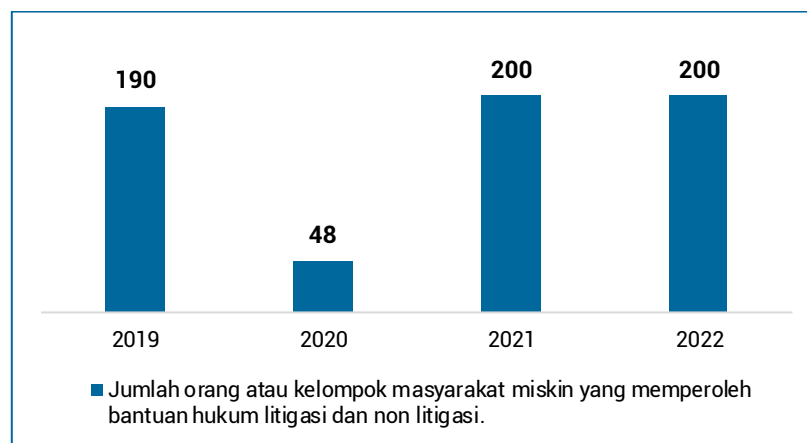
Secara nasional, Jawa Tengah merupakan provinsi ke-4 dengan jumlah kasus kejahatan terhadap nyawa tertinggi di Indonesia, setelah Jawa Timur, Sumatera Utara dan Jawa Barat. Tahun 2022, jumlah kasus kejahatan pembunuhan di Jawa Tengah mencapai 52 kasus, yang meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, jumlah kasus pembunuhan ini tidak menggambarkan jumlah korban maupun pelaku yang terlibat di dalamnya. Hal ini karena dalam 1 kejadian, bisa terdapat lebih dari 1 korban maupun pelaku. Pembunuhan sendiri merupakan klasifikasi kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional serta memiliki hukuman yang paling berat dalam KUHP Indonesia.

Sedangkan indikator lainnya yaitu kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan capaian 0, artinya konflik sosial yang terjadi tidak menyebabkan korban meninggal atau hilang nyawa.

2) Hukum dan Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Semua

Dalam rangka penegakan hukum dan menjamin akses yang setara terhadap keadilan, terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukurnya, yaitu indikator 16.3.1(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dan indikator 16.3.1(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi. Indikator proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi digunakan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Data terakhir tahun 2020 yang dirilis oleh BPS, diketahui proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi sebesar 36,02%. Artinya bahwa jumlah korban kekerasan dan laporan masih cenderung rendah dibawah 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan, serta kepercayaan kepada pihak berwenang masih cenderung rendah di Jawa Tengah.

Sedangkan akses bagi masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum di Jawa Tengah menunjukkan tren yang positif dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023. Capaian penerima bantuan hukum berdasarkan jumlah permohonan yang diajukan setiap tahunnya dapat terakomodir secara penuh oleh pemberi bantuan hukum, baik bantuan hukum litigasi maupun non litigasi. Adapun Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dapat dilihat pada Gambar 2.65.



Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 65 Jumlah Bantuan Hukum di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022

3) Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk

Indikator pengurangan korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya diukur dengan indikator 16.5.1.(a) tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Penilaian IPAK hanya berada pada tingkat nasional, sehingga pada tingkat daerah, indikator yang digunakan sebagai proxy dari indikator IPAK tersebut yaitu nilai skor Survei Penilaian Integritas. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik

(Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan.

Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.

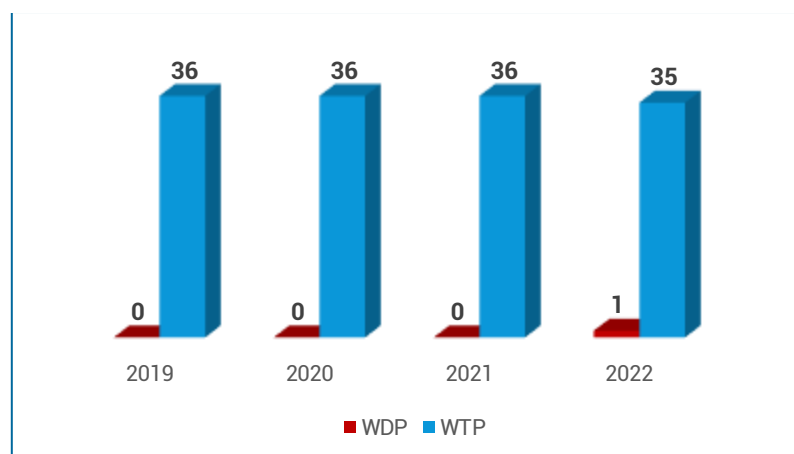
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh skor 77,9. Skor tersebut merupakan indeks integritas tertinggi untuk kategori Provinsi Tipe Besar berdasarkan tipe anggaran dan jumlah sumber daya manusia.

Hasil survei tersebut menggambarkan risiko tindak korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung kecil, yang didukung dengan reformasi birokrasi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, sosialisasi dan kampanye integritas, pembangunan budaya antikorupsi yang dilakukan kepada masyarakat serta efektivitas pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan.

4) Mengembangkan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan

Berkaitan dengan pengembangan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan, terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur.

Indikator 16.6.1 (a) merupakan indikator yang mewakili akuntabilitas Lembaga pemerintahan yaitu persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. Opini tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Capaian indikator dalam kurun waktu tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.66.



Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 66 Opini BPK pada 36 Instansi Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Th. 2019 – 2022

Hasil pemeriksaan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan bahwa 36 Pemerintah Daerah di Jawa Tengah (35 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Namun, capaian mengalami penurunan pada tahun 2022, dengan persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 97,2%, menurun 2,8% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan Kabupaten Pemalang mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah sebelumnya mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

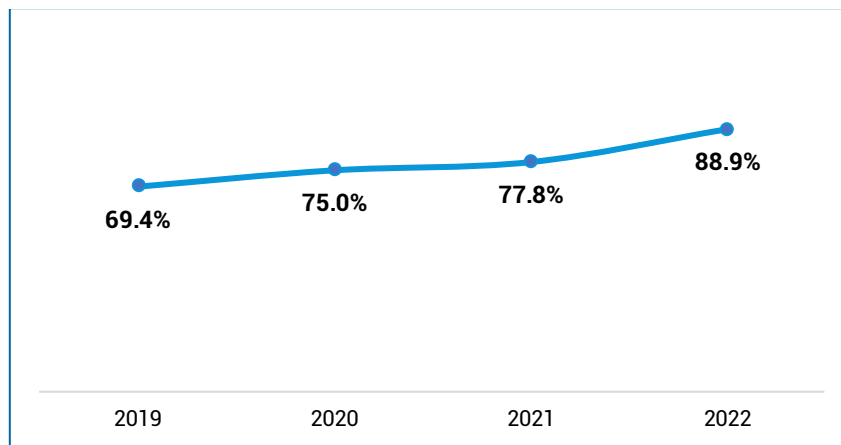
Selain ukuran akuntabilitas dari BPK tersebut, indikator lain yang juga mengukur akuntabilitas kelembagaan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2022, indikator 16.6.1.(b) persentase peningkatan SAKIP pemerintah daerah menunjukkan tren yang fluktuatif. Capaian terakhir tahun 2022 sebesar 81,14 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 84 persen. Berikut capaian persentase peningkatan SAKIP pemerintah daerah Jawa Tengah tahun 2019-2022 (dapat dilihat pada Tabel II.25).

Tabel II. 25 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022

Tahun	Target	Capaian
2019	80	81.56
2020	82	80.25
2021	81	80.72
2022	84	81.14

Sumber: BPK, 2023

Lebih lanjut, untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah maka indikator utama yang digunakan adalah persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2019, dari 36 instansi Pemerintah Daerah di Jawa Tengah (35 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi), terdapat 25 instansi Pemerintah Daerah (1 Pemerintah Provinsi dan 24 Pemerintah Kabupaten/Kota) yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi berkategori baik atau $\geq B$. Kinerja membaik ditunjukkan setiap tahunnya hingga pada tahun 2022, jumlah instansi Pemerintah Daerah dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi berkategori baik atau $\geq B$ meningkat menjadi 32 instansi Pemerintah Daerah. Capaian persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi $\geq B$ dalam kurun tahun 2019 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Satu Data Kementerian PAN-RB, 2024. diolah

Gambar 2. 67 Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi $\geq$ 80 Jawa Tengah Th. 2019-2022 (Persen)

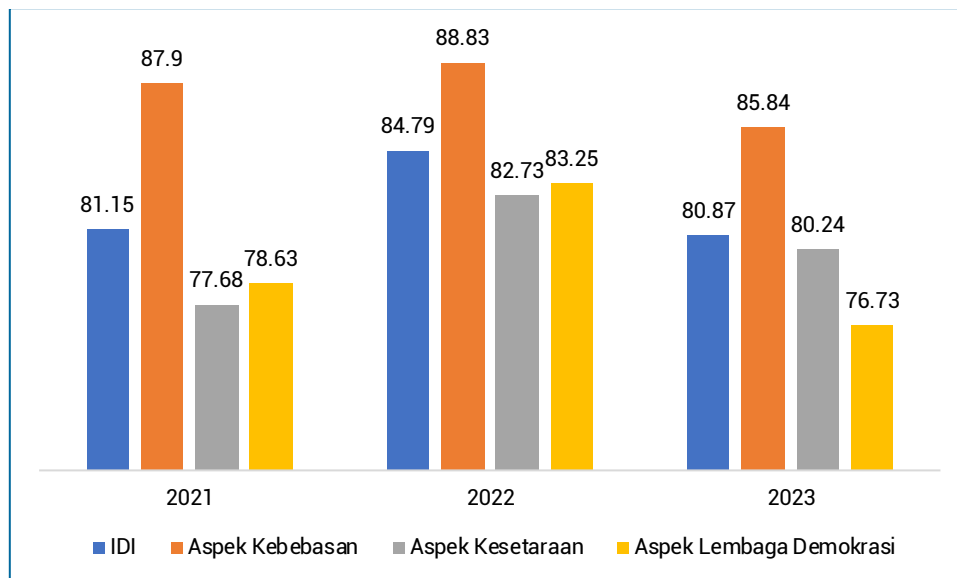
5) Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif

Perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik tercermin dari beberapa indikator SDGs terkait, yaitu indikator 16.7.1.(a) persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Capaian menunjukkan persentase sebesar 17,5 persen untuk DPRD tingkat provinsi pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga mencapai 19,61 persen pada tahun 2023.

Indikator berikutnya yang berkaitan dengan perkembangan partisipasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif juga tercermin pada indikator 16.7.1.(b) mengenai proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon II. Capaian menunjukkan persentase yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya dengan tahun terakhir 2023 sebesar 16,7 persen.

Selain keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif dan eksekutif, pelaksanaan demokrasi secara kelembagaan dapat dilihat melalui indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada 2021, IDI dihitung menggunakan metode baru yang telah menyempurnakan penghitungan IDI metode sebelumnya. Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi digunakan sebagai penyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru. Berdasarkan data IDI (Gambar 2.66), sejak 2009 hingga 2023, baik menggunakan metode lama maupun baru, tingkat demokrasi di Jawa Tengah mengalami dinamika. Hal ini tercermin pula pada aspek-aspek pembentuk IDI.

Pada 2023, capaian ketiga aspek demokrasi berada pada kategori sedang hingga tinggi (angka indeks > 80). IDI Jawa Tengah Tahun 2023 mencapai angka 80,87 berada pada kategori tinggi dengan angka masing-masing aspek, yaitu: (1) Aspek Kebebasan sebesar 85,84; (2) Aspek Kesetaraan sebesar 80,24 dan (3) Aspek Lembaga Demokrasi sebesar 76,73. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2022).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2. 68 Indeks Aspek IDI Jawa Tengah Th. 2021-2023

C. Tantangan

Kondusivitas daerah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing daerah. Meskipun cukup kondusif, Jawa Tengah tetap menghadapi tantangan terkait ancaman keamanan dan ketentraman masyarakat, yang salah satunya ditandai dengan maraknya kasus kejahatan ekstrim pembunuhan yang menunjukkan tren meningkat dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, masih banyak terjadi kasus konflik sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan unsur SARA.

Berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian di Jawa Tengah, antara lain: 1) Masih perlunya peningkatan pelayanan kepada publik maupun standar operasional tata kelola pelayanan karena masih dijumpai beberapa permasalahan seperti belum optimalnya tata kelola administrasi dan pelayanan kepada publik; 2) Belum optimalnya digitalisasi tata kelola pemerintahan yang disebabkan, antara lain, belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, belum optimalnya implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan yang disebabkan antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang persandian dan keamanan data; 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta dinamis yang ditunjukkan dengan beberapa permasalahan seperti belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan yang disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah.

2.17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

A. Pengantar

Tujuan 17 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan 17 ini memiliki target paling banyak dibandingkan Tujuan dalam TPB lainnya. Tujuan 17 terdiri dari 19 target dan 42 indikator secara global. TPB hanya bisa terwujud dengan komitmen kuat pada kemitraan dan kerjasama global. Selain itu, memperbaiki akses pada teknologi dan pengetahuan adalah cara penting untuk berbagi dan mendorong inovasi. Di sisi lain, mendorong perdagangan internasional dan membantu negara berkembang untuk meningkatkan ekspor.

B. Status dan Kondisi Pencapaian

1) Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari tiga komponen yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Pendapatan transfer, dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada periode 2018 hingga 2023 pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami kontraksi 1,8 persen dari Rp25,859 triliun menjadi Rp25,393 triliun karena perkembangan ekonomi nasional yang kurang stabil sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19. Tahun 2021 merupakan masa pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan realisasi pendapatan daerah yang tumbuh 4,88 persen pada tahun 2021 menjadi Rp26,633 triliun. Meskipun begitu, pada tahun 2022, pendapatan daerah tumbuh negatif sebesar 9,26 persen menjadi Rp24,167 triliun. Hal ini karena sesuai dengan kebijakan pendapatan transfer yang sesuai dengan alokasi yang ditetapkan melalui portal Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp. 25.369.733.556.675,00 atau 25,37 triliun rupiah. Secara terperinci, realisasi pendapatan daerah tahun 2019–2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 26 Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14.437.914	13.668.282	14.695.475	16.264.619	17.012.509
1.1	Pajak Daerah	11.951.919	11.139.173	11.718.379	13.484.851	13.976.643
1.2	Retribusi Daerah	114.861	93.279	91.634	115.158	139.377

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	512.702	530.091	508.264	546.717	638.482
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1.858.432	1.905.738	2.377.198	2.117.893	2.258.007
2.	Pendapatan Transfer	11.398.682	11.702.102	11.871.176	7.810.883	8.278.928
2.1	Bagi Hasil Pajak	564.290	843.392	1.023.259	909.711	933.111
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	11.678	16.888	12.587	18.990	-
2.3	Dana Alokasi Umum	3.784.513	3.438.710	3.432.979	3.435.718	3.558.428
2.4	Dana Alokasi Khusus	6.974.422	7.333.797	7.334.262	3.385.244	3.700.189
2.5	Dana Insentif Daerah	62.388	68.212	68.711	61.353	87.197
2.6	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.390	1.102	-	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.184	23.352	65.728	92.434	78.296
3.1	Pendapatan Hibah	23.184	23.352	18.958	92.162	77.972
3.2	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan	-	-	64	272	323
Jumlah		25.859.780	25.393.556	26.633.000	24.167.936	25.369.733

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Tengah, 2022

Kontribusi terbesar pendapatan masih diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, diikuti pendapatan transfer kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 67,06%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 67,30%;
- Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 32,63%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 32,32%; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 0,31%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 0,38%.

Lebih lanjut, kontribusi pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber terhadap nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah dapat dilihat dari indikator Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB (indikator 17.1.1*). Proporsi pendapatan daerah terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun 2023 menunjukkan angka 1,002%, lebih rendah dibandingkan angka tahun sebelumnya yang mencapai 1,042%.

Secara lebih detail, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan sumber utama yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Secara lebih mendalam kemandirian memperoleh pendapatan tercemrin dari rasio pajak (*tax ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Spesifik untuk konteks keuangan daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak dan retribusi daerah dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dikenai pajak dan retribusi daerah serta kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi bagi pengenaan pajak di wilayah provinsi.

Tax ratio Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dalam empat tahun terakhir semakin menurun. Jika melihat nilai PDRB tahun ke tahun maka penerimaan pajak dan retribusi belum sepenuhnya bisa mengikuti perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Rasio penerimaan pajak pemerintah daerah terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun 2023 menunjukkan angka 0,824%, cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan angka 0,864%.

Selain kemandirian memperoleh pendapatan yang tercermin dari aspek PAD terhadap PDRB dan rasio pajak, kemandirian keuangan daerah juga tercermin dari kemampuan mendanai belanja pemerintah yang secara kuantitatif terlihat pada struktur keuangan pemerintah daerah, yakni pada rasio antara jumlah penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap jumlah pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan belanja daerah yang menggunakan pendapatan dari pajak daerah (indikator proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh PAD) diketahui bahwa kontribusi dari pajak di Jawa Tengah terhadap belanja daerah menunjukkan proporsi lebih dari 100%. Capaian tahun 2023 sebesar 101,97% namun lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai proporsi sebesar 107,10%. Penurunan proporsi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya belanja daerah.

2) Penggunaan teknologi yang memungkinkan

Internet adalah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi, menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi serta perkembangan masyarakat digital yaitu indikator persentase pengguna internet.

Di Jawa Tengah, pengguna internet mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Data tahun 2019 menunjukkan persentase pengguna internet berada di angka 47,74%, meningkat signifikan pada tahun 2023 dengan estimasi sebesar 75,12%. Artinya bahwa seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai mampu beradaptasi dengan penggunaan alat teknologi komunikasi yang semakin canggih dan melek digital. Sementara itu, apabila dilihat dari sisi rumah tangga, sebanyak lebih dari 80% rumah tangga sudah mengakses internet (data bersumber dari BPS).

C. Tantangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Namun demikian pendapatan belum mampu untuk memenuhi pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan: (a) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan; (b) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah; (c) Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

Penyediaan data dan informasi yang *reliable, up to date* dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain: (a) Validitas data dan informasi, belum *link and match* antara data yang tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan; (b) Belum optimalnya integrasi aplikasi pengolah data perangkat daerah dengan *Single Data System* untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah; (c) Belum adanya standarisasi data sektoral dan metadata oleh pusat dalam rangka implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019; (d) Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan data statistik sektoral; (e) Masih kurangnya pemahaman badan publik terhadap keterbukaan informasi publik.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1 TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Kemiskinan masih terus menjadi isu di setiap level pembangunan, baik level global hingga level daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka mencapai tujuan mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun, Jawa Tengah menetapkan 5 target yang diukur melalui 12 indikator TPB provinsi. Target dan indikator untuk tujuan 1 Tanpa Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel III.1.

Jawa Tengah melalui 3 (tiga) strategi dalam mencapai Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun dengan 5 (lima) target pencapaian di dalamnya, sesuai dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencanan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2024-2026 antara lain:

- a. **Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat**, diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
- b. **Strategi peningkatan pendapatan masyarakat**, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
- c. **Strategi penurunan wilayah kantong kemiskinan** dengan mensinergikan kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi.

Ke tiga strategi utama tersebut tentunya juga didukung peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara bottom-up. Selain itu, juga diperlukan pendekatan intervensi baik secara individu maupun spasial/kewilayahan untuk mencapai Tujuan 1 dalam TPB. Fokus pendekatan kewilayahan antara lain: 1) Penanganan kemiskinan di kawasan kumuh, 2) Peningkatan aksesibilitas di wilayah dengan kesulitan geografis tinggi, 3) Peningkatan produktivitas pertanian, 4) Pemberdayaan nelayan dan sektor perikanan, dan 5) Pengembangan potensi lokal. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan CSR di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Tabel III. 1 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan								
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.								
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	BPS	%	1.72	1.48	1.23	0.99
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	10,77	9,76 - 8,96	9,28 - 8,08	8,67 - 7,28
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	BPS	%				
	(a) Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan	(a) Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan		%	74,83 *estimasi	PM	PM	PM
	(b) Gizi: Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi)	(b) Gizi: Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi)		%	12,34 (2022)	PM	PM	PM
	(c) Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	(c) Indikator Morbiditas: Angka kesakitan		%	16,84 (2021)	PM	PM	PM
	(d) Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP	(d) Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP		%	38,52 *estimasi	PM	PM	PM

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
	(e) Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	(e) Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah		%	0,26 *estimasi	PM	PM	PM
	(f) Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	(f) Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik		%		PM	PM	PM
	(g) Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	(g) Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih		%	6,24	PM	PM	PM
	(h) 8. Sanitasi: Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak	(h) 8. Sanitasi: Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak		%	14,8	PM	PM	PM
	(i) Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2	(i) Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah		%	8,30	PM	PM	PM
	(j) Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg	(j) Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji		%	88,89	PM	PM	PM
	(k) 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif	(k) 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif		%	2,29 *estimasi	PM	PM	PM
	(l) Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	(l) Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran		%	2,61	PM	PM	PM
	(m) 13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet	(m) 13. Akses internet: Persentase rumah tangga		%	31,53 *estimasi	PM	PM	PM

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE (2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
		<i>yang tidak punya akses internet</i>						
	<i>(n) Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.</i>							
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial: a. PKH b. PBI c. Sembako d. Hari tua e. Pensiun	BPS, BPJS KESEHATAN, KEMENSOS	%	a. PKH= b. PBI = 17.122.735 d. Hari Tua = Rp3.440.093.990.000 e. Pensiun = Rp91.697.740.000 (Agustus 2023)	PM	PM	PM
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS, BPJS KESEHATAN, KEMENSOS, KEMENKES	%	PBI = 17.122.735 17.252.727 (Desil 1 - 4 P3KE 2023) Proporsi = 99,24% BPJS KESEHATAN : PBI APBN : 18.074.277 Jiwa (1 Oktober 2023)	PBI = 15.000.000 Jml Kin = 17.414.174 Proporsi = 86,13%	PBI = 15.000.000 Jml kin = 17.263.734 Proporsi = 86,88%	PBI = 15.000.000 Jml Kin = 17.113.294 Proporsi = 87,65%
1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS, BPJS KETENAGA-KERJAAN, KEMENAKER	%	29.25 BPJSTK : Target : 44%	33.76 BPJSTK : 53%	38.97 BPJSTK : 58%	44.99 BPJSTK : 65%

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE (2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
					Realisasi TW 3 : 32,95%			
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	SUSENAS BPS, PODES	%				
	(a) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum	(a) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum		%	53,88	52,96	52,15	51,35
	(b) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi dasar	(b) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi dasar		%	85,2	88,38	91,13	93,88
	(c) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan fasilitas Kesehatan Dasar	(c) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan fasilitas Kesehatan Dasar		%	86,15	87,91	90,30	92,70
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan:	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan:	BPS, SDKI	%				
	(a) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri	(a) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri		%	91,05	90,06	90,19	90,33
	(b) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak	(b) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak		%	1,27	PM	PM	PM
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE (2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	SET. BPBD	Jiwa	44 Meninggal 4 Hilang 86 Luka Luka 7.559 Mengungsi *Angka Sementara	PM	PM	PM
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	SET. BPBD	Rp	Rp	PM	PM	PM
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat provinsi dan kab/kota	SET. BPBD	Dokumen	KRB & RPB: 25 Kab/Kota API : Provinsi dan 3 Kab/Kota	KRB & RPB: Provinsi dan 28 Kabupaten/Kota API : 4 Kabupaten/Kota	KRB & RPB : 32 Kab/Kota API : 5 Kab/Kota	KRB & RPB : 35 Kab/Kota API : 6 Kab/Kota
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana	SET. BPBD	%	KRB & RPB: 71,43% API: 8,57%	KRB & RPB: 80% API: 11,43%	KRB & RPB: 91,43% API : 14,29%	KRB & RPB: 100% API: 17,14%

3.2 TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan, Jawa Tengah menetapkan 5 target yang diukur melalui 12 indikator TPB provinsi. Tujuan 2 ini memiliki target menjamin akses yang setara bagi semua orang khususnya orang miskin dan yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun dalam rangka menghilangkan kelaparan dan segala bentuk kekurangan gizi melalui upaya peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan kecil dengan menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan termasuk pengelolaan sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian. Target dan indikator untuk tujuan 2 Tanpa Kelaparan dapat dilihat pada Tabel III.2.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Tengah Tahun 2024-2026, strategi dan arah kebijakan dalam rangka menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan, dan perikanan berbasis kelembagaan korporasi;
- b. Menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- c. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM petani, peningkatan kapasitas usaha, peningkatan perlindungan, perluasan akses pemasaran berbasis teknologi informasi, serta mewujudkan kelembagaan petani berbasis korporasi.

Tabel III. 2 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE (2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan								
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	BPS, BKP, KEMENKES, FAO	%	10,44	11,69	11,58	11,47
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	BPS	%	3,09	PM	PM	PM
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi Stunting	KEMENKES (Riskesdas)	%	10,74 (Capaian e-PPGBM Feb 2023)	14	13	12
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Prevalensi Wasting	KEMENKES (Riskesdas)	%	5,81 (Capaian e-PPGBM Feb 2023)	PM	PM	PM
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	BKP, KEMENTAN	Skor	94,4 (2022)	94,5	94,6	94,7
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Prevalensi anemia pada ibu hamil	KEMENKES (Riskesdas)	%	10,39% (Juli 2023)	Menurun	Menurun	Menurun
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian								
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani	BPS	Ton/orang	62,81 (2021)	PM	PM	PM

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE (2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
	tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan	tanaman/peternakan/perikanan/ kehutanan						
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja	BPS	Juta Rp per tenaga kerja	46,35 (2022)	PM	PM	PM
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsector	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsector	SUTAS	USD/PPD	1.189,35 (2021)	PM	PM	PM
Target 2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	BPS	Hektar	25,04 (2021)	PM	PM	PM
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	DISTANBUN; DPUPR	Hektar	1.025.255	1.025.255	1.025.255	1.025.255
Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khusus nya negara kurang berkembang.								
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	BAPPEDA, BPS	%	0.108	PM	PM	PM

3.3 TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Dalam rangka mencapai kehidupan sehat dan sejahtera bagi semua, Jawa Tengah menetapkan 10 target yang diukur melalui 25 indikator TPB provinsi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan 3 berkaitan dengan penjaminan kesehatan yang berdampak kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, meliputi: (1) mengurangi kematian dan kesakitan; (2) mengakhiri epidemi; (3) perluasan akses layanan kesehatan; serta (4) serta transisi epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. Target dan indikator untuk tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dapat dilihat pada Tabel III.3.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Tengah Tahun 2024-2026, strategi dan arah kebijakan dalam rangka menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dilakukan melalui:

- a. Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana sarana kesehatan, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan standar prosedur operasional;
- b. Perluasan penemuan kasus, penurunan kasus tular vektor, dan pengendalian faktor risiko;
- c. Peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan surveilans berbasis laboratorium;
- d. Penguatan klaster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana;
- e. Peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan demam berdarah dengue (DBD), penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa, serta kejadian luar biasa atau krisis bencana;
- f. Akselerasi dan kolaborasi layanan kesehatan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta;
- g. Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan.

Tabel III. 3 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera								
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Jumlah kasus kematian ibu	DINKES	kasus	438	Menurun	Menurun	Menurun
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	BPS	%	(a) 99,66 (b) 93 *angka target	(a) 99,98 (b) 95	PM	PM
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000								
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES					
	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran	(a) Angka Kematian Balita (AKBa)		Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	9,3 per 1.000 KH	PM	PM	PM
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	8 per 1.000 KH	16 per 1.000 KH	PM	PM
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	BKKBN,BPS	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	5,9 per 1.000 KH	10 per 1.000 KH	PM	PM

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi heaptitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya								
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Jumlah kasus baru HIV yang ditemukan	DINKES	Kasus	3.464	PM	PM	PM
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jumlah kasus baru TB	DINKES	Kasus	84.965	78.642	PM	PM
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1.000 orang	DINKES	per 1.000 orang	0,02 per 1.000 orang	0,03 per 1.000 orang	0,03 per 1.000 orang	0,03 per 1.000 orang
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	DINKES	Kab/kota	34 Kab/Kota	34	35	35
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	DINKES	Jiwa	5 (Filariasis) + 476 (Kusta) (TW 2)	PM	PM	PM
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta	DINKES	Kab/kota	34	34	35	35
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	DINKES	Kab/kota	8	8	8	9
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan								
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	BPS	%	28,55	26,56	26,28	25,88
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Jumlah kasus hipertensi	KEMENKES	kasus	5.032.288	PM	PM	PM
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Jumlah kasus obesitas	KEMENKES	kasus	3.357.251	PM	PM	PM
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan								
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	BNN, KEMENKES	Orang	47	45	45	45
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	BNN	Orang	28	40	40	40

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN	%	65%	CPR = PM MCPR = 63,8% UNMET NEED KB = 14,75% (Unmet need KB: menggunakan metode yang lama) (Target BKKBN Pusat)	PM	PM
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan dikelompok umur yang sama.	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan dikelompok umur yang sama.	BKKBN	Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun)	19	19	PM	PM
3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	BKKBN,BPS	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	2,04	1,94 Target BKKBN 2023	PM	PM
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang								
3.8.1. (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS	%	5.43	PM	PM	PM
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	KEMENKES, BPJS KESEHATAN	%	94.54	PM	PM	PM
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat								

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	28.55	PM	PM	PM
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua								
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	KEMENKES	%	Cakupan Imunisasi Campak (SSGI): 43,41 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (SSGI): 78,67	PM	PM	PM
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	KEMENKES	%	83.30	96	PM	PM
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. a. Apoteker b. Bidan c. Dokter Gigi d. Dokter Spesialis e. Dokter Umum f. Perawat g. Tenaga Gizi h. Tenaga Kesehatan Lingkungan i. Tenaga Kesehatan Masyarakat j. Tenaga Keteknisian Medis k. Tenaga Keterampilan Fisik l. Tenaga Psikolog Klinik m. Tenaga Teknik Biomedika	KEMENKES	orang	(a) 0,315 (b) 1,136 (c) 0,074 (d) 0,112 (e) 0,365 (f) 2,054 (g) 0,105 (h) 0,06 (i) 0,09 (j) 0,254 (k) 0,115 (l) 0,006 (m) 0,314 *Capaian 2021	PM	PM	PM

3.4 TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan berkualitas untuk semua, Jawa Tengah menetapkan 8 target yang diukur melalui 11 indikator TPB provinsi. Tujuan 4 ini terdiri dari beberapa target yang indikatornya secara langsung berkaitan dengan penerima manfaat dari sistem pendidikan atau akses layanan, sementara tiga yang lain merupakan faktor pendorong kualitas pengajaran dan pembelajaran. Target dan indikator untuk tujuan 4 Pendidikan Berkualitas dapat dilihat pada Tabel III.4.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Tengah Tahun 2024-2026, arah kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan difokuskan melalui:

- a. Perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan akurat terhadap sumber daya, potensi dan permasalahan pendidikan termasuk anak tidak sekolah (ATS), pemenuhan layanan pendidikan pada wilayah blankspot terutama bagi ATS dan masyarakat miskin, perluasan cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, penyediaan layanan pendidikan yang terjangkau dengan model pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI), serta pemenuhan distribusi dan peningkatan kualitas guru, tenaga kerja kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Penguatan koordinasi secara lintas stakeholders, optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat, penguatan tata kelola pendidikan dengan optimalisasi dana operasional dan bantuan sekolah, pengendalian penyelenggaraan pendidikan, serta peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan terutama dalam evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- c. Peningkatan kualitas kebijakan berorientasi pada akses dan mutu pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS, masyarakat miskin, dan inklusi; peningkatan implementasi kebijakan dengan evaluasi pengendalian berkala; serta penguatan kebijakan pembangunan pendidikan yang berorientasi pada sinergi lintas sektor dan stakeholders;
- d. Penguatan internalisasi pendidikan karakter dengan perluasan dan penguatan implementasi kurikulum adaptif yang diarahkan pada pembentukan karakter siswa agar mempunyai nilai kearifan lokal, sikap kritis, kreatif, inovatif, anti-bullying, anti-kekerasan, anti-diskriminasi, budaya literasi dan bugar, peduli lingkungan, etos kerja yang baik, serta mengarah pada peran serta aktif guru dan siswa dalam proses pembelajaran berorientasi pembentukan karakter;
- e. Peningkatan relevansi pendidikan berorientasi pada identifikasi kesesuaian kompetensi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja, penyelesaian revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK), serta penguatan kerjasama multipihak.

Tabel III. 4 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 4: Pendidikan yang Berkualitas

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE (2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 4. Pendidikan yang Berkualitas								
Target 4.1 Pada tahun 2030,menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif								
4.1.1 (a)	Proporsi anak-anak dan remaja di : (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi peserta didik mencapai kompetensi minimum untuk: (a) Literasi SMA/Sederajat (b) Numerasi SMA/Sederajat (c) Literasi SMK Umum; (d) Numerasi SMK Umum; (e) Literasi SDLB; (f) Numerasi SDLB; (g) Literasi SMPLB; (h) Numerasi SMPLB; (i) Literasi SMALB; (j) Numerasi SMALB.	KEMENDIKBUD	%	(a) 36,39; (b) 19,92; (c) 43,08; (d) 22,26; (e) 39,95; (f) 37,40; (g) 31,63; (h) 15,02; (i) 30,14; (j) 17,47.	(a) 42,38; (b) 23,20; (c) 50,17; (d) 25,92; (e) 46,53; (f) 43,56; (g) 36,84; (h) 17,49; (i) 35,10; (j) 20,35.	(a) 49,36 (b) 27,02 (c) 58,43; (d) 30,19; (e) 54,19; (f) 50,73; (g) 42,90; (h) 20,37; (i) 40,88; (j) 23,70.	(a) 57,48; (b) 31,47; (c) 68,05; (d) 35,16; (e) 63,11; (f) 59,08; (g) 49,96; (h) 23,73; (i) 47,61; (j) 27,60.
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	BPS	%	SD/ sederajat : 98,12 SMP/ sederajat : 90,14 SMA/ sederajat :59,98 *merupakan angka target	SD/ sederajat: 98,68 SMP/ sederajat: 90,36 SMA/ sederajat: 60,28	SD/ sederajat: 98,86 SMP/ sederajat: 91,22 SMA/ sederajat: 60,98	SD/ sederajat: 99 SMP/ sederajat: 91,34 SMA/ sederajat: 62,25
4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	BPS	angka	SD/ sederajat: 0,37 SMP/ sederajat: 2,96 SMA/ sederajat: 27,15 *merupakan angka target	SD/ sederajat: 0,28 SMP/ sederajat: 2,68 SMA/ sederajat: 25,12	SD/ sederajat: 0,17 SMP/ sederajat: 2,43 SMA/ sederajat: 22,86	SD/ sederajat: 0,14 SMP/ sederajat: 2,25 SMA/ sederajat: 20,68
Target 4.2 Pada tahun 2030,menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar								

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar).	BPS	%	98,18	98,62	99,07	99,48
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas								
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS	%	24,78	24,95	25,38	25,74
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan								
4.4.1 (a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	BPS	%	81,00	PM	PM	PM
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	BPS	%	Rasio APM Perempuan/ Laki pada jenjang: SD/ Sederajat = 99,22 Rasio APM kuintil terbawah/ teratas pada jenjang: SD/ Sederajat = 100,25 Rasio APK (a) Perempuan/ Laki pada jenjang:	PM	PM	PM

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
					SMP/Sederajat = 101,02 SMA/Sederajat = 107,88 Perguruan Tinggi = 116,06 (b) Pedesaan/ Perkotaan pada jenjang: SMA/Sederajat = 86,92 (c) Kuintil terbawah/ teratas pada jenjang: SMP/Sederajat = 98,05 SMA/Sederajat = 74,83			
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	94,34	94,05	94,28	94,46
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air,	KEMENDIKBUD	%	Jenjang SD/MI (a) 99,80 (b) 97,41 (c) 5,99 (d) 96,89 (e) 61,91 (f) 80,88 Jenjang SMP/MTs (a) 99,18 (b) 97,27	PM	PM	PM

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
	kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).			(c) 50,77 (d) 97,86 (e) 63,48 (f) 84,33 Jenjang SMA/MA (a) 98,78 (b) 95,92 (c) 61,98 (d) 96,77 (e) 56,08 (f) 85,16 Jenjang SMK (a) 99,35 (b) 98,71 (c) 58,10 (d) 97,48 (e) 77,17 (f) 81,28 *Capaian 2022			
4.a.1 (a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Survei Lingkungan Sekolah	%	Siswa kelas 5 SD/ sederajat = 27,49 Siswa Kelas 8 SMP/ sederajat = 21,59 Siswa Kelas 11 SMA/ SMK/ sederajat = 10,88 *Capaian 2021	PM	PM	PM
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil								
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar	KEMENDIKBUD	%	TK/RA = 65,22 SD/MI = 91,58 SMP/MTs = 83,52 SMA/MA = 79,84			

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
	nasional menurut jenjang pendidikan	nasional menurut jenjang pendidikan			SMK = 97,55 SLB = 96,69 TOTAL = 85,67			
	<i>Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4</i>	<i>Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4</i>		%	SD = 97,60 SMP = 98,30 SMA = 98,80 SMK = 97,30 SLB = 96,30 *capaian 2021	SD = 98,20 SMP = 98,88 SMA = 99,43 SMK = 97,96 SLB = 96,50	SD = 98,78 SMP = 99,06 SMA = 99,68 SMK = 98 SLB = 96,60	SD = 98,90 SMP = 99,30 SMA = 99,88 SMK = 98,47 SLB = 96,70
	<i>Persentase Guru bersertifikat pendidik</i>	<i>Persentase Guru bersertifikat pendidik</i>		%	SD = 41,90 SMP = 55,80 SMA = 57,10 SMK = 44,20 SLB = 40,30 *capaian 2021	SD = 42,38 SMP = 57,80 SMA = 57,50 SMK = 48,20 SLB = 40,87	SD = 43,77 SMP = 58,80 SMA = 57,60 SMK = 50,02 SLB = 41,23	SD = 43,98 SMP = 59,80 SMA = 57,90 SMK = 52,60 SLB = 41,86

3.5 TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

Tujuan 5 mengenai pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di segala aspek kehidupan memiliki 9 target dan 14 indikator secara nasional, dengan Jawa Tengah mampu mengakomodir sebanyak 6 target dan 9 indikator sesuai dengan kewenangan pada tingkat provinsi. 2 (dua) target diantaranya adalah target yang indikatornya berkaitan dengan upaya mendorong tercapainya kesetaraan gender, sementara 4 (empat) target lainnya merupakan faktor pendorong pemberdayaan kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Target dan indikator untuk tujuan 5 Kesetaraan Gender dapat dilihat pada Tabel III.5.

Dalam rangka mencapai Tujuan 5 tersebut, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek, perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan kemandirian sasaran peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas data pilah gender dan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak, melalui:
 - 1) Fasilitasi pembentukan, pemetaan layanan, dan penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten/kota;
 - 2) jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi;
 - 3) Peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender;
 - 4) Peningkatan pendidikan antikekerasan sejak usia dini;
 - 5) Pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor;
 - 6) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA);
 - 7) Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel III. 5 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 5: Kestaraan Gender

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan								
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Rasio kekerasan terhadap perempuan	DP3AKB, KEMENPPA, BPS SPHPN	per 100.000	1,48 *capaian tw 2	5,6	5,5	5,25
		Rasio kekerasan terhadap anak	DP3AKB	per 100.000	3,34 *capaian tw 2	11,9	11,8	11,7
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Rasio kekerasan terhadap perempuan	DP3AKB, KEMENPPA, BPS	per 100.000	1,48 *capaian tw 2	5,6	5,5	5,25
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun.	BPS	%	7,82	8.23	7.92	6.89
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat								

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintahan daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintahan daerah	KPU, SETWAN, BKD	%	19,33	30	30	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BPS Sakernas	%	32,58 (2022)	PM	PM	PM
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut								
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan	BKKBN,BPS	%	27,91 *capaian 2017			
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan ,informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan ,informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DP3AKB; DINKES; BKKBN	Dokumen	0	0	0	0
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.								
5.a.1*	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas	Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah	BPS SUTAS	%	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian laki-laki = 52; perempuan = 16,75	PM	PM	PM

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
	tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	pertanian, menurut jenis kepemilikan.			(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian = 23,17 *capaian 2021			
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	BPS (SUSENAS)	%	64,74	PM	PM	PM

3.6 TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua memiliki 5 target yaitu mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, membetikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global; secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air; dan melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Target dan indikator untuk tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak dapat dilihat pada Tabel III.6.

Arah kebijakan yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan SDGs di bidang akses air bersih dan sanitasi adalah memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Arah kebijakan terkait dengan air bersih dan sanitasi layak adalah:

- a. Meningkatkan ketahanan sumber daya air, melalui Pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan; Peningkatan konservasi air tanah dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah serta pembangunan prasarana dan sarana konservasi air tanah; Pengembangan SPAM regional; dan Pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat dengan Peningkatan layanan penyediaan air bersih dan sanitasi pada permukiman;
- c. Meningkatkan ketahanan air dan lahan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui: Peningkatan ketahanan air terutama normalisasi sistem Sungai;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

Tabel III. 6 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak								
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	DPU BMCK	%	36,93 (2022)	40,93	42,93	44,93
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, membetikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan								
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	BPS; DPU BMCK					
		a. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	%	86,15	87,91	90,30	92,70
		b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	BPS	%	85,2	88,38	91,13	93,88
		c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka	BPS	%	2,9	PM	PM	PM

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
		<i>d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T dan sistem pengelolaan lumpur tinja</i>	DPU BMCK	%	9,94 (2022)	10,97	11,49	12,00
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global								
6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman	Jumlah limbah cair industri yang dikelola (yang dilaporkan)	KEMENLHK	M3/Tahun	8.571.998.566 (2022)	PM	PM	PM
6.3.2.(a)	Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku (Indeks Kualitas Air)	Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku (Indeks Kualitas Air)	KEMENLHK	Indeks	50,63 (2022)	50,66	50,67	50,68
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air								
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Persentase tampungan air baku berumber dari air permukaan terhadap potensi ketersediannya	DPU-SDATARU	%	Total Tampungan: 1.837.329.647 m3 Potensi Ketersediaan: 68,24 Milyar m3 Persentase : 2,69%	PM	PM	PM
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	Persentase pengambilan air tanah terhadap ketersediannya	BPS, PODES	%				
		<i>Persentase pengambilan air tanah</i>	DINAS ESDM	%	27,17 (TW 2)	27,5	27,6	27,8
Target 6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau								
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.		BIG, KLHK, KEMENPUPR, KEMENESDM	Indeks				

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
	<i>Indeks kualitas tutupan lahan</i>	<i>(a) Indeks kualitas tutupan lahan</i>	DLHK	Indeks	42,45 (2022)	42,45	42,46	42,47
	<i>Genangan air</i>			Indeks				
	<i>Tutupan vegetasi</i>	<i>(b) Tutupan vegetasi</i>	DLHK	Indeks	42,45 (2022)	42,45	42,46	42,47
	<i>Kuantitas air sungai dan estuary</i>			Indeks				
	<i>Kualitas badan air (permukaan dan tanah)</i>			Indeks				
	<i>Kuantitas akuifer air tanah</i>			Indeks				

3.7 TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Tujuan 7 mengenai penjaminan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern memiliki 5 target dan 9 indikator global, dengan Jawa Tengah mampu mengakomodir dan mengadopsi sesuai kewenangan sebagai Pemerintah Provinsi sebanyak 2 target dan 5 indikator, yang mencakup penjaminan akses universal layanan energi terjangkau dan peningkatan pangsa energi terbarukan. Target dan indikator untuk tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tujuan 7 dicapai melalui peningkatan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif, yang diwujudkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan energi berkelanjutan serta peningkatan pengembangan prasarana dan sarana energi baru dan terbarukan;
- b. Perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi terutama energi baru dan terbarukan;
- c. Peningkatan edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif.

Tabel III. 7 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern								
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi.	PLN, Dinas ESDM, BPS	%	99,99	PM	PM	PM
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Konsumsi listrik per kapita.	PLN, Dinas ESDM, BPS	kWh per kapita	1.103,75	768,1	779,6	791,3
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (yang terpasang)	PGN, Dinas ESDM	Sambungan Rumah (SR)	13.732 (2022)	PM	PM	PM
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Susenas BPS	%	92.51	95.01	97.5	100
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	Dinas ESDM	%	15,98	18,41	21,32	21,6

3.8 TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tujuan 8 berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan 8 tersebut, Jawa Tengah menetapkan sebanyak 8 target dan 13 indikator, yang mencakup upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi daerah; mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi; mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan layak bagi semua; mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan; mengakhiri kerja paksa, perbudakan dan penjualan manusia; melindungi hak-hak tenaga kerja dan lingkungan kerja yang aman; serta mempromosikan pariwisata berkelanjutan, budaya dan produk lokal. Target dan indikator untuk tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada Tabel III.8.

Jawa Tengah melalui 5 (lima) strategi dalam mencapai Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dengan 8 (delapan) target pencapaian di dalamnya, sesuai dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 antara lain:

- a. Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah, melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang layak;
- e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM petani, peningkatan kapasitas usaha, peningkatan perlindungan, perluasan akses pemasaran berbasis teknologi informasi, serta mewujudkan kelembagaan petani berbasis korporasi.

Tabel III. 8 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	%	3,97	4,5	4,6	4,7
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB per kapita.	BPS	Rupiah	45,20 juta	PM	PM	PM
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	-3,42	PM	PM	PM
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha makro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	%	60,39	60,04	59,86	59,64
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah rata-rata per jam pekerja.	BPS	Rp/Jam	13.381	13.300-13.600	13.600-13.800	13.800-14.000
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	BPS	%	5,13	5,44 - 4,94	5,2 - 4,6	4,9 - 4,3
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	6,07	5,06	4,85	4,28
Target 8.6 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak	BPS	%	19,39	26,25	25,49	24,74

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE (2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
	sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).						
Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.								
8.7.1 (a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja	BPS	%	2.41 (2022)	2,02	1,84	1,69
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	BPS, DISNAKER	Perusahaan	2.900 *angka target	2.929	2.959	2.988
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal								
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS, DINAS PARIWISATA	%	a) Proporsi: 3,49% b) Laju Pertumbuhan: 2,95%	a) Proporsi: 3,52% b) Laju Pertumbuhan: 0,90%	a) Proporsi: 3,55% b) Laju Pertumbuhan: 0,89%	a) Proporsi: 3,58% b) Laju Pertumbuhan: 0,88%
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jumlah wisatawan mancanegara.	DINAS PARIWISATA	Orang	165.752 (Realiasi TW II)	167.678	374.749	524.649
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DINAS PARIWISATA	Orang	26.168.160 (Realisasi TW II)	49.717.550	53.694.954	60.138.348

3.9 TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Dalam rangka pencapaian Tujuan 9 SDGs yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, Jawa Tengah menetapkan sebanyak 5 target dan 11 indikator, yang meliputi: (1) Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan tangguh; (2) Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan; (3) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan; dan (4) Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Perwujudan Tujuan 9 SDGs diupayakan melalui arah kebijakan yaitu memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor industri manufaktur sebagai sektor unggulan dan meningkatkan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar, dengan strategi yang akan dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*;
- b. Pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri;
- c. Pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah;
- d. Pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai;
- e. Mendorong persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang;
- f. Penguatan kelembagaan mendukung industri berbasis teknologi, inovasi, dan investasi hijau;
- g. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan.

Tabel III. 9 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi								
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan Nasional	Kondisi mantap jalan provinsi	DPU BMCK	Km	1530.63 (96,79%)	93,2%	93,5%	94,35%
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	DISHUB	a. Orang b. Barang (Kg)	Penumpang (TW 2): Laut : 246.982 Orang Udara : 2.000.074 Orang Darat : 19.188.385 Orang Barang (belum ada rekapitulasi)	PM	PM	PM
9.1.2 (a)	Jumlah bandara.	Jumlah bandara.	KEMENHUB	Unit	6	PM	PM	PM
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Jumlah pelabuhan penyeberangan	KEMENHUB	Unit	0	3	4	5
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Jumlah pelabuhan strategis.	KEMENHUB	Unit	11	PM	PM	PM
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	BPS					
		(a) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB		%	34,03	33,28	33,39	33,63

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
		<i>(b) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita.</i>		%	7,55 *capaian tw 2	15,28	15,78	16,25
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	%	4,31	3,25	3,5	3,75
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS	%	20,94	22,09 *Angka Sementara	22,39 *Angka Sementara	22,59 *Angka Sementara
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing								
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	KEMENLHK	Tingkat emisi CO2 (ton)	139,63 (2022)	PM	PM	PM
Target 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan kondisi kebijakan yang kondusif untuk diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditas.								
9.b.1*	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	BPS		9,23	PM	PM	PM
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030								
9.c.1*	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Jumlah pemerintah desa/kelurahan yang terfasilitasi internet	DISKOMINFO	pemerintah desa/kelurahan	325	415	505	595

3.10 TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Tujuan 10 adalah mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Dalam rangka mencapai tujuan 10, Jawa Tengah menetapkan sebanyak 4 target dan 8 indikator, yang mencakup mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional; memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua; menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif; serta mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. Target dan indikator untuk tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan dapat dilihat pada Tabel III.10.

Jawa Tengah dalam mencapai Tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara dengan 4 (empat) target di dalamnya, melalui peningkatan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:

- a. Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk masyarakat miskin;
- b. Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota untuk mengurangi wilayah kantong kemiskinan;
- c. Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat termasuk masyarakat miskin, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesmas;
- d. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;

Tabel III. 10 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara								
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1*	Rasio Gini.	Rasio Gini.	BPS, TNP2K, KEMENSOS	Nilai	0,369	0,364	0,362	0,36
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	10,47	9,76 - 8,96	9,28 - 8,08	8,67 - 7,28
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Jumlah desa tertinggal.	KEMENDES, DISPERMASDES	Desa	28 (Per Agustus)	0	0	0
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Jumlah Desa Mandiri.	KEMENDES, DISPERMASDES	Desa	825 (Per Agustus)	481	556	631
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan	BPS	%	16,1	15,45	14,80	14,15
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan	Indeks Kebebasan	BAPPENAS, BPS	Skor	85,84	85,84	85,84	85,84
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	KOMNAS PEREMPUAN	Aduan	0	0	0	0
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS, BPJS KETENAGAKERJAN, KEMENAKER	%	29,25	33,76	38,97	44,99

3.11 TUJUAN 11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Dalam rangka mencapai tujuan 11 yaitu Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 7 target dan 12 indikator. Target yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan 11 yaitu antara lain: Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh; Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua; Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara; Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak; Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan; Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. Target dan indikator untuk tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel III.11.

Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki permukiman kumuh. Ini juga melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak. Arah kebijakan terkait dengan Kota dan Permukiman Berkelanjutan adalah:

- Pembangunan kewilayahan disertai sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada peningkatan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, peningkatan fasilitas keselamatan, pengguna angkutan umum, dan kualitas simpul transportasi serta konektivitas jaringan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan, penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman, didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang.
- Peningkatan kualitas pelayanan transportasi dengan Konektivitas Jaringan Transportasi, Keselamatan Perjalanan Transportasi, Pelayanan Angkutan Umum. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, serta menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung upaya transformasi. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana tersebut berkaitan dalam hal pergerakan orang, distribusi barang dan jasa (efisiensi biaya perjalanan dan logistik), serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.

- Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH. Hal ini dilakukan untuk untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif dalam perlindungan sosial yang berkesinambungan.

Tabel III. 11 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan								
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh								
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS	%	68,21	68,94	69,68	70,41
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua								
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	BPS, Susenas Modul Ketananan Sosial	%	51,08 *capaian 2017 51,47 *capaian 2020	PM	PM	PM
11.2.1.(b).	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	DISHUB	%	9,18	9,28	10,48	10,48
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara								
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	BIG; KEMENPUPR		Laju Lahan Terbangun : -0,17 Laju Pertumbuhan Penduduk 2023 : 0,48 Rasio : -0,35	Laju Lahan Terbangun : -0,17 Laju Pertumbuhan Penduduk 2024 : 0,46 Rasio : -0,36	Laju Lahan Terbangun : -0,17 Laju Pertumbuhan Penduduk 2025 : 0,44 Rasio : -0,38	Laju Lahan Terbangun : -0,17 Laju Pertumbuhan Penduduk 2026 :0,42 Rasio : -0,40
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	SET. BPBD	Orang	44 Meninggal 4 Hilang 86 Luka Luka	PM	PM	PM

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
					7.559 Mengungsi *Angka Sementara			
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	SET. BPBD	%		PM	PM	PM
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota								
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Persentase sampah yang terkelola	KEMENLHK	%	61,47 (2022)	61	61	61
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	KEMENLHK	µgram/m3	4,8 (2022)	PM	PM	PM
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	KEMENLHK	Indeks	84,96 (2022)	85,01	85,02	85,03
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas								
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Proporsi Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkotaan	DINAS PUPR	%	8,36 *angka target 2023	8.86	9.36	9.86
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS	%	0,04 (2019)	PM	PM	PM
Target 11.b Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030								
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	SET. BPBD	%	KRB & RPB : 71,43% API : 8,57%	KRB & RPB : 80% API : 11,43%	KRB & RPB : 91,43% API : 14,29%	KRB & RPB : 100% API : 17,14%

3.12 TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB

Dalam rangka mencapai tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, Jawa Tengah menetapkan sebanyak 5 target dan 5 indikator. Target Tujuan 12 meliputi: Mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan; Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan; Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan Kembali; Menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam; Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Target dan indikator untuk tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab dapat dilihat pada Tabel III.12.

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun Jawa Tengah yang berkelanjutan, yang akan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, bebas pencemaran air, udara, sampah, yang didukung arah kebijakan:

- a. Mewujudkan kemandirian pangan dengan pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*); dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu;
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui penyediaan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), hibah prasarana dan sarana SPAL-D skala komunal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota;
- c. Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah;
- d. Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) regional;
- e. Mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional air bersih, persampahan, drainase, dan limbah;
- f. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah.

Tabel III. 12 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE (2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan								
Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.								
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Persentase sisa makanan	KEMENLHK	%	41,18	PM	PM	PM
Target 12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan								
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	Jumlah limbah B3 yang dilaporkan (ton)	KEMENLHK	Ton	1.589.621 (2022)	PM	PM	PM
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	KEMENLHK	Ton (sampah yang diangkut	7.600 (2022)	7.700	7.800	7.900
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLHK	Sekolah	3.163 (2022) 3.263 (Target 2023)	3,363	3,463	3,563
Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	Jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang dikembangkan	DINAS PARIWISATA	Lokasi	1 (Karimun Jawa)	2	2	2

3.13 TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Pencapaian Tujuan 13 yaitu Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan di Jawa Tengah didukung melalui 3 target dan 6 indikator. 3 target tersebut antara lain: Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara; Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional; dan Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Target dan indikator untuk tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dapat dilihat pada Tabel III.13.

Perubahan iklim berdampak pada planet tempat kita hidup, dan segala dinamika hidup didalamnya secara signifikan, dan menjadi salah satu isu pembangunan global yang paling penting saat ini. Tindakan / aksi nyata berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memitigasi perubahan iklim ini. Arah kebijakan terkait dengan penanganan perubahan iklim adalah:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, melalui:
 - 1) Peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien;
 - 2) Peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara;
 - 3) Peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat;
 - 4) Peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - 5) Peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim;
 - 6) Penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon;
 - 7) Penyusunan perencanaan tata ruang serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Menurunkan risiko bencana, melalui:
 - 1) Penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
 - 3) Perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana;
 - 4) Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB);
 - 5) Peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB);
 - 6) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif;

- 7) Peningkatan kesiapan dan aktivasi klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota;
- 8) Pengembangan database logistik dan peralatan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan provinsi;
- 9) Penyusunan kebijakan dan implementasi mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana;
- 10) Penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif;
- 11) Penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi;
- 12) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Tabel III. 13 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan								
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	BNPB	per 1.000 orang	44 Meninggal 4 Hilang 86 Luka Luka 7.559 Mengungsi *Angka Sementara	PM	PM	PM
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	BNPB	%	KRB & RPB: 71,43% API: 8,57%	KRB & RPB: 80% API: 11,43%	KRB & RPB: 91,43% API: 14,29%	KRB & RPB: 100% API: 17,14%
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	KEMENLHK	MTon CO2e	102,75 (2021)	PM	PM	PM
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	BAPPENAS	%	0.4 (2022) 0,8 (Target 2023)	1.2	1.7	2.2
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	BAPPENAS	%	0,3 (2021)	PM	PM	PM
Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.								
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	KEMENLHK	Sekolah	3.163 (2022) 3.263 (Target 2023)	3,363	3,463	3,563

3.14 TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN

Tujuan 14 yaitu Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan memiliki 3 target dan 5 indikator di Jawa Tengah. Adapun 4 target antara lain yaitu Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif; melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia; melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the *World Trade Organization*; Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar. Target dan indikator untuk tujuan 14 Ekosistem Lautan dapat dilihat pada Tabel III.14.

Tujuan 14 Ekosistem Lautan merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka pemeliharaan sumber daya sebagai aset pembangunan nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, serta peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan, arah kebijakan pembangunan terkait pengelolaan Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada arah kebijakan utama, yaitu peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah antara lain dengan:

- a. Mengelola ekosistem habitat vital;
- b. Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan seperti melalui sosialisasi pentingnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dengan kegiatan rehabilitasi, pengakayaan kembali maupun konservasi pada ekosistem habitat vital;
- c. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengendalian terhadap spesies serta jalur migrasi spesies yang dilindungi;
- d. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengendalian terhadap spesies yang dilindungi;
- e. Mengendalikan, mengurangi, mencegah dan mengantisipasi upaya terjadinya degradasi habitat vital dan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Meningkatkan upaya produktivitas dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis daya dukung lingkungan;
- g. Meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian dan pengelolaan berbagai aktivitas antropogenik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- h. Meningkatkan upaya produktivitas perikanan dan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Mengembalikan fungsi hutan mangrove sebagai pelindung Pantai;
- j. Memanfaatkan perairan pulau-pulau kecil sebagai ruang aktivitas di bidang perikanan dan kelautan;
- k. Mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan kawasan khusus yaitu Segara Anakan, Nusakambangan dan Karimunjawa secara berkelanjutan;
- l. Memperketat penjagaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah perairan oleh berbagai sektor;
- m. Meningkatkan upaya ketahanan, peringatan dini dan mitigasi bencana di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. Memberikan pengaturan, supervisi dan tindakan tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan lahan di daerah pantai serta memperkuat sinergitas dan harmonisasi kegiatan berbagai sektor.

Tabel III. 14 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 14: Ekosistem Lautan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan								
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.								
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	KKP	Dokumen	1	1	1	1
Target 14.5 Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	Jumlah kawasan dan luas konservasi yang dikelola numenklatur tambah hkan darat air.	KEMENLHK, KKP	Ha	4 kawasan: 4.246,86Ha	PM	PM	PM
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ke lembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	DKP	Dokumen	1	1	1	1
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	DKP	Kab/Kota		PM	PM	PM
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	DKP	Orang	10,000	10,000	10,000	10,000

3.15 TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN

Tujuan 15 yaitu Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan memiliki 4 target dan 6 indikator di Jawa Tengah, dengan target yaitu menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional; meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global; menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi; menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Target dan indikator untuk tujuan 15 Ekosistem Daratan dapat dilihat pada Tabel III.15.

Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan arah kebijakan terkait dengan tujuan 15 tersebut adalah:

- a. Meningkatkan penguatan pengelolaan hutan dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun; rehabilitasi lahan kritis melalui pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove, dan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air; penanganan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan; perlindungan dan pengamanan hutan dan perbenihan tanaman hutan, serta fasilitasi penataan areal IPHPS (izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial);
- b. Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pengelolaan Kebun Raya; Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga Kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam melalui perencanaan; Pengelolaan Kawasan ekosistem esensial (KEE) dan pendampingan masyarakat penyangga KEE; perlindungan tumbuhan dan satwa liar, penanganan konflik satwa liar; pengendalian pemanfaatan TSL; Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah;
- c. Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan dan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM kehutanan; pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan sosialisasi, pendampingan penguatan pengelolaan untuk kelembagaan, kawasan dan usaha, serta penguatan pokja percepatan perhutanan sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial; serta pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)/pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (kulin KK)/izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS).

Tabel III. 15 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 15: Ekosistem Daratan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan								
Target 15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional								
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	KEMENLHK	%	0,31 (2022)	0.31	0.31	0.31
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	KEMENLHK	Ha	99.225,72 (2022)	PM	PM	PM
Target 15.2 Pada tahun 2030, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global								
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	KEMENLHK	Unit	27 (2022)	PM	PM	PM
Target 15.3 Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	KEMENLHK	%	0,64 (2022)	0,61	0,61	0,61
Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.								
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	KEMENLHK	Unit	38 (2022)	PM	PM	PM
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan	Indeks tutupan hijau pegunungan	KEMENLHK	%	98 *capaian 2021	PM	PM	PM

3.16 TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Tujuan 16 mengenai penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan 16 ini memiliki 12 target dan 54 indikator secara nasional, dengan Jawa Tengah mampu mengakomodir sebanyak 9 target dan 25 indikator sesuai dengan kewenangan pada tingkat provinsi. Target dan indikator untuk tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dapat dilihat pada Tabel III.16.

Dalam rangka mencapai tujuan penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan, arah kebijakan yang akan dilakukan meliputi pengoptimalan implementasi reformasi birokrasi, peningkatan ketahanan keluarga serta pemenuhan dan perlindungan hak anak. Strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi;
- b. Transformasi digitalisasi pemerintahan;
- c. Evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis;
- d. Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, pengembangan pola karier, peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, pemetaan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik;
- e. Penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis TI;
- f. Penguatan pengawasan dan pengendalian sesuai tujuan dan risiko;
- g. Peningkatan pelayanan publik pada masyarakat dan membangun *open government*;
- h. Pengendalian produk hukum dan penegakan perda;
- i. Peningkatan demokrasi Indonesia kepada masyarakat termasuk pendidikan politik perempuan;
- j. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; dan
- k. Memberikan kesempatan yang sama termasuk bagi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Tabel III. 16 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh								
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLDA	Kasus	36 (Semester 1)	PM	PM	PM
16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLDA, KESBANGPOL	Kematian/ 100.000 Penduduk	0 (Semester 1)	PM	PM	PM
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS	%	0,04 (2019)	PM	PM	PM
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	%	74,56 (2020)	PM	PM	PM
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS	%	45,12 (2020)			
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	KEMENPPA, BPS	%				
		Rasio kekerasan terhadap anak	DP3AKB	per 100.000	3,34 (TW 2)	11,9	11,8	11,7
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE (2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS	%	36,02 (2020)	PM	PM	PM
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	KEMENKUMHAM	%	100	100	100	100
		<i>Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan rentan baik litigasi maupun nonlitigasi</i>	BIRO HUKUM	Perkara	200	200	200	200
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Survei Penilaian Integritas	KPK, INSPEKTORAT	Angka	77,9	79,83	80,14	80,46
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Persentase opini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat opini WTP.	BPK	Nilai	WTP (Pemprov) 100% (Kab/Kota WTP)	WTP (Pemprov) 100% (Kab/Kota WTP)	WTP (Pemprov) 100% (Kab/Kota WTP)	WTP (Pemprov) 100% (Kab/Kota WTP)
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq$ B	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq$ B	KEMENPAN RB	%	100%	100%	100%	100%
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ B	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ B	KEMENPAN RB	%	83,13			
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	OMBUDSMAN RI	instansi	5 OPD Prov (2022)	PM	PM	PM
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representif di setiap tingkatan								

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	Jumlah Perempuan DPRD: 23 perempuan, sedangkan total anggota DPRD: 120 orang (laki2 dan perempuan) 19,61% (bulan Agustus 2023)	30	30	30
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	16.7	PM	PM	PM
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	BPS, BAPPENAS	Indeks	76,73	84,08	84,33	84,59
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indeks Aspek Kebebasan	BPS, BAPPENAS	Indeks	85,84	85,84	85,84	85,84
16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan	Indeks Kesenjangan	BPS, BAPPENAS	Indeks	80,24	85,01	85,01	85,15
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS	%	92,85	92,47	93,44	94,87
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	BPS	%	96,66	97,78	98,89	100

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS	%	97,32	PM	PM	PM
Target 16.10 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran								
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.	Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)	DEWAN PERS, BPS	Indeks	80,99 (2022)	PM	PM	PM
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	KIP, KOMINFO	OPD	27 (2022)	31	33	35
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	KIP, KOMINFO	Putusan	85 (2022)	86	PM	PM
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	KOMNAS PEREMPUAN	Kebijakan/Dokumen	0	0	0	0

3.17 TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Dalam rangka mencapai kemitraan untuk mencapai tujuan, Jawa Tengah menetapkan 4 target yang diukur melalui 8 indikator TPB provinsi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan 17 berkaitan dengan target antara lain memperkuat mobilisasi sumber daya domestik; meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi; mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif; serta mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. Target dan indikator untuk tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dapat dilihat pada Tabel III.17.

Kebijakan dan strategi ke depan untuk mendorong pencapaian tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; serta penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah dan pemerintah dengan Lembaga nonpemerintah; peningkatan peran masyarakat sebagai *co-creator*; serta memaksimalkan peran masyarakat dalam mendukung program pembangunan.
- c. Meningkatkan sumber pembiayaan alternatif diantaranya melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan BAZNAS.

Tabel III. 17 Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global								
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB.	KEMENKEU, BAPPENAS, KEMDAGRI	%	1,002	1,064	0,832	0,848
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB.	KEMENKEU, BAPPENAS, KEMDAGRI	%	0,824	0,905	0,684	0,703
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	KEMENKEU, BAPPENAS, KEMDAGRI	%	101,97	108,00	93,93	92,36
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1*	Persentase pengguna internet.	Persentase pengguna internet.	BPS	%	47,74 (2019) 75,12 (angka proyeksi 2023)	82,21	89,31	96,41
		Persentase rumah tangga yang mengakses internet	BPS	%	82,88 (2021) 89,73 (angka proyeksi 2023)	93,15	96,58	100
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama								
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	BAPPENAS, KEMENDAGRI	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BAPPENAS, KEMENDAGRI	Proyek	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs PROVINSI	SUMBER DATA	SATUAN	ANGKA DASAR/ BASELINE(2023)	TARGET TAHUNAN		
						2024	2025	2026
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	BAPPENAS, KEMENDAGRI	RP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	BAPPENAS, KEMENDAGRI	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang								
17.19.2.(e)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dirjen DUKCAPIL; DISPERMASDES DUKCAPIL	Variabel/ Database	2 (Data Kelahiran dan Data Kematian)	2	2	2

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPD Provinsi Jawa Tengah. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan tingkat provinsi. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang tercantum dalam RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun nonpemerintah.

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

4.2 Waktu Pemantauan dan Evaluasi

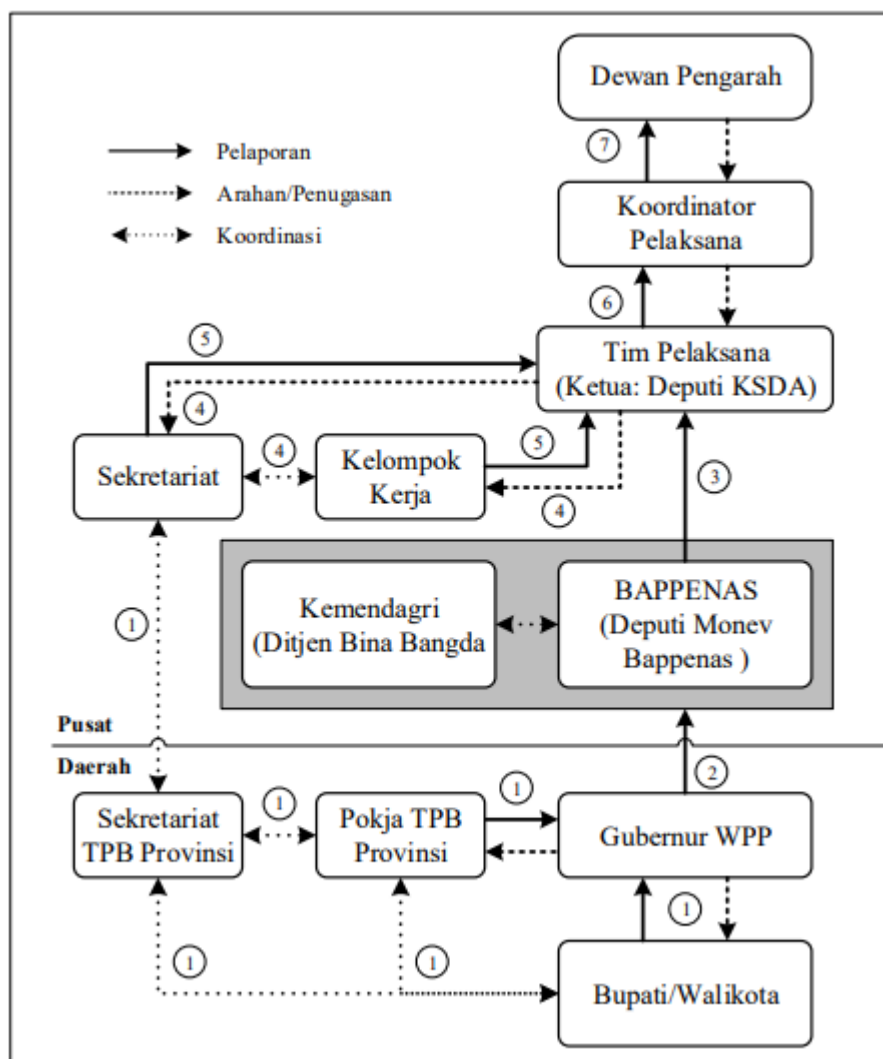
Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 111 Tahun 2022 khususnya Pasal 15 tentang kewajiban GWPP untuk menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan RAD TPB kepada Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Berdasarkan Perpres tersebut, dan saat ini sedang dalam proses pemutakhiran pedoman monev yang akan disahkan sebagai Peraturan Menteri (Permen), pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAD TPB hanya cukup dilakukan 1 (satu) kali setahun sebagai evaluasi tahunan, yang kemudian disampaikan kepada Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam bentuk Laporan Evaluasi Tahunan.

Batas waktu penyampaian Laporan Evaluasi mengalami perubahan, yang semula dilaksanakan T+1 bulan (bulan Januari tahun berikutnya) menjadi T+9 bulan (bulan September tahun berikutnya).

4.3 Alur dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

A. Alur Pemantauan dan Evaluasi – Kategori Pemerintah

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1-3 Perpres Nomor 111 Tahun 2022 (Perubahan Perpres Nomor 59 Tahun 2017). Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan pencapaian atas pelaksanaan RAD TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 15 Ayat 2 Perpres Nomor 111 Tahun 2022.



Gambar 4. 1 Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pelaporan pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti Langkah-langkah sebagai berikut:

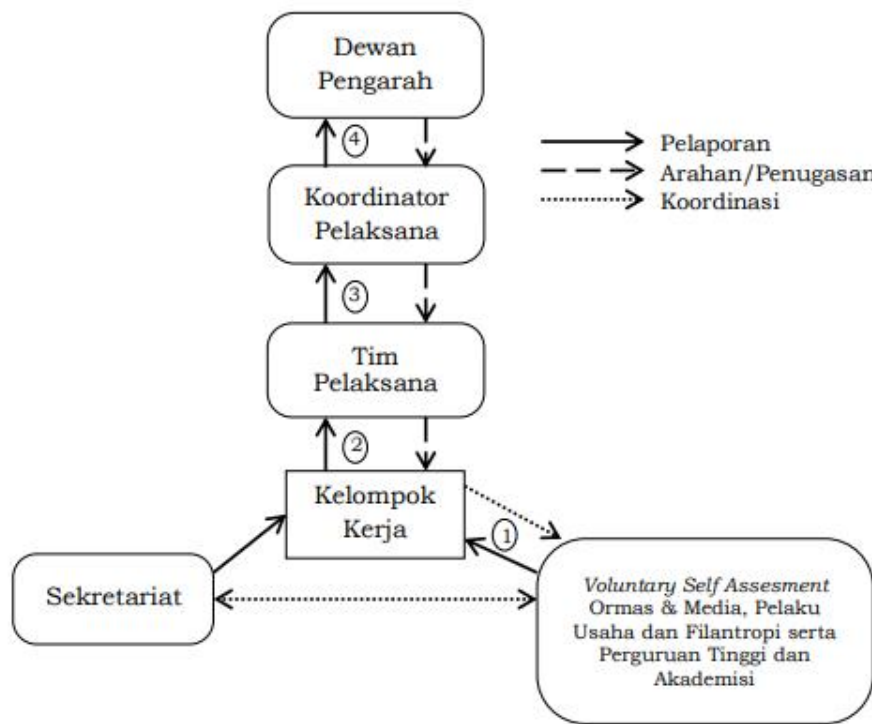
- 1) Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap satu tahun sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama

dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs (Langkah 1).

- 2) Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).
- 3) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (Langkah 3).
- 4) Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
- 5) Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
- 6) Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (Langkah 6).
- 7) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 15 Ayat 3 Perpres Nomor 111 Tahun 2022 (Langkah 7).

B. Alur Pemantauan dan Evaluasi – Kategori NonPemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme "penilaian diri sukarela" (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati.



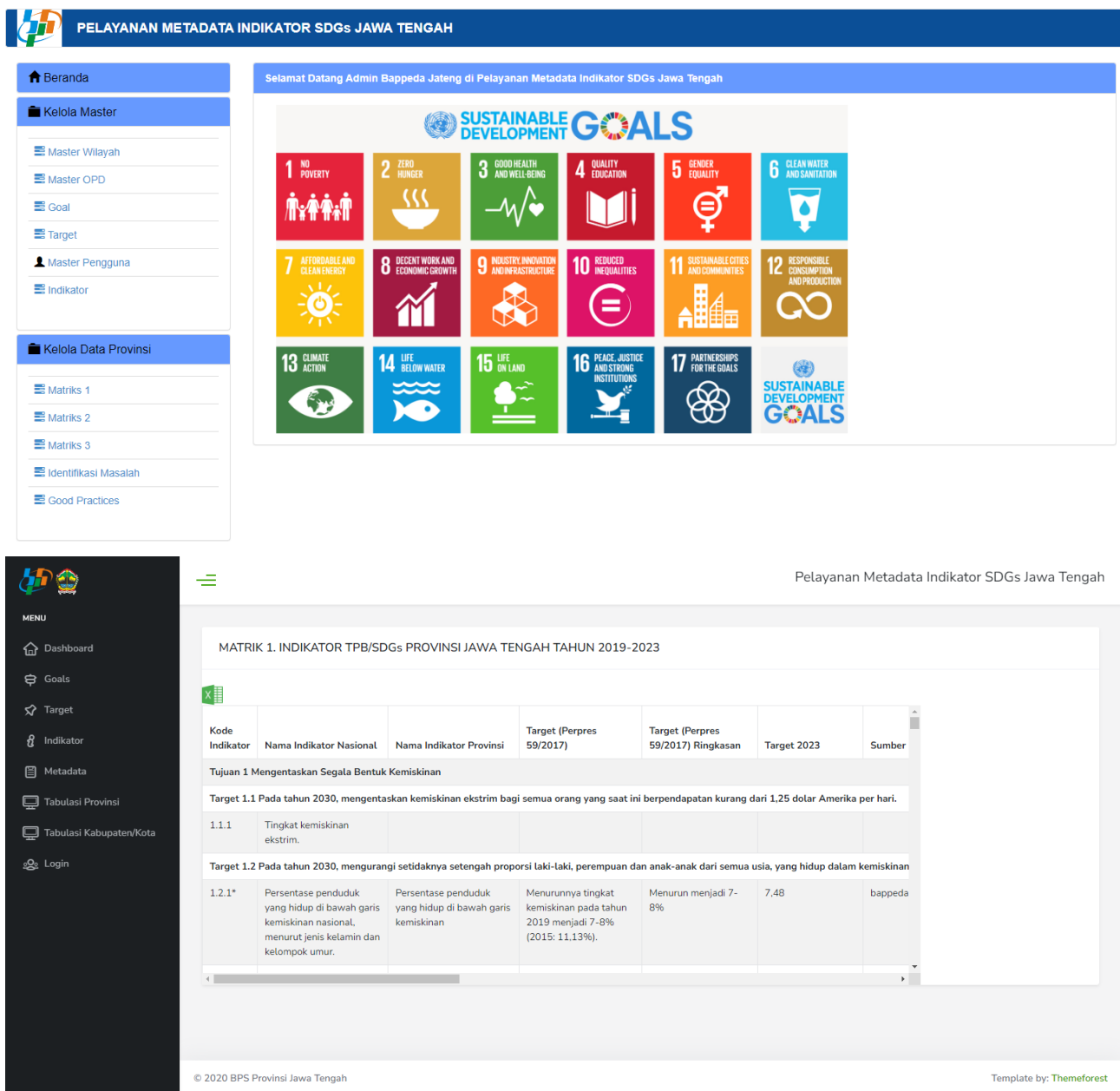
Gambar 4. 2 Alur Informasi Pemantauan Organisasi NonPemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).
- 2) Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).
- 3) Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaiakannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).
- 4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

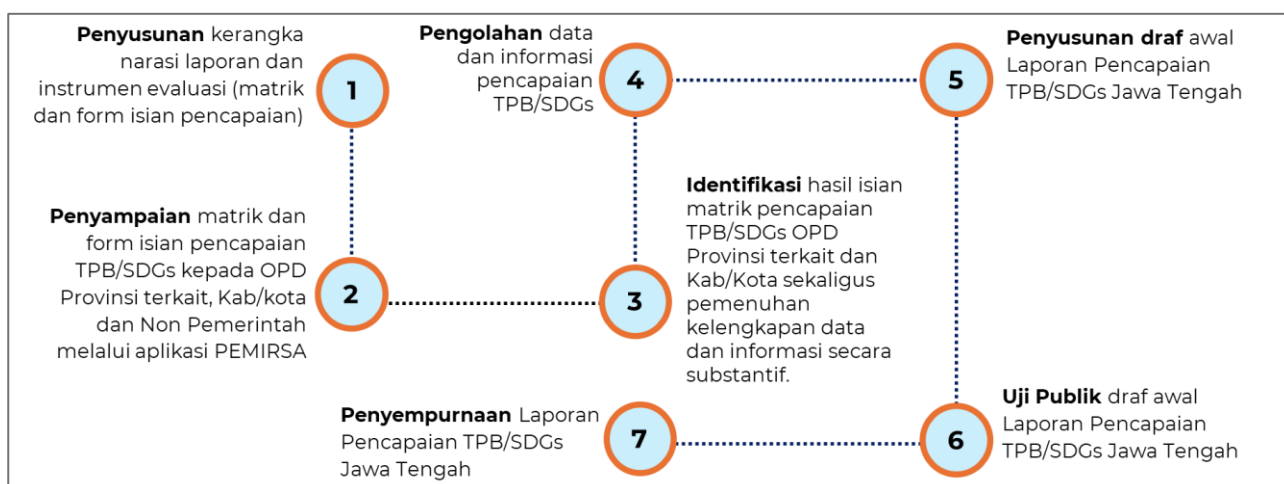
Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi web yang dikembangkan oleh Sekretariat TPB/SDGs Jawa Tengah bekerjasama dengan BPS Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi web dengan nama "PEMIRSA: Pelayanan Metadata Indikator SDGs Jawa Tengah" merupakan platform digital yang bertujuan untuk memudahkan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Melalui aplikasi web tersebut, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan pengisian data dan pengiriman bahan pemantauan dan evaluasi (matrik dan form). Sehingga, penyampaian pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs oleh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak lagi dilakukan secara manual (*by email*). Selain itu, aplikasi web ini juga menjadi sarana diseminasi data capaian SDGs Jawa Tengah kepada publik.



Gambar 4. 3 Tampilan Aplikasi Web PEMIRSA

Adapun secara lebih rinci, mekanisme dan tahapan penyusunan Laporan Evaluasi RAD TPB/SDGs sebagai berikut.



Gambar 4. 4 Tahapan Penyusunan Laporan Evaluasi RAD TPB/SDGs Tahunan

4.4 Bahan Pemantauan dan Evaluasi

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi adalah:

- 1) Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs periode berjalan;
- 2) Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;
- 3) Data program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan TPB/SDGs termasuk capaian target dan realisasi anggarannya; dan
- 4) Dokumen pencapaian kinerja nonpemerintah.

4.5 Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Substansi laporan pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:

A. Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs

Cara Pengisian Formulir Evaluasi (**FORM 1**)

Nama Tujuan SDGs (1)							
Nama Target SDGs (2)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (9)	Status (10)

Cara Pengisian Formulir Evaluasi (FORM 1)

- Nomor (1): diisi dengan nama tujuan TPB/SDGs global

- Nomor (2): diisi dengan nama target TPB/SDGs global
- Nomor (3): diisi dengan kode indikator TPB/SDGs global
- Nomor (4): diisi dengan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional
- Nomor (5): diisi dengan nama survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan data realisasi indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional
- Nomor (6): diisi dengan satuan dari indikator TPB/SDGs seperti persen, jumlah absolut, indeks, dll
- Nomor (7): diisi dengan penetapan angka capaian pada tahun dasar untuk setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan
- Nomor (8): diisi dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan yang diambil dari tabel Bab III tiap indikator SDGs pada Dokumen RAD TPB/SDGs 2024-2026
- Nomor (9): diisi dengan capaian/realisasi tahun berjalan pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan
- Nomor (10): diisi dengan simbol yang menunjukkan status pencapaian indikator SDGs yang diukur dari perbandingan capaian indikator TPB/SDGs tahun berjalan dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan. Simbol status pencapaian sebagai berikut:

Simbol	Keterangan
 : Tercapai (<i>achieved</i>)	Target tahun berjalan dapat tercapai
 : Akan Tercapai/membaik (<i>positive change</i>)	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya (indikator tanpa target)
 : Akan Tercapai/membaik (<i>positive change</i>)	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai

B. Formulir Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah dan NonPemerintah

1) Cara Pengisian Formulir Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah Daerah (**FORM 2b**).

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN					SATU-AN	TARGET TAHUN (n)	REALISASI TARGET		ALOKASI ANGGARAN TAHUN (n)	REALISASI ANGGARAN		SUMBER PENDANAAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
Target TPB/SDGs (10):														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs (11):														
Kode prog (12)	Nama Program (13)													
Kode keg (14)	Nama Keg (15)	Kode subkeg (16)	Nama Subkeg (17)	Indikator Subkeg (18)										

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks di atas adalah sebagai berikut:

- Nama Tujuan SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Nomor (1): diisi dengan nama program, kegiatan, sub kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan dengan acuan RAD TPB/SGDs;
- Nomor (2): diisi dengan satuan untuk mengukur sub kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst);
- Nomor (3): diisi dengan target capaian untuk setiap sub kegiatan. Data sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (4): diisi dengan capaian/realisasi sub kegiatan pada semester I dan II tahun yang bersangkutan dengan memasukkan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Nomor (5): diisi dengan alokasi anggaran pada tingkat sub kegiatan. Data sesuai Renja dan RKA OPD pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (6): diisi dengan realisasi anggaran pada semester I dan II yang dihitung selama tahun berjalan untuk setiap sub kegiatan;
- Nomor (7): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan sub kegiatan (APBD, DAU, DAK, Dana Desa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
- Nomor (8): diisi dengan lokasi aktual di mana intervensi pada sub kegiatan tersebut dilaksanakan atau lokasi dimana barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat;
- Nomor (9): diisi dengan nama OPD yang melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut;
- Nomor (10): diisi dengan target TPB/SDGs

- Nomor (11): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs;
- Nomor (12): diisi dengan kode program yang terdapat dalam Renja OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (13): diisi nama program yang terdapat dalam Renja OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (14): diisi dengan kode kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (15): diisi dengan nama kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (16): diisi dengan kode sub kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019;
- Nomor (17): diisi dengan nama sub kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019; dan
- Nomor (18): diisi dengan indikator sub kegiatan yang terdapat dalam Renja dan RKA OPD sesuai Lampiran Permendagri No. 90 Tahun 2019.

2) Cara Pengisian Formulir *Self Assessments* Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program NonPemerintah (**FORM 3**).

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN		SATU-AN	TARGET TAHUN (n)	REALISASI TARGET		ALOKASI ANGGARAN TAHUN (n)	REALISASI ANGGARAN		SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LEMBAGA PELAKSANA				
				Sem 1	Sem 2		Sem 1	Sem 2							
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)				
Target TPB/SDGs (10):															
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs (11):															
Nama Program (12)															
Nama Keg 1 (13)	1.1 Output Kegiatan (14)														
	1.2 Output Kegiatan														
Nama Keg 2	2.1 Output Kegiatan														
	2.2 Output Kegiatan														

Rincian pengisian setiap kolom dari matriks diatas adalah sebagai berikut:

- Nama Tujuan SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Nomor (1): diisi dengan nama program, kegiatan, output kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- Nomor (2): diisi dengan satuan untuk mengukur output kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst);

- Nomor (3): diisi dengan target capaian untuk setiap output kegiatan pada tahun yang bersangkutan dengan memasukkan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Nomor (4): diisi dengan capaian/realisasi output kegiatan pada semester I dan II tahun yang bersangkutan dengan memasukkan data dari dokumen resmi termutakhir;
- Nomor (5): diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap output kegiatan. Data mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- Nomor (6): diisi dengan realisasi anggaran pada semester I dan II yang dihitung selama tahun berjalan untuk setiap output kegiatan;
- Nomor (7): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan output kegiatan tersebut pada tahun yang bersangkutan;
- Nomor (8): diisi dengan lokasi aktual pelaksanaan output kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa);
- Nomor (9): diisi dengan nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.
- Nomor (10): diisi target TPB/SDGs;
- Nomor (11): diisi dengan kode dan nama indikator TPB/SDGs;
- Nomor (12): diisi dengan nama program yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
- Nomor (13): diisi dengan nama kegiatan yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah; dan
- Nomor (14): diisi dengan nama output kegiatan yang terdapat pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah.

C. Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut (FORM 4)

Tujuan SDGs		Identifikasi Masalah		Rencana	Institusi Pelaksana
		Kategori	Deskripsi Masalah	Tindak Lanjut	Pemerintah/Non Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nomor dan Nama Tujuan Target	Sumber Daya Manusia Kelembagaan Keuangan Regulasi Operasional Politik Lainnya...				

Cara Pengisian Laporan Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

- Nomor (1): diisi dengan nomor Tujuan dan nama serta target TPB/SDGs;

- Nomor (2): diisi dengan kategori masalah sesuai dengan identifikasi masalah. Kategori tersebut bisa dipilih lebih dari satu. Pilihan kategori diantaranya adalah: – Sumber Daya Manusia – Kelembagaan – Keuangan – Regulasi – Operasional – Politik – Lainnya (...) (mohon diisi sesuai identifikasi masalah yang disampaikan);
- Nomor (3): diisi dengan deskripsi masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program untuk mencapai masing-masing tujuan dan target SDGs sesuai dengan kategori masalah;
- Nomor (4): diisi dengan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah baik untuk pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga atau Lembaga Non Pemerintah; dan
- Nomor (5): diisi dengan nama K/L dan OPD atau Lembaga Non Pemerintah yang mempunyai masalah tersebut.

D. Formulir Pembelajaran/Praktik Baik Pelaksanaan TPB/SDGs (FORM 5)

Pembelajaran pelaksanaan TPB/SDGs dimaksudkan untuk merekam informasi dan pengalaman baik yang dilaksanakan baik institusi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga dapat direplikasi di daerah lain. Skala pengalaman bisa bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas, program dan kegiatan yang jelas, data yang akurat, dan dapat direplikasi di tempat lain.

Format pelaporan pembelajaran TPB/SDGs (FORM 5) dituliskan di dalam kotak (*box*) dan mencakup informasi sebagai berikut:

1. Nama Tujuan dalam TPB/SDGs
2. Nama Institusi
3. Nama Program
4. Lokasi dan Waktu Kegiatan
5. Latar Belakang
6. Proses Pelaksanaan (strategi, pihak terlibat, penerima manfaat, dll)
7. Hasil dan Dampak
8. Tantangan dan Pembelajaran
9. Peluang Replikasi

Catatan: maksimal satu halaman termasuk grafik, foto, peta lokasi (koordinat), website, dll

4.6 Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Setiap akhir tahun pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah daerah menyusun laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang mengacu pada hasil kompilasi Form 1 sampai dengan Form 5. Laporan pencapaian TPB/SDGs memuat sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs (Ringkasan narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan mengacu pada FORM 1)
3. Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs Per Tujuan
 - a. Keadaan dan Kecenderungan (tren)
 - b. Tantangan dan pembelajaran
 - c. Kebijakan dan strategi
 - d. Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs
4. Penutup

Proses penyusunan laporan harus melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari penyusunan jadwal kerja, penyusunan outline laporan, pembahasan setiap bab laporan dan finalisasi laporan.

Selama proses penyusunan laporan, pihak pemerintah dan organisasi nonpemerintah dapat saling memberikan *review* umpan balik (*feedback*) atas proses pelaksanaan TPB/SDGs serta hasil capaian indikator, program dan kegiatan TPB/SDGs baik dari sisi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok yang Terarah.

Waktu penyampaian laporan pencapaian TPB/SDGs baik pihak pemerintah maupun nonpemerintah berdasarkan penjelasan pada subbab 4.2 dan mekanisme alur penyampaian laporan secara resmi mengikuti petunjuk pada subbab 4.3 pada dokumen pedoman ini.

4.7 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Sekretariat TPB/SDGs Jawa Tengah telah menyiapkan laman <https://pemirsasdgs.jatengprov.go.id/> sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, publikasi hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dalam bentuk Laporan Pencapaian TPB/SDGs yang disampaikan rutin setiap tahun juga dilakukan secara *online* tersedia pada laman <https://bappeda.jatengprov.go.id/>.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan *leave no one behind* (tidak meninggalkan siapapun). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Jawa Tengah. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target masing-masing indikator saling berkait, dan/atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/*goal*/tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan/goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik bagi kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) penguatan kerja sama multipihak; (2) penguatan koordinasi; (3) peningkatan kapasitas; serta (4) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga telah diterapkan di Jawa Tengah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya masing-masing unsur dalam keanggotaan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs. Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama-sama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi. BAPPEDA di tingkat provinsi mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Untuk aspek **kerangka hukum**, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerangka

hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, telah ditetapkan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs di tingkat provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 120/11 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang melibatkan peran unsur pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, serta wewenang, tugas, dan tata cara kerjanya. Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu Tim Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi.

Dalam aspek **substansi program**, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Strategi Komunikasi. Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen model Komunikasi TPB/SDGs yang dijabarkan lebih operasional.

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.***

